Muhammad Aziz Hakim, dkk.

MODERASI ISLAM

Deradikalisasi, Deideologisasi & Kontribusi untuk NKRI

Pengantar: Menpora Republik Indonesia
Penyunting: Saiful Mustofa

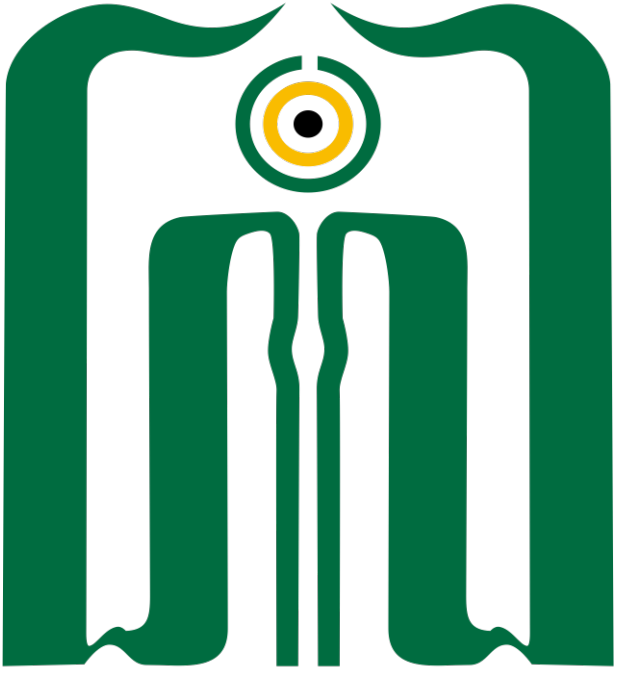

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

Muhammad Aziz Hakim, dkk.

Moderasi Islam:
Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI

Pengantar:
Menpora RI

Penyunting:
Saiful Mustofa

Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI

Copyright ©, Muhammad Aziz Hakim, dkk., 2017
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Penyunting: Saiful Mustofa
Layout: Khabibur Rohman
Desain cover: Diky M. F
xviii+165 hlm: 14 x 20,3 cm
ISBN: 978-602-61824-3-2

Cetakan Pertama, November 2017

Diterbitkan oleh:
IAIN Tulungagung Press
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung
Telp/Fax: 0355-321513/321656/085649133515
Email: iain.tulungagung.press@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengantar Menpora

Moderasi Islam dan Ikhtiar Merawat ke-*Bhinneka*-an

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya menyambut gembira atas inisiatif teman-teman dosen IAIN Tulungagung—yang mayoritas masih muda ini—untuk menulis bunga rampai tentang moderasi Islam. Mereka semua merespon baik atas himbauan Menteri Agama untuk sesegera mungkin membuat Pusat Moderasi Islam di setiap Perguruaan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menulis buku. Menurut Menag dalam sambutannya pada acara *FGD tentang Peran PTKIN dalam Memperkuat Kebhinnekaan* (24/1/2017) yang lalu mengatakan bahwa, berkaitan dengan pendidikan Islam, perguruan tinggi diharapkan dapat memproduksi buku-buku (literatur) yang mengandung paham moderasi Islam untuk menangkal paham-paham radikal dengan cara-cara yang santun, beradab, akademik dan memiliki nilai-nilai intelektualitas.

Saya sepenuhnya sepakat dengan konsep di atas. Bukan semata-mata karena sesama Nahdliyin, namun Islam moderat adalah titik temu antara ekstrem Kanan dan Kiri. Dan saya kira, inilah yang bisa dijadikan solusi atas berbagai gesekan horizontal akibat perbedaan pandangan keagamaan selama ini. Dalam ajaran Ahlussunah wal Jamaah (Aswaja), salah satu sikap yang diajarkan adalah *at-tawassuth* atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak condong ke Kiri ataupun Kanan. Hal ini disarikan dari firman Allah Swt:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً

> Artinya: *Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah Swt menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian.* (**QS al-Baqarah: 143**).

Kedua, at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, terrnasuk dalam penggunaan dalil *'aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil *naqli* (bersumber dari al-Qur'an dan Hadis). Firman Allah Swt:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

> Artinya: *Sunguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*. (**QS al-Hadid: 25**).

Ketiga, *al-i'tidal* atau tegak lurus. Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

> Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*. (**QS al-Maidah: 8**).

Selain ketiga ajaran sikap di atas, masih ada yaitu, *tasamuh* atau toleransi. Dalam hal ini, kita diajarkan untuk menghormati perbedaan prinsip, akidah dan keyakinan orang lain. Toleransi—menurut Gus Dur—sejalan dengan prinsip pluralisme yang memberi landasan bagi sikap-sikap toleransi yang harus dikembangkan terhadap perbedaan-perbedaan agama dan keyakinan. Karena al-Qur'an sendiri menghargai pluralitas di kalangan manusia (Abdurrahman Wahid [ed.], 2009: 169). Tidak benar juga bila pluralisme disamakan dengan liberalisme sebab pluralisme adalah sebuah bentuk pemahaman yang mengakui dan menghargai kemajemukan pemahaman dan keyakinan tanpa harus membenarkan semuanya (Irwan Masduqi, 2011: 23).

Islam yang Ramah bukan Islam yang Marah

Membumikan moderasi Islam adalah sebuah kewajiban. Moderasi Islam dalam term yang lain adalah sebuah ikhtiar untuk merawat tradisi dan menyemai gagasan Islam yang ramah. Sebagaimana kita tahu bersama, di pengujung tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017 yang lalu, publik seperti terus disuguhi parade sumpah serapah, sesat-menyesatkan, dan demo berjilid-jilid yang katanya atas dasar penistaan Surat Al-Maidah ayat 51. Tak pelak, integritas bangsa pun goyah, fanatisme ras dan agama kembali tergoyang hanya karena syahwat kelompok dan segelintir orang saja. Wajah Islam Indonesia kembali buram di mata bangsa-bangsa global. Pertanyaannya, benarkah Islam Indonesia mewarisi watak sangar?

Secara historis, tak ada satupun referensi kuat yang mengatakan bahwa penyebaran Islam (di) Nusantara zaman dahulu adalah dengan cara-cara destruktif. Begitu pula, tak ada sumber-sumber valid yang menyebut bahwa Islam (di) Nusantara identik dengan kemarahan. Justru sebaliknya, para Walisongo menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan damai sembari merawat tradisi dan mengajarkan banyak hal.

Misalnya, Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. Raja Pandhita di Gresik merancang pola kain batik, tenun lurik dan perlengkapan kuda. Sunan Majagung mengajarkan mengolah berbagai macam jenis makanan, lauk-pauk, memperbarui alat-alat pertanian dan membuat gerabah. Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan dan tata cara

membuka hutan. Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus *pawukon*, juga merintis pembukaan jalan. Sunan Bonang mengajar ilmu suluk, membuat *gamelan* dan cara mengubah irama *gamelan*. Sedangkan Sunan Drajat mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat tandu dan joli. Yang terakhir, Sunan Kudus mengajarkan bagaimana membuat keris, peralatan pande besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan bagi orang Jawa (Agus Sunyoto, 2011: 90-91).

Singkat kata, sejarah Islam (di) Nusantara telah mengalami pergumulan dengan lokalitas yang beragam. Ia hadir bukan untuk mendobrak atau membabat habis tradisi dan budaya lokal yang ada, melainkan coba untuk berdialektika dengan konteks di mana ia berada. Oleh karena sifat fleksibelnya itu, ia mampu bertahan dan berkembang sehingga memunculkan corak keislaman baru yang khas dan tidak ada di belahan dunia manapun.

Dengan demikian, buku yang ditulis oleh dosen-dosen muda dari berbagai disiplin keilmuan ini layak diapresiasi. Tidak hanya bagi para akademisi ataupun mahasiswa melainkan juga semua lapisan masyarakat di Indonesia. Sebab gagasan moderasi Islam sesungguhnya sebuah ikhtiar merawat kebhinnekaan Indonesia tanpa harus mencabut tradisi dan kebudayaan yang ada. Moderasi Islam, adalah ruh dari Islam Nusantara yang tidak sama dengan Islam di Timur-Tengah atau di manapun tempatnya.[]

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menteri Pemuda dan Olahraga,

Imam Nahrawi

Catatan Penyunting

Islam itu *Ummatan Washatan*

Kurun waktu (menjelang) akhir tahun 2016 sampai awal tahun 2017, merupakan masa-masa yang cukup melelahkan dan menguras emosi. Bagaimana tidak, publik yang awalnya tenang menjadi gaduh tak karuan lantaran munculnya serentetan aksi yang klimaksnya pada tanggal 2 Desember 2016 atau sering disebut sebagai aksi 212. Aksi yang konon dipicu oleh pernyataan Basuki Tjahjta Purnama alias Ahok dalam menafsirkan surat al-Maidah ayat 51 tersebut menyiratkan kekhawatiran yang serius.

Terlepas bahwa pernyataan itu sengaja digoreng untuk kepentingan politik Pilkada DKI—dengan menggandeng kelompok Islam garis keras sebagai algojonya—di sisi lain juga menciderai asas demokrasi dan nilai-nilai toleransi yang sudah lama disemai. Sentimen etnisitas dan agama kembali disentil untuk kepentingan segelintir oknum. Akibatnya sebagaimana yang kita tahu, hampir saja integritas bangsa ini luluh lantah karena perang sesama saudara, sebangsa dan setanah air.

Peristiwa di atas adalah salah satu bukti bahwa seiring bertambahnya usia suatu bangsa, dengan laju demokrasi yang cukup signifikan ternyata tak menjamin kedewasaan. Di masyarakat akar rumput, polemik penistaan agama seakan-akan masih menjadi perkara yang tak bisa ditawar, terlepas itu benar adanya atau tidak. Tak pelak, sumpah serapah, kafir-mengafirkan, dan kutukan-kutukan keji lainnya meluncur deras tak hanya kepada orang yang tertuduh tapi juga pembelanya. Dunia maya—khususnya medsos—pun *geger*; melubernya informasi (*information spill over*) ternyata disusupi oleh berita *hoax* yang tercecer di mana-mana, fitnah menghujam terus-terusan tak ada hentinya, dan tak lupa orang-orang mendadak menjadi Tuhan bagi sesama. Atas nama agama, kata Romo Haryatmoko (2010), orang bisa semena-mena dalam memperlakukan orang lain. Seseorang tiba-tiba menjadi "algojo" yang begitu tega melumat sendi-sendi kemanusiaan.

Saya jadi teringat pada esai Robertus Robet—seorang sosiolog di Universitas Negeri Jakarta—bertajuk, "Anti Intelektualisme di Indonesia" (*Kompas*, 25 April 2016). Esai tersebut menyoroti maraknya berita *hoax* yang ternyata berjalin-kelindan dengan gejala anti intelektualisme, khususnya di Indonesia. Baginya, anti intelektualisme adalah gejala penolakan atau setidaknya perendahan terhadap segala upaya manusia untuk mengambil sikap reflektif, berpegang konsep, ide, atau pemikiran dan perendahan terhadap mereka yang bekerja di dalamnya. Dalam praktik, anti intelektualisme sering didasari dengan primordialisme dan sikap gampangan. Anti intelektualisme adalah gerak balik ke arah kemunduran.

Ia lalu melanjutkan bahwa zaman sekarang, orang merasa mudah untuk menjadi "intelek" karena Google dan debat para selebritas di TV. Debat, refleksi dan komunitas berpikir dianggap tidak relevan lagi. Oleh karena itu, opini, teori dan intelektual dianggap "abstrak", "sulit" dan tidak *up to date*. Pada akhirnya, opini, gosip dan desas-desus dianggap lebih bernilai ketimbang konsep. Popularisme lebih bernilai ketimbang gagasan.

Lantas bila kembali lagi ke topik awal tadi, apakah dengan munculnya aksi bela Islam misalnya, umat Islam diuntungkan? Tentu saja tidak! Di mata bangsa lain yang paham betul politik adu domba itu, wajah Islam Indonesia justru semakin buram. Indonesia yang tadinya dijadikan kiblat Islam moderat dunia pada akhirnya tercoreng namanya. Lantas apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan citranya? Salah satu di antaranya adalah dengan menegaskan kembali moderasi Islam. Moderasi Islam tentu bukan pengotak-ngotakkan Islam, bukan pula sekadar nama suatu kelompok semata melainkan—meminjam istilah Gus Mus—Islam adalah moderat itu sendiri. Jadi menurut mantan Rais Aam PBNU itu, kalau tidak moderat berarti bukan Islam. Hal ini sejalan dengan al-Qur'an (al-Baqarah: 143), yang menyebut umat Islam sebagai umat pertengahan (*ummatan washatan)*. Islam moderat berpegang teguh pada nilai *tawasuth, tawazun* dan *tasamuh*; berada di antara dua kutub ekstrem: Kanan dan Kiri.

Buku bunga rampai bertajuk, *Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi dan Kontribusi untuk NKRI* yang ditulis oleh dosen-dosen muda IAIN Tulungagung

dari berbagai disiplin ilmu ini, adalah salah satu ikhtiar menegaskan (kembali) posisi dan esensi Islam Indonesia dalam arti sesungguhnya.

Buku ini dibagi menjadi empat bab: *pertama*, membincang tentang bagaimana konsep pendidikan multikultural dalam relasinya dengan moderasi Islam, termasuk eksistensi paham radikal yang kian merebak di perguruan tinggi. Kelima esai yang *include* di bagian ini betapa pun ditulis oleh banyak kepala namun saling terkait satu sama lainnya.

Bagian *kedua*, saya pilih redaksi: benturan proyek *khilafah* dengan Pancasila. Kendati isinya tidak secara spesifik menyebut adanya benturan namun secara garis besar, empat esai yang ada di dalamnya berusaha menampilkan bagaimana utopia proyek *khilafah* itu masih saja bargaung di negeri yang dalam belantika sejarah panjangnya sudah sarat dengan keragaman itu, termasuk sampai saat ini. Menariknya, di bagian ini, juga menyiduk tema yang masih hangat seputar Perppu UU No 2 Tahun 2017, "perselingkuhan" PNS dengan ideologi anti Pancasila serta peran ulama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Ketiga, terdiri dari delapan esai yang benang merahnya adalah memotret geliat radikalisme di Indonesia baik dalam konteks dakwah kultural maupun digital. Secara kultural, gerakan radikal di Indonesia harus diakui sudah lama menggurita, termasuk di masjid-masjid desa yang awalnya merupakan basis NU. Akar ideologinya juga sudah jelas: Salafi-Wahabi. Yang lebih celaka lagi, dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, kelompok ini meresponnya sangat baik dengan

memanfaatkan *website*, *blog*, dan medsos sebagai ladang dakwah dan instrumen hegemoni. Maka, tak berlebihan bila ada yang menyebut bahwa radikalisme sudah sampai di setiap sudut kamar tidur kita dan meracuni anak-anak generasi *golden age* Indonesia.

Bagian *keempat* atau yang terakhir lebih beragam lagi: tentang dialektika Islam Nusantara, pendangkalan pemahaman agama dan juga kemandirian ekonomi kita. Isinya tentu tak hanya misalnya, menerima begitu saja (*taken for granted*) wacana Islam Nusantara namun jauh dari itu, juga menanyakan—untuk tak menyebutnya mengkritik—kembali tentang hakikat Islam Nusantara, khususnya dalam dialektikanya dengan tradisi, budaya dan radikalisme agama. Kemudian, yang tak kalah menarik, fenomena rancunya nalar pemahaman agama yang saat ini sedang tren juga tak luput jadi kajian. Tambah lengkap lagi dengan kajian mengenai kondisi kemandirian ekonomi Muslim Indonesia kekinian dalam kacamata rukun Islam, dan upaya revitalisasi zakat. Bagian ini ditutup dengan sebuah epilog *apik* tentang genealogi moderasi Islam, bahkan tanpa berlebihan, melampaui moderasi Islam.

Dengan demikian, semua tulisan di dalam buku ini tak hanya sekadar ulasan hasil comotan dari berbagai sumber melainkan juga perpaduan dari hasil renungan yang penuh *insight*. Meski ditilik dari perspektif yang beragam namun titik temu (*meeting point*) dari semuanya tidak lain adalah menegaskan kembali moderasi Islam dalam konteks kebangsaan.

Akhirnya, tak berlebihan bila kehadiran buku ini semacam berkah tak terduga (*blessing in disguise*) di tengah dangkalnya nalar beragama. Tak lupa terimakasih kepada Pak Menteri Pemuda dan Olahraga yang sudah berkenan memberi catatan pengantar. Semoga buku ini bermanfaat tak hanya bagi lembaga melainkan juga bangsa Indonesia. Salam.[]

Penyunting
Saiful Mustofa

Daftar Isi

Pengantar Menpora.....iii
Pengantar Penyunting.....ix
Daftar Isi.....xv

BAGIAN I: KONSEP MODERASI ISLAM DALAM BINGKAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Revivalisasi Nilai Moderat dalam Pendidikan Islam....1
B. *Learn to Live Together*.....6
C. Pendidikan Multikultural dan Ikhtiar Menangkal Paham Radikal.....13
D. PTKIN: Penyemai Islam Moderat.....19
E. Menangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi Islam Berbasis Nilai-Nilai Multikultural.....25

BAGIAN II: BENTURAN PROYEK *KHILAFAH* DENGAN PANCASILA

A. Sikap Eksklusif-Apologetik dalam Fundamentalisme Islam.....31
B. Upaya Penegasan Islam Kebangsaan: Kajian Perppu UU No 2 Tahun 2017.....36
C. "Jas Hijau": Upaya Meneguhkan Kembali Peran Ulama dalam Bingkai Toleransi.....43
D. PNS dan Perkara Ideologi Pancasila.....47

BAGIAN III: GERAKAN RADIKALISME AGAMA DAN DERADIKALISASI DI INDONESIA

A. Dakwah Islam Moderat di Tengah Masyarakat Urban, *Middle-Class* dan Milenial.....55
B. Radikalisme Agama Era Digital di Indonesia.....65
C. Dakwah Digital di Era Milenial.....73
D. Modernisme dalam Kepungan Paham Radikal.....79
E. Membaca Radikalisme Agama dan Problem Toleransi di Indonesia.....86
F. Ancaman Gerakan Radikalisme Agama bagi Keutuhan NKRI dan Upaya Pencegahannya.....92
G. Membaca Wajah Fundamentalisme Islam di Indonesia.....99
H. Deradikalisasi Agama: Eksperimen Pesantren Salaf-Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia.....106

BAGIAN IV: DIALEKTIKA ISLAM NUSANTARA, FENOMENA PENDANGKALAN AGAMA DAN KEMANDIRIAN EKONOMI

A. Menimbang Ulang Islam Nusantara.....115
B. Walisongo: Mengislamkan Masyarakat Jawa tanpa Menghilangkan Identitas Kebangsaan.....123
C. Islam Nusantara dan Persatuan Indonesia.....130
D. Masyarakat Profetik: Islam Nusantara.....134
E. Membangun *Ukhuwah* dalam Bingkai Islam Nusantara.....140
F. Merawat Tradisi Menyemai Toleransi.....145
G. Dogma dan Pendangkalan Pemahaman Agama....151
H. Polaritas Keberagamaan Modern di Indonesia: Titik Temu Liberalisme dan Fundamentalisme Islam.....156

I. Matematika dan Seni Bernalar yang Benar.....162
J. Integrasi Islam terhadap Sains dan Peradaban.....170
K. Kemandirian Ekonomi Muslim: Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup dalam Perspektif Rukun Islam.....176
L. Menyemai Kondisi Perekonomian Masyarakat Islam Kecil dan Menengah di Era Global.....183
M. Revitalisasi Zakat menuju Islam Moderat.....191
Epilog: Melampaui Moderasi Islam.....199
Para Penulis.....227

PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA

BAGIAN I

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN KONSEP MODERASI ISLAM

A. Revivalisasi Nilai Moderat pada Pendidikan Islam

Oleh Abd. Aziz

Indonesia—oleh Tuhan penguasa alam raya—diberi anugerah luar biasa berupa kekayaan alam dan keragaman entitas. Tak perlu ditanya lagi soal kekayaan alam yang di bumi Indonesia, mulai dari melimpahnya barang tambang, keanekaragaman hayati, tanah yang subur, serta hasil laut yang melimpah. Sedangkan keragaman yang ada di Indonesia meliputi keragaman dalam aspek keagamaan, suku bangsa, bahasa, dan juga budaya. Pada titik ini saya hendak menyitir salah satu ayat al-Qur'an, "Nikmat Tuhan mana lagi yang hendak kau dustakan?" (Q.S. Ar-Rohman: 13).

Baik kekayaan alam maupun keragaman entitas tersebut tentu saja tak ubahnya pisau bermata dua, yang bisa

berpotensi bagi kemajuan bangsa dan bisa pula berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan. Perbedaan tersebut terletak dari bagaimana cara kita memanfaatkan kekayaan alam dan menyikapi keragaman tersebut.

Terkait dengan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia, sikap pluralisme dan multikulturalisme merupakan sebuah keharusan yang tak bisa lagi ditawar. Pasalnya, sikap tersebut memberikan pengakuan kepada mereka yang meski secara jumlah tidak banyak, tetapi ada di sekitar kita. Mereka berhak memeroleh pengakuan yang sama untuk status kepemilikan etnis, agama atau lainnya. Multikultaralisme juga akan menghindarkan terjadinya dikotomi antara "kita" (kelompok dominan) dan "mereka" (kelompok minoritas) (Musa Asy'ari, *Kompas*, 2004).

Akan lebih mengerikan lagi apabila dikotomi antara kelompok mayoritas dan minoritas sebagaimana disebutkan di atas, dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari akses kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi sebagaimana yang telah terjadi pada beberapa sektor seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan-jabatan publik, dan hubungan-hubungan sosial lain. Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat para pendiri bangsa Indonesia yang termaktub dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Para *founding father* negeri ini tahu benar, bahwa tanpa kesadaran akan keragaman dan beragama tak mungkin kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia bisa terwujud.

Urgensi Multikulturalisme dan Pluralisme

Multikulturalisme akan menghindarkan masyarakat dari konflik antarelemen bangsa. Kelompok mayoritas memberikan ruang yang sama kepada kelompok minoritas dan menjalin relasi yang setara. Kelompok mayoritas tidak perlu merasa bahwa mereka lebih unggul dan kelompok minoritas tidak perlu pula merasa rendah diri. Multikulturalisme akan menjawab kebutuhan dasar kelompok-kelompok minoritas untuk mengembangkan identitas budaya dan penghargaan diri (Sarilan, 2009).

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada masalah intoleransi dan radikalisme. Dalam kurun beberapa tahun terakhir saja, telah terjadi beberapa tragedi kemanusiaan yang memilukan sekaligus mengkhawatirkan. Serangkaian kerusuhan dan konflik sosial (*riots*) berlabel agama dan rasial terjadi silih berganti di berbagai penjuru bangsa Indonesia. Perusakan tempat ibadah, penyerangan atau bahkan pembunuhan terhadap penganut kepercayaan tertentu, aksi teror dan bom bunuh diri, hingga ujaran kebencian (*hate speech*) mudah dilihat dan terjadi di sekitar kita. Padahal pluralis, diversitas, dan heteroginitas merupakan keadaan yang telah ada pada bumi Nusantara bahkan sebelum kawasan ini berbentuk negara-bangsa (*nation-state*) seperti sekarang ini (Maqbul Arib, 2014).

Sentimen etnis dan agama serta berkembangnya paham radikalisme menjadi pangkal dari berbagai permasalahan tersebut. Sedangkan toleransi dan kerukunan dalam menyikapi perbedaan yang menjadi entitas bangsa Indonesia seolah luruh seiring dengan bergantinya zaman.

Dalam hal ini, umat Islam sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia perlu mengambil tanggung jawab. Dengan kata lain, umat Islam harus berperan aktif dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan bangsa Indonesia.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam dalam menjaga ke-*Bhinneka Tunggal Ika*-an Indonesia adalah melalui pendidikan Islam. Pendidikan merupakan sarana yang tepat dalam menyemai kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keragaman yang ada di Indonesia. Ruang-ruang kelas dalam dunia pendidikan dianggap memiliki peran strategis dalam upaya menjadikan keragaman agar dapat menjadi potensi kemajuan.

Pendidikan Islam sejatinya telah memuat wacana multikulturalisme, akan tetapi dalam tataran implementasi belum terlaksana dengan baik. Diperlukan upaya untuk mendesain ulang sistem pendidikan Islam yang berbasis multikulturaslisme agar pendidikan Islam lebih optimal dalam mendiseminasi wacana multukulturalisme pada diri para peserta didik. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar pendidikan Islam mampu menjawab permasalah yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Memahami Konsep Multikulturalisme

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Dalam konteks Indonesia yang sarat dengan kemajemukan, pendidikan ini

memiliki peran yang sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif (Ngainun Naim, 2009).

Pendidikan multikultural menjadi sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat kondisi bangsa Indonesia yang tengah menghadapi serangkaian aksi teror dan radikalisme. Pendidikan multikulturalisme diharapkan mampu mengakomodasi segala bentuk dinamika keragaman dan perbedaan yang menjadi entitas bangsa Indonesia.

Iriyanto dalam catatannya di Jurnal *Humanika* (2012) mengatakan multikulturalisme secara etimologis berasal dari kata multi (banyak), kultur (budaya), isme (pandangan atau paham) sebagai kebalikan dari monokulturalisme atau paham budaya tunggal. Sejatinya makna itu mengandung arti mendalam tentang harkat dan martabat manusia yang hidup bermasyarakat serta menurut kebudayaannya. Dimana setiap anggota dari komunitas masyarakat itu mempunyai beban tanggung jawab untuk menjaga kehidupan berbudaya komunitasnya.

Multikulturalisme merupakan alat atau wadah yang secara ideologis berfungsi pula untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Di sini multikulturalisme yang berarti fungsi sehingga harus dilihat dari kehidupan manusia, bagaimana multikulturalisme ini bekerja. Perlu ditekankan lagi bahwa kebudayaan harus bisa bekerja pada segala segi kehidupan sosial manusia melalui multikultural ini. Sebagaimana sebuah ideologi, multikulturalisme ini telah diserap diberbagai struktur kehidupan masyarakat.

B. *Learn to Live Together*

Oleh Khabibur Rohman

Globalisasi dengan segala macam rupanya telah membawa banyak kemudahan dan kemanfaatan di berbagai aspek kehidupan manusia di era modern. Salah satu ciri globalisasi, yakni menjadikan dunia tanpa batas. Batasan ruang, jarak, dan waktu menjadi sangat kabur. Dunia menjadi lebih transparan dan terbuka. Dunia yang dulunya terasa sangat luas kini tak lebih dari sekadar *big village*.

Namun, bukan kemajuan namanya jika tidak memiliki sisi buram. Kampung besar yang tercipta akibat globalisasi memungkinkan terjadinya pergesekan nilai dan budaya antarmanusia dari berbagai latar belakang. Pergulatan budaya atau sistem nilai yang memiliki corak berbeda atau bahkan bertolak belakang pun tak terhindarkan. Dalam proses inilah terjadi asimilasi atau akulturasi yang menghasilkan budaya baru yang tak selalu senapas dengan budaya asli. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran akan lunturnya nilai, norma, dan budaya lokal karena tergerus derasnya unsur asing. Hancurnya rasa kemanusiaan, terkikisnya nilai religius, kaburnya nilai keadilan, serta hilangnya jati diri bangsa adalah sedikit dampak yang mungkin timbul akibat globalisasi (Baharudin dan Makin, 2007).

Indonesia Kini

Indonesia tentu saja pantas mengklaim dirinya sebagai bangsa yang besar. Bukan hanya perkara luas wilayah dan jumlah penduduknya semata, tapi juga keanekaragaman budaya serta kekayaan warisan sejarah yang sulit dicari tandingannya. Tapi Indonesia saat ini tengah *ngos-ngosan* dan kelimpungan menghadapi masalah yang seolah tak ada habisnya. Indonesia dengan segala potensi yang dimilikinya harusnya menjadi bangsa besar yang memimpin peradaban dunia, namun terus saja berkutat dengan masalah kemiskinan dan konflik horizontal sehingga bangsa ini konsisten menjadi bangsa ketiga.

Energi bangsa ini terkuras habis mengurusi masalah peredaran narkoba, tindak asusila, konflik horizontal antarelemen masyarakat, menjalarnya penyakit sosial, kesenjangan sosial yang kian hari kian menganga, korupsi yang hampir terjadi di semua sektor dan seabrek masalah lainnya. Kesopanan, keramahan, tenggang rasa, rendah hati, solidaritas sosial seolah telah luntur begitu saja (Maskuri Bakri, 2009). Dari sekian masalah tersebut di atas, kiranya persoalan radikalisme dan intoleransilah yang saat ini benar-benar tengah menyakiti Bangsa Indonesia.

Muncul beberapa kelompok yang berpandangan "kolot" dan cenderung memaksakan pendapatnya untuk diterima oleh kelompok lain. Kemunculan kelompok-kelompok tersebut merupakan ancaman serius bagi bangsa multikultural seperti Indonesia. Toleransi antarumat beragama, hidup berdampingan dengan unsur yang berbeda, serta menjalin harmoni dalam keberagaman yang selama ini menjadi ciri khas bangsa ini tak lagi kentara. *Saking*

berbahanya kelompok radikal dan intoleran tersebut, beberapa negara bahkan menjuluki mereka sebagai teroris domestik (*Kompas*, 27 April 2017).

Imbas dari kemunculan kelompok radikal dan intoleran tersebut adalah kekerasan antargolongan, pertikaian antarsuku, perselisihan antarumat beragama yang semakin kerap terjadi. Masih hangat di ingatan kita betapa riuhnya Indonesia dengan gelombang demontrasi bertajuk bela agama hingga beberapa jilid, juga perusakan tempat ibadah atau pelarangan kelompok agama atau aliran tertentu menjalankan ritus ibadahnya. Penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah juga semakin lazim terjadi. Rasa kemanusiaan siapa yang tidak tersayat melihat seseorang yang tewas dibakar amuk massa karena diduga mencuri amplifier di salah satu Masjid Bekasi. Belum lagi dengan ujaran kebencian dan berita *hoax* yang terus bertebaran di berbagai media sosial.

Salah arah Pendidikan Indonesia

"*Education is the most powerfull weapon to change the world*" begitu kata Mahatma Gandhi (Gandhi dalam Wardatul Auliya, dkk, 2017). Pendidikan sampai hari ini masih diyakini sebagai sarana yang paling strategis dalam melestarikan dan menginternalisasikan sebuah sistem nilai kepada generasi penerus. Pendidikan harusnya tidak sekadar memberikan wawasan dan pemahaman kepada peserta didik, tapi lebih dari itu pendidikan juga bertanggung jawab pada pembentukan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik.

Pendidikan dan kondisi sosial masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan, saling memengaruhi satu sama lain. Hal ini berarti juga bahwa segala yang terjadi pada masyarakat adalah salah satunya disebabkan konstruksi pendidikan. Kala terjadi tawuran antarpelajar dan tindak anarkisme dalam dunia pendidikan, saat itulah pendidikan pekerti perlu dapat sorotan. Saat tindak asusila dan kejahatan seksual pada anak meningkat, saat itulah pendidikan seks perlu dipertimbangkan. Ketika muncul berbagai kelompok radikalisme agama, kiranya pendidikan agama yang diajarkan perlu ditinjau ulang. Adakah yang salah dengan pendidikan kita saat ini? (Masykuri Bakri, 2009).

Kenyataan menunjukan bahwa pendidikan yang seharusnya menumbuhkembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik, justru dalam tataran implementasi lebih banyak mematikan nalar kritis dan kreativitas peserta didik. Pendidikan yang dalam tataran ideal didefinisikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik, dalam implementasinya beralih menjadi sekadar pengajaran, yang berfokus pada potensi kognitif semata dan mengabaikan moralitas atau budi pekerti. Teruntuk itu, perubahan atas pelaksanaan pendidikan di Indonesia mutlak diperlukan, agar pendidikan Indonesia mampu menghasilkan *out put* kualitas sumber daya manusia yang unggul, bertakwa dan berakhlak mulia. Mereka yang tidak hanya cakap secara kognitif, tapi juga memiliki kepekaan sosial dan tangguh menjawab segala tantangan zaman (Supardi U.S., 2012).

Belajar Hidup Berdampingan

Menariknya, pendidikan sendiri menurut UNESCO setidaknya harus ditopang oleh empat (4) pilar. Keempat pilar tersebut adalah: *learning to know, learning to do, learning to be,* dan *learning to live together* (Dellors, dkk., 1996). Pendidikan tidak hanya sebuah upaya menjadikan seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, dai yang sebelumnya bukan apa-apa menjadi bermakna, lebih dari itu pendidikan harusnya juga menjadikan seseorang bisa hidup secara harmonis dengan manusia lainnya.

Jamak kita temui seseorang yang berwawasan luas, cakap melakukan banyak hal, tapi selalu bermasalah ketika harus berhubungan dengan orang lain. Juga tak sulit menemui orang-orang yang dianugerahi keluasan pengetahuan tapi tak memiliki kepedulian dan toleransi terhadap sesama.

Begitupun dengan kelompok radikal dan intoleran, mereka bukan berasal dari golongan yang tidak berpendidikan, sebagaian besar dari mereka bahkan orang-orang berpendidikan tinggi. Namun keluasan pengetahuan yang mereka miliki tak berbanding lurus dengan tingginya toleransi dan kepedulian terhadap sesama. Ini jelas memberi pertanda bahwa pilar pendidikan, *learn to live together,* belum terwujud.

Bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang akan terus berinteraksi dengan manusia lainnya. Teruntuk itu belajar agar bisa hidup bersama secara harmonis dengan orang lain adalah sebuah keharusan yang tak lagi bisa ditawar (Dhita Puthi Sarasvati dan Sumardianta, 2016).

Memaksakan pandangan dan kehendak terhadap orang lain terlebih menggunakan jalan kekerasan tentu saja tak akan pernah bisa dibenarkan.

Pendidikan Islam Menyemai Toleransi

Islam adalah agama dengan misi utama *rahmatan lil-alamin*, yakni agama yang menyebarkan kesejukan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan, tidak hanya kepada pemeluknya semata, tapi juga kepada umat lain, tak terkecuali seluruh makhluk dan alam semesta. Islam mengajarkan setidaknya empat hal pokok: (1) Islam mengajarkan adanya kesatuan penciptaan, yaitu Allah Swt; (2), Islam mengajarkan kesatuan kemanusiaan; (3) Islam mengajarkan kesatuan petunjuk, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW; (4), sebagai konsekuensi logis dari ketiga pokok tersebut, maka bagi umat manusia hanya ada satu tujuan dan makna hidup, yaitu kebahagian, baik di dunia maupun setelahnya.

Aneh jika kemudian Islam identik dengan terorisme, tindak kekerasan dan kebencian. Hal ini tentu saja didasarkan pada semakin maraknya tindak kekerasan dan intoleransi yang mengatasnamakan agama. Dari sini bisa disimpulkan bahwa yang yang mengajarkan kebencian dan penggunaan kekerasan bukanlah Islam, melainkan "pemahaman" seseorang atas Islam. Pemahaman atas Islam yang marah atau tak ramah inilah yang perlu direkonstruksi.

Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam upaya diseminasi nilai kesejukan, kedamaian, keselamatan, toleransi, dan kesejahteraan. Internalisasi nilai-nilai Islam (yang ramah dan moderat) kepada generasi penerus lewat

ruang-ruang kelas sangat dinantikan kontribusinya, di tengah upaya penyebaran nilai-nilai radikalisme dan intoleransi yang juga massif dan sistematis.

C. Pendidikan Multikultural dan Ikhtiar Menangkal Paham Radikal

Oleh Elva Yohana

Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya pendidikan diklaim mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Hal demikian disebabkan adanya kesepakatan pembangunan baru yang mendorong pada perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sehingga dalam kesepakatan masyarakat dunia demi pembangunan berkelanjutan, yang selanjutnya disebut dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*), pendidikan mendapatkan prioritas keempat setelah pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan kesejahteraan. Kelahiran SDGs merupakan kelanjutan upaya dan pencapaian dari *Mellinneum Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs, atau dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"no-one left behind"*. Berdasarkan pembangunan berkelanjutan tersebut,

yang pendidikan merupakan salah satu tujuannya maka bagaimana pembangunan dalam aspek pendidikan bisa diimplementasikan dalam kultur dan struktur masyarakat Indonesia menjadi hal menarik untuk dipikirkan.

Pendidikan Multikultural

Kemajemukan atau keragaman masyarakat, khususnya Indonesia, adalah realitas yang harus diakui. Berbagai macam ras, suku, adat-istiadat, agama dan kepercayaan, latar belakang budaya, sekaligus struktur masyarakatnya yang majemuk menjadikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika semakin terlegitimasi. Sehingga tidak mengherankan jika Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penanda bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Kenyataan ini merupakan hakikat bangsa Indonesia yang harus diakui dan diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah menjadi bukti bahwa dalam penyelenggaraan proses pendidikan turut memperhatikan aspek multikultural masyarakat Indonesia. Tepatnya dalam pasal 4 ayat 1 terkait prinsip penyelenggaraan pendidikan, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selain itu, ditegaskan pula dalam pasal 12 ayat 1, terkait hak peserta didik yang salah satunya, yakni mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Hal tersebut berarti bahwa tiap sekolah atau

lembaga pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan agama sesuai dengan masing-masing agama peserta didik tanpa kecuali, bahkan termasuk peserta didik yang beragama minoritas sekalipun.

Sikap Multikultural

Sebagai konsekuensi sosial dari masyarakat multikutural maka haruslah ditumbuh kembangkan beberapa sikap kritis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sikap-sikap tersebut di antaranya adalah:

Pertama, mengembangkan sikap simpati dan empati. Adanya sikap simpati akan sangat berperan dalam membuka jalan terhadap proses interaksi lintas budaya, etnik, agama, hingga lintas generasi. Selanjutnya, adanya keterlibatan emosional dan aksi akan tumbuh dalam sikap empati. Dengannya, manusia akan tergerak untuk membantu manusia lain.

Kedua, mengembangkan sikap toleran dan saling pengertian. Pemaknaan istilah toleransi lebih menitikberatkan pada bentuk tindakan atau praktik kebudayaan (kepercayaan, pendapat, pendirian, pandangan, bahkan kebiasaan) yang berbeda dari setiap kelompok sosial.

Ketiga, meninggalkan sikap primordialisme dan etnosentris. Sikap primordialisme yang wajar akan memperkuat posisi dalam masyarakat. Akan tetapi seringkali yang muncul adalah disintegrasi dikarenakan sikap primordialisme yang berlebih. Oleh karenanya sebisa mungkin prasangka buruk terhadap suku bangsa, ras, agama harus dihindari karena akan menimbulkan perpecahan

dalam masyarakat multikultural.

Keempat, mengembangkan semangat nasionlisme. Kecenderungan mengesampingkan segenap perbedaan dalam hal latar budaya, perdebatan, dan struktur masyarakatnya akan membawa bangsa Indonesia untuk lebih mencintai tanah air dan bangsanya yang majemuk. Berawal dari sinilah semangat nasionalisme akan terbentuk dan semakin terpupuk sehingga persatuan dan kesatuan dapat terjalin.

Kelima, mengembangkan kesadaran peranan. Setiap warga negara memiliki peran, kedudukan dan status yang berbeda-beda sesuai dengan kadratnya. Dan setiap peranan yang ada akan sangat mendukung jalannya kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan kesadaran akan peranan yang dimiliki setiap warga negara, tidak akan terjadi saling memusuhi, bertikai, prasangka, sikap emosional dan bahkan perebutan peranan karena semua warga telah menyadari peran yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dimensi dan Implementasi Pendidikan Multikultural

Sebagai proses penanaman sikap terhadap cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya di tengah masyarakat plural maka pendidikan multikultural memiliki dimensi pendidikan yang diharapkan dapat membantu pendidik dalam mengimplementasikan program kegiatan yang mampu memberikan umpan balik terhadap peserta didik. Sehingga menurut Banks (2002: 14) dimensi pendidikan tersebut adalah:

Pertama, content Integration (dimensi integrasi materi). Implementasi dari pendidikan multikultural

bukanlah pemberian mata pelajaran baru di sekolah mengenai ragam budaya, akan tetapi bagaimana pendidikan multikultural bisa terintegrasikan dalam seluruh konten dari ragam budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep, prinsip, serta teori utama ke dalam bidang pengajaran atau diiplin ilmu di sekolah.

Kedua, knowledge construction (dimensi konstruksi pengetahuan). Berkaitan proses penyusunan pengetahuan, yaitu bagaimana pendidik membantu peserta didik memahami asumsi budaya, kerangka budaya, perspektif, dan prasangka yang tersirat dalam disiplin ilmu yang diajarkan.

Ketiga, *prejudice reduction* (dimensi pengurangan prasangka). Dimensi ini lebih memfokuskan pada karakteristik dari sikap rasial siswa. Dibutuhkan peran dari guru sebagai pendidik, bagaimana merubah sikap rasial tersebut dengan metode dan materi pengajaran. Sehingga siswa bisa menerapkan *prejudice reduction* tersebut.

Keempat, *equitable pedagogy* (dimensi kesetaraan dalam pendidikan). Pedagogi kesetaraan ini ada ketika guru mengubah pengajaran mereka ke cara yang akan memfasilitasi prestasi akademis siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dengan banyaknya gaya belajar di dalam berbagai kelompok budaya dan ras.

Kelima, *empowering school culture and social structure* (dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial). Sekolah harus menciptakan budaya sekolah yang memberdayakan siswa dalam ragam kelompok, ras,

etnis, dan budaya. Seperti pemerataan partisipasi olah raga yang diikuti siswa, prestasi yang proporsional, dan interaksi staf dengan siswa antaretnis dan ras adalah beberapa dari komponen budaya sekolah yang penting untuk diperhatikan.

Dengan demikian bila ditarik benang merah, pendidikan multikultural di sekolah harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya penyikapan yang adil di antara siswa-siswa yang berbeda agama, ras, etnik dan budayanya, tapi juga harus didukung dengan kurikulum baik kurikulum tertulis maupun terselubung, evaluasi yang integratif dan guru yang memiliki pemahaman, sikap dan tindakan yang produktif dalam memberikan layanan pendidikan multikultural pada para siswanya.

Selain itu, agar dapat memberikan layanan terbaik bagi seluruh *school client*-nya, maka sekolah harus merancang, merencanakan dan mengontrol seluruh elemen sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan multikultural dengan baik. Sekolah diharapkan mampu merencanakan proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap multikultural siswa agar dapat menjadi angota masyarakat yang demokratis, menghargai HAM dan berkeadilan. Sekolahpun juga harus mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultural sehingga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultural para siswanya.

D. PTKIN: Penyemai Islam Moderat

Oleh Annas Ribab Sibilana

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan strata tertinggi dalam fase (*marhalah*) pendidikan saat ini. Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi untuk melahirkan calon penerus bangsa, di antara sekian banyak perguruan tinggi terdepat dua klasifikasi kelembagaan yang dominan yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah Kemenristek Dikti dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Kementerian Agama, kedua lembaga tersebut mempunyai ciri-ciri khas yang membedakan pada masing-masing perguruan tinggi. Umumnya PTN lebih dan sangat diminati oleh masyarakat khususnya bagi caln penerus bangsa dengan alasan bahwa PTN lebih menjanjikan dalam karir serta varian jurusan yang ditawarkan lebih banyak, bahkan dalam hal keuangan PTN dirasa lebih terjangkau dari pada PTS. Sedangkan PTKIN dipandang sebelah mata karena perguruan tinggi tersebut lebih bercorak keagamaan dan islami dan selama ini hanya dipandang melahirkan lulus yang menjadi guru agama, *modin* dan *naib.*

Stigma masyarakat antara PTN dengan PTKIN sangat jauh berbeda, dengan dalih bahwa PTN lebuh menjanjikan dan banyak menawarkan jurusan yang lebih banyak, sedangkan PTKIN hanya kampus yang berbau

agama saja, tidak memiliki keunggulan lainnya. Maka pandangan tersebut adalah pandangan/perspektif lama yang berakar di masyarakat Indonesia. Pada dasarnya setiap perguruan tinggi sama saja, hanya cara pandangnya yang berbeda. Kini PTKIN mulai dilirik dan di perhitungkan oleh masyarakat dengan terobosan alih status dari yang mulanya STAIN menjadi IAIN dan yang IAIN menjadi UIN, dengan proses alih status mulailah dibukanya beberapa jurusan non keagamaan (sains). PTKIN yang dulu dikenal dengan perguruan tinggi agama saja, sekarang sudah mampu bersaing dan bersanding dengan PTN dalam hal keilmuan maupun *ouput-outcome*-nya.

Kelebihan lain dari PTKIN bahwa konten keIslaman menjadi ajaran pokok dan pedoman dalam keseharian mahasiswa-mahasiswi, di dalamnya diajarkan dasar-daar agama pada seluruh jurusan dan pada setiap jenjang/ semester. Ini merupakan ciri khas yang utama dari PTKIN, masyarakat menilai PTKIN memiliki 2 poin yang sangat menguntungkan bagi calon mahasiswa, yakni pedoman hidup (agama) dan ilmu non agama. Maka paradigma di atas memberikan pengaruh dan peminatan yang besar kepada masyarakat atas PTKIN dari PTN.

Agama merupakan pedoman hidup setaip manusia untuk memeroleh ketenangan jiwa. Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*. Di Indonesia terdapat banyak aliran-aliran yang berkembang baik yang moderat, fundamental bahkan radikal, tentu hal ini memberi pengaruh sangat besar terhadap lingkungan perguruan tinggi.

Pengaruh positif ataupun negatif yang dibawa oleh masing-masing aliran dan dikenalkan kepada mahasiswa,

tergantung seberapa kuat ideologi dan keyakinan awal yang dimiliki masing-masing individu. Beredar banyak kasus dan masalah yang timbul karena beda ideologi dan cara pandang terhadap Islam. Perbedaan kecil yang membuat munculnya konflik sesama pemeluk agama Islam sering terjadi di perguruan tinggi PTN.

Diskusi ilmiah keagamaan, kegiatan keagamaan sering ditemukan di setiap sudut gedung PTN, kegiatan yang bervariasi agama ini didominasi dengan berbagai aliran Islam, bukan hanya satu saja. Tak jarang jika dalam satu hari banyak *majelis* bertema agama diagendakan. Antara golongan aliran satu dengan yang lainnya tidak terlihat adanya kerukunan ataupun saling menghargai satu sama lain. Yang tampak banyak sekali perbedaan dan percekcokan yang menyebabkan kekerasan, saling menuduh dan kekhawatiran padahal mereka memeluk agama yang sama: Islam. Bukankah seharusnya mereka bisa saling menguatkan satu sama lain?

Aliran dengan ciri keras dan suit menerima pendapat orang lain dan condong terhadap ideologi Timur Tengah sangat sulit untuk bertoleransi terhadap lainnya. Mereka saling berlomba-lomba mensyiarkan ideologi masing-masing aliran kepada mahasiswa-mahasiswi serta mengajaknya untuk bergabung dalam kelompoknya. Kegiatan ini sering terlihat di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hanya saja jumlah aliran yang masuk dan berkembang lebih banyak terdapat di PTN.

PTN menjadi lahan subur bagi berkembangnya berbagai aliran-aliran Islam fundamental. Mayoritas mahasiswa mengikuti 1 dari golongan aliran-aliran. Mereka

yang tidak mempunyai landasan agama yang kuat mudah terpengaruh dan terhasut dengan ajaran yang mereka doktrinkan dan akan mudah untuk menjadi bagian dari golongan tersebut. Maraknya golongan yang terbungkus rapi bertema belajar agama, pada dasarnya merupakan pengaruh ideologi dan sosio-politik untuk saling menguasai dan menjatuhkan antargolongan. Setidaknya ada tiga fenomena yang bisa kita identifikasi perkembangan Islam fundamental di PTN.

Pertama adalah perubahan gaya hidup. Hal yang paling mudah kita lihat adalah gaya berpakaian mahasiswa. *Kedua,* penguasaan lembaga dakwah kampus dan masjid. *Ketiga,* dengan penguasaan lembaga dakwah kampus dan masjid kampus pasti akan berimplikasi pada kegiatan keagamaan, mereka sering melakukan kajian-kajian keagamaan.

Berbeda halnya dengan PTKIN yang selama ini membentengi dari berbagai pengaruh paham Islam fundamental. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya "Piagam Sunan Ampel" yang diprakarsai oleh perguruan tinggi eks cabang IAIN Sunan Ampel. Dalam piagam tersebut salah satu isinya ialah komitmen dalam membendung kredo-kredo anti-NKRI dan anti-Pancasila. Dengan dibukanya berbagai jurusan non keagamaan di kampus PTKIN merupakan tantangan bagi kampus untuk membentengi mahasiswanya dari paham-paham Islam fundamental karena mahasiswa bukan lagi hanya dari lulusan pesantren saja, melainkan juga dari SMA dan SMK yang secara pemahaman Islam masih minim.

Perkembangan paham Islam fundamental di Indonesia lambat laun mulai mengancam kedaulatan NKRI, setidaknya sudah ada tiga kontribusi PTKIN untuk membendung berkembangya paham tersebut. *Pertama,* penerapan tradisi pesantren di PTKIN. Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia yang dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menyebarkan Islam moderat, penerapan tradisi pesantren pada perguruan tinggi tentu bukan suatu kemunduran sistem pendidikan yang serba modern ini. Hal ini dibuktikan lahir beberapa tokoh baik lokal maupun nasional, yang tidak hanya ahli dalam bidang agama. Saat ini PTKIN berlomba-lomba mempesantrenkan sistem pendidikannya, di antaranya pendirian pesantren, pengajaran *madrasah diniyah* sebagai matrikulasi keagamaan dan pembudayaan pesantren lainnya, seperti *khotmil Qur'an, istigosah*, *tahlil* dan *diba'*.

Kedua, SDM dalam hal ini tenaga pendidik (dosen). PTKIN sangat selektif dalam merekrut dosen, tidak hanya mampu di bidang intelektualnya namun juga mampu dalam bidang kerohanian atau agama yang moderat sehingga diperoleh tenaga pendidik yang profesional di bidangnya juga mampu menjadi teladan bagi mahasiswa/i di bidang akhlak dan spiritualnya. Dosen/tenaga pendidiklah yang berinteraksi langsung sehingga apa pun tindakan, materi yang disampaikan serta cara berpikirnya akan berpengaruh sangat besar terhadap mahasiswa.

Ketiga, organisasi mahasiswa. Keberadaan organisasi mahasiswa pada suatu kampus menjadi suatu cerminan kampus tersebut karena organisasi mahasiswa pasti mendominasi setiap kegiatan dan perkembangan di

perguruan tinggi, menggerakkan massa, membawa nama baik perguruan tinggi serta menjadi wadah aspirasi dan bakat minat mahasiswa. Pada PTKIN organisasi mahasiswa terbesar adalah organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan ormas yang moderat, di Indonesia Ormas yang dikenal paling moderat ialah NU dan Muhammadiyah, salah satu organisasi mahasiswa yang berkembang di PTKIN ialah PMII.

E. Menangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi Islam Berbasis Nilai-Nilai Multikultural

Oleh M. Rois Abin

Keragaman telah menjadi bagian sejarah dan realitas kehidupan kemanusiaan sehingga merupakan fenomena alamiah yang eksistensinya tidak dapat dipungkiri. Namun pada realitas sehari-hari acapkali keragaman dijadikan kambing hitam untuk melegalkan sikap destruktif. Taruhlah adanya konflik horizontal berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

M. Ainul Yaqin (2007), menyebut bahwa kasus-kasus kerusuhan dan peperangan di berbagai belahan dunia menunjukan betapa agama telah dijadikan alat penghancuran manusia, yang sangat bertentangan dengan ajaran semua agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama berabad-abad, sejarah interaksi antarumat beragama lebih banyak diwarnai oleh kecurigaan dan permusuhan dengan dalil dapat mencapai ridha Tuhan dan demi menyebarkan kabar gembira yang bersumber dari yang Maha Kuasa. Padahal dalam pandangan Alwi Shihab (1997) sejatinya setiap agama mengajarkan perdamaian, kebersamaan sekaligus menebar misi kemaslahatan.

Pluralitas serta multikulturalitas menjadi identitas bangsa Indonesia. Akan tetapi, bila tidak ditopang dengan fondasi cinta tanah air dan akidah yang kuat maka dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari beranekaragam budaya, etnis, suku dan agama, penerapan pembelajaran multikultural sangat penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Pembelajaran multikultural pada perguruan tinggi dapat menanamkan sekaligus mengubah pemikiran mahasiswa untuk benar-benar tulus menghargai keberagaman etnis, agama, ras, dan antargolongan.

Perguruan tinggi merupakan tempat bernaungnya mahasiswa dalam menimba ilmu. Mereka memiliki beberapa aspek kelebihan, di antaranya kekuatan intelektual, ketajaman analisa, kekuatan fisik, kekuatan emosional yang cenderung meledak-ledak, inovatif, suka tantangan dan rasa ingin tahu yang berlebih. Namun dari berbagai kelebihan itulah yang dijadikan medan strategis bagi golongan radikalis untuk menelorkan pahamnya.

Saifudin dalam catatannya di Jurnal *Analisis*, Vol. XI, No. 1 (2011), menyebutkan bahwa radikalisme berkembang pesat di kampus-kampus. Hasil penelitian tahun 2011 yang dilakukan pada lima universitas ternama di Indonesia, yaitu UGM, UI, IPB, UNAIR dan UNDIP, menunjukkan ada peningkatan pemahaman fundamentalisme keagamaan di kalangan mahasiswa di kampus-kampus umum. Proses radikalisasi juga menjangkau perguruan tinggi Islam. Salah satu buktinya adalah tertangkapnya lima dari tujuh belas anggota jaringan Pepi Fernando berpendidikan sarjana, yang tiga di antaranya merupakan lulusan Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dari data di atas menunjukkan bahwa penyebaran radikalisme berkembang pesat dan tidak memandang perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam, tentu menjadi *warning* pada setiap pimpinan perguruan tinggi maka hal ini perlu adanya kebijakan pencegahan paham radikalis di perguruan tinggi. Memang seakan sangat sulit untuk membendung maupun menangkal perkembangan radikalisme/fundamentalisme di era modern saat ini, hampir semua lini vital kebutuhan manusia (mahasiswa) saat ini baik dunia maya maupun nyata menjadi lahan basah *syiar* bagi golongan radikalisme. Diskusi *small group* di pojok-pojok kampus, perkumpulan di tempat peribadatan (masjid) kampus, organisasi baik intra maupun ekstra kampus berubah menjadi ajang doktrinasi golongan radikalisme/fundamentalisme. Hal ini salah disebabkan lantaran jauhnya mahasiswa dari perpustakaaan dan referensi buku yang memadai. Celakanya, mereka lebih percaya terhadap internet yang akurasi sumbernya belum tentu benar. Dari beberapa permasalahan vital tersebut tentunya harus direspon betul oleh para pimpinan perguruan tinggi. Seluruh komponen di dalam kelembagaan kampus harus bahu-membahu, menyatukan visi dalam menangkal perkembangan radikalisme di perguruan tinggi.

Dosen merupakan bagian dari komponen kampus yang hubungannya sangat dekat dengan mahasiswa. Dalam aktivitas perkuliahan dosen dituntut mampu memberikan arahan tentang nilai-nilai moderasi dan cinta tanah air kepada mahasiswa. Oleh karena itu, kesiapan SDM dosen didapat dari bentuk pelatihan baik yang diadakan kampus

maupun pelatihan-pelatihan pada organisasi keagamaan yang berhaluan moderat.

IAIN Tulungagung sebagai kampus dakwah dan peradaban telah mengawali penyiapan SDM dosen khususnya para dosen muda. Di awal tahun 2017 IAIN Tulungagung menggandeng salah satu organisasi keagamaan yang berhaluan moderat yaitu GP. ANSOR untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Lanjut (PKL) khusus dosen muda tingkat nasional, sekaligus pendeklarasian anti radikalisme oleh dosen muda. Adapun tindak lanjut dari pelatihan tersebut dosen dituntut mampu membidani terlahirnya kajian-kajian moderasi pada perguruan tinggi di tempat masing-masing.

Rektor merupakan pucuk kepemimpinan yang bertanggung jawab mengatur serta memajukan suatu perguruan tinggi. Peranan rektor sangat besar dalam upaya penangkalan radikalisme di perguruan tinggi, yang mana rektor merupakan tokoh sentral dalam pengambilan kebijakan kampus. Lebih dari itu, IAIN Tulungagung juga diamanahi sebagai tuan rumah atas dibentuknya piagam Sunan Ampel diawal tahun 2017 yang lalu. Acara itu diikuti oleh beberapa rektor perguruan tinggi persemakmuran IAIN Sunan Ampel (eks cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya). Pada intinya mereka menggagas kerja sama dalam menghantarkan PTKIN yang unggul dan berkontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Termasuk melahirkan sebuah komitmen bersama dalam menyikapi penyusupan paham radikalisme di PTKIN.

Berangkat dari paparan di atas maka menurut penulis ada beberapa nilai-nilai multikultural yang dianggap esensial

untuk dikembangkan di perguruan tinggi: *pertama,* cinta perdamaian, yakni anjuran untuk membangun kehidupan yang damai dan rukun antarumat beragama. Hal ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an, seperti surat Al Anfal ayat 61: *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condongkanlah kepadannya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*.

Kedua, cinta kearifan. Kearifan merupakan seperangkat sifat-sifat manusia yang meliputi aspek kognitif dan afektif, dan kekuatan-kekuatan karakter serta perilaku seseorang untuk mencapai pemahaman terhadap individu, orang lain, lingkungan, dan kemampuan berinteraksi interpersonal secara tepat. Menurut Mouchtar Buchori dalam (Sindhunata [ed.]: 2005), kearifan hanya dapat dicapai dengan cara berpikir secara reflektif. Kegagalan berpikir secara reflektif akan menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak arif, tindakan yang ceroboh. Salah satu tindakan yang dilakukan tanpa didahului oleh pertimbangan yang cukup rasional.

Ketiga, sikap hidup inklusif. Dalam masyarakat majemuk yang menghimpun penganut beberapa agama, teologi eksklusif tidak dapat dijadikan landasan untuk hidup berdampingan secra damai dan rukun. Indonesia dengan mayoritas penduduknya penganut Islam harus mampu memberi contoh pada umat agama lain bahwa hanya teologi inklusif yang cocok dikembangkan di bumi Indonesia. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah mengajarkan sikap inklusif dalam beragama, yakni melarang adanya paksaan terhadap

keberagamaan seseorang. Seseorang bebas memilih agama ini atau agama itu. Sebagaimana firman-Nya: *Dan jika seandaniya Tuhanmu menghendaki maka pastilah beriman semua orang di muka bumi tanpa kecuali. Apakah engkau Muhammad akan memaksa umat manusia sehingga mereka semua beriman*.(QS: Yunus: 10: 99).

Keempat, menghargai pluralitas. Bagi H.A.R. Tilaar (2004), keanekaragaman agama yang hidup di Indonesia, dan keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama itu sendiri adalah kenyataan historis yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun. Apabila dikelola dengan baik, pluralitas akan menjadi kekuatan positif, sebaliknya jika tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi destruktif. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sebagai kebaikan negatif, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.

Pendidikan multikultural—masih menurut Tilaar—benar-benar harus mampu mewujudkan manusia cerdas. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mengembangkan pribadi-pribadi manusia Indonesia agar menjadi manusia-manusia yang cerdas. Manusia cerdas adalah manusia yang menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan mutu kehidupan, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok, dan sebagai anggota masyarakat bangsanya.

BAGIAN II
BENTURAN PROYEK *KHILAFAH* DENGAN PANCASILA

A. Sikap Eksklusif-Apologetik dalam Fundamentalisme Islam

Oleh Arifah Millati A

Realita kehadiran Islam di dunia ini terekspos dalam berbagai macam bentuk, John L. Esposito dalam *Political Islam, Revolution, Radicalism or Reform* merinci dengan baik ragam-ragamnya, mulai Islam yang tergabung dalam kelompok dan organisasi, Islam yang menjadi identitas negara, bahkan *Islamic movements* yang aktif dalam kegiatan sosial-politik. Memperhatikan konflik yang sedang menghujani daerah Timur Tengah, bagian terakhir dari ketiga poin tersebut terlihat paling memiliki *power* dibandingkan dua poin yang lain. Mengenai jawaban atas pertanyaan ini, Esposito menjelaskan kiprah gerakan-gerakan Islam tersebut telah mengakar dan menjadi ancaman yang mengerikan di Timur bahkan Barat. Mereka

reaksioner terhadap modernitas yang lazim dialamatkan kepada Barat, bahkan oleh mereka, norma dalam kehidupan seringkali dibentuk dari pemahaman terburu-buru. Namun, dalih kebutuhan praktis menjadi legitimasi para umat beragama kemudian mengkodifikasi, menjadikannya sebagai pedoman hidup, menyebarluaskan dan di beberapa waktu kemudian melahirkan *Reform Movemen*t, yaitu pembaru yang mempertanyakan ulang relevansi norma-norma yang selama ini berlaku dan dianggap baku oleh masyarakat.

Legitimasi sepihak yang diluncurkan oleh beberapa gerakan Islam, salah satu penyebabnya ditengarai oleh sikap eksklusivisme yang dangkal, serta pemahaman tekstualis terhadap sumber hukum agama yang finalnya mengindikasi kemunculan fundamentasi Islam dan sulit diselamatkan. Ambil saja sebagai contoh, istilah-istilah dalam kitab suci maupun hadis nabi yang dipahami secara sepihak (apologetik) oleh elite politik, sosial, bahkan pemangku agama yang berkepentingan. Lafaz *khalifah* yang lazim diartikan dengan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri, alam, dan *social attitude* terhadap masyarakat lain, dipopulerkan dengan makna sistem pemerintahan Islam atau *khilafah*. Padahal, dalam kehidupan sosial keagamaan, sikap ekslusif apologetik terhadap kitab suci akan menghilangkan ruh sosial, mendekatkan sikap fundamentalis beragama, yang dalam istilah Amin Abdullah disebut dengan menenggelamkan perdamaian dalam pelukan hegemoni kekuasaan tafsir terhadap kelompok, partai, agama, suku, ras, dan organisasi keagamaan.

Hizbut Tahrir (HT)—di Indonesia bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)—adalah salah satu gerakan politik yang mengatasnamakan agama, dengan sangat sederhana menggunakan pendekatan skriptual untuk mengusung konsep pemikiran Islam melalui penegakan *khilafah*. Dalam paparan Farid Wadjdi (aktivis HTI) yang mengutip Presiden Amerika George W. Bush, partai tersebut memiliki cita-cita untuk menguasai negara, dengan menggerakkan umat Islam dan sanggup menggulingkan pemerintahan moderat di Timur Tengah serta menegakkan kembali imperium Islam radikal yang akan menyebar dari Spanyol sampai Indonesia. Artinya, secara intrinsik gerakan ini menjadikan agama sebagai alasan dan kambing hitam untuk melestarikan radikalisme. Dengan kata lain, keberagamaan—dalam bahasa Karen Amstrong—dialamatkan kepada politik kekuasaan (*highly political spirituality*).

Eksistensi HTI di Indonesia termasuk dalam melancarkan proyek *khilafah* harus diakui, pertanyaan menggelitik dan sulit dijelaskan atas masalah ini adalah, mengapa Indonesia menjadi tempat tumbuh berkembangnya kelompok ini? Padahal negara Islam dan negara-negara Eropa seperti Suriah, Arab Saudi, Yaman, Irak, Iran, Belanda, Prancis, Inggris dan Jerman, justru telah membabat habis paham radikalisme tersebut. Jerman misalnya, dari masa ke masa, mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam pluralisme agama. Dalam hal ini, Kota Hamburg adalah wilayah pertama yang menandatangani kesepakatan dengan komunitas Muslim Jerman dengan hasil bahwa hari besar Islam diakui dan model pendidikan agama Islam mulai dikembangkan di sana.

Tidak hanya Hamburg, beberapa kota lain seperti Hesse, Lower Saxony dan Bremen juga melakukan hal serupa sehingga mampu menjadi tonggak perubahan dalam menumbuhkan perkembangan Islam. Mayoritas Muslim yang tinggal di sana adalah para pengungsi dari negara-negara konflik seperti Suriah, Irak, Afghanistan, dan sejumlah Negara Afrika Utara lainnya. Kenyataan ini sebenarnya memberikan pesan moral bahwa perdamaian sebuah negara tidak dipengaruhi oleh sistem yang memaksa karena untuk mewujudkan sebuah perdamaian, kewajiban pemerintah adalah menyebarkan nilai-nilai toleransi dan kesantunan antarsesama.

HT sebagai gerakan yang berbasis sektarianisme keagamaan, dapat dipastikan memiliki orientasi ideologi fundamental sebab latar belakang berdirinya berlandaskan pada historisitas keterpurukan Islam yang berjalan cukup lama, sejak abad ke-19 M ketika hegemoni Barat sedang gencar-gencarnya. Maka bagi mereka, untuk menyelamatkan keterpurukan dan ketertindasan Islam—meski nyatanya malah memperkeruh—tidak ada alasan lagi selain dengan jihad. Selain itu, mereka juga mencari landasan pembenaran normatif-teologis dengan menafsirkan secara literal-skriptural atas QS. Ali Imran ayat 104, yang menyeru kepada perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kalau Anda masih ingat, makar yang dilakukan Israel di Palestina (tanah kelahiran al-Nabhani, tokoh pendiri HT) pada tahun 1948, dianggap sebagai tindakan ekstrem yang harus dihilangkan. Ungkapan ini senada dengan penjelasan Masdar Hilmy, bahwa HT sebagai gerakan/organisasi transansional di Palestina muncul karena maraknya solidaritas dunia atas penjajahan yang dilancarkan Israel.

Istilah proyek *khilafah* yang dikenalkan oleh Ainur Rafiq, sebenarnya tidak jauh beda dengan konflik antara Sunni dan Syiah, Katolik dengan Protestan karena gerakan fundamentalisme Islam pada dasarnya merupakan gerakan politik yang dibungkus oleh keyakinan agama. Masing-masing kelompok masih mempertahankan status quo dan terikat dengan hubungan kekuasaan (*power relation*) dalam gerakan fanatisme, radikalisme-fundamentalisme, belum lagi dalam istilah lain disebut dengan gerakan *global salafism* kontemporer yang memiliki hubungan dekat meskipun tidak identik.

Dalam hal ini akhirnya penulis berkesimpulan bahwa perbedaan mencolok antara fundamentalisme keagamaan era klasik dan kontemporer adalah pada aspek kesadaran. Fundamentalisme era klasik berangkat dari keterpurukan akibat hegemoni sedangkan era kontemporer justru lebih parah lagi: cara pandang yang sempit dan kebenaran tunggal (*single truth*). Konflik horizontal dan bom bunuh diri yang menjamur di Pakistan, Saudi Arabia, Palestina, Irak, Afganistan dan tak lupa Indonesia, adalah implikasi berantai dari sikap atau cara pandang semacam itu. Maka jangan heran (apalagi berang) bila muncul istilah ekstremis keagamaan (*al-Tatarruf at-Diniy*) yang menyebar luas di dunia Islam, bagai jamur yang tumbuh subur di musim hujan.

Wallah a'lam bimuradih.

B. Upaya Penegasan Islam Kebangsaan: Kajian Perppu UU No 2 Tahun 2017

Oleh Abd Khair Wattimena

Tak dapat dipungkiri terbitnya Perppu No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sesungguhnya di latarbelakangi oleh keberadaan organisasi-organisasi yang berpaham radikal yang akhir-akhir ini tumbuh subur di Negara Indonesia. Selain mengusung pola doktrin keagamaan, organisasi-organisasi ini juga secara terang-terangan mengusung ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia: Pancasila. Pemerintah menengarai ada beberapa organisasi Islam yang masuk dalam kategori ini, di antaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dalam rangka mengantispasi berkembangnya paham tersebut maka pemerintah dalam hal ini presiden menerbitkan Perppu No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Meski mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, namun pemerintah mempunyai dasar yang kuat, misalnya lebih dari sekadar laten gerakan radikal.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa ada dua perspektif hukum kenapa Perppu tentang pelarangan organisasi radikal itu dikeluarkan: *pertama*, adalah

perspektif hukum dalam konteks hak berserikat dan berpendapat, dalam sudut pandang konstitusi UUD dasar tahun 1945 pasal 28E poin 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28J UUD tahun 1945 poin 2 juga menyatakan hal yang sama bahwa menjalankan hak-hak kebebasan itu dibatasi dengan UU semata-mata untuk menjamin kebebasan dan hak-hak orang lain serta menjamin ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Penjelasan ini memberikan arti bahwa organisasi apa pun bebas hidup di Indonesia selagi tidak mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak-hak mayoritas dalam kehidupan berdemokrasi, apalagi ingin mengubah tatanan ideologi negara dengan *khilafah.*

Selain itu, dalam pasal 2 UU No 17 tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan dijelaskan bahwa asas organisasi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila UUD 1945, demikian pula di dalam pasal 5 huruf g juga dijelaskan bahwa tujuan organisasi di Indonesia adalah menjaga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa negara sudah sangat tegas memberikan rambu-rambu dalam berserikat dan berpendapat. Negara sangat menghargai ekspresi masyarakatnya dalam organisasi apa pun karena itu adalah hak warga negara, tetapi dalam ekspresi tentu harus ditunjukkan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan sebaliknya untuk melakukan pertentangan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati dalam konstitusi kita.

Kecendurungan adanya *vis a vis* antara Pancasila dengan organisasi Islam radikal akhir-akhir ini semakin mengemuka. Dalam beberapa rapat akbar, HTI dengan lantang menyeru bahwa Pancasila adalah *thagut*, oleh karenaya Indonesia harus diubah menjadi *khilafah*. Celakanya, wilayah-wilayah yang potensi konfliknya tinggi seperti Palu dan Maluku menjadi sasaran meletusnya kembali gesekan horizontal. Hal ini menandakan bahwa negara belum tegas dalam menegakkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Pemberlakuan Perppu dalam sudut pandang ini tentu sangat dibenarkan sebagai bentuk dari komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum.

Kedua, adalah terkait dengan pengambilan keputusan terhadap situasi yang dianggap darurat atau kegentingan oleh presiden sebagaimana diatur dalam pasal 22 UUD tahun 1945 dan pasal 1 angka 4 UU No 12 tahun 2011, dan diperjelas oleh putusan MK No 138/ PUU-VII 2009. Dalam kajian hukum, pengertian kegentingan yang memaksa itu terkandung sifat darurat atau *emergency* yang memberikan kewengangan kepada presiden untuk menetapkan Perppu atau disebut undang-undang darurat menurut konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950 atau juga disebut *emergency legislation* (Jimly Asshiddiqie: 2010).

Dalam pasal 22 ayat 1 UUD tahun 1945 di jelaskan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, dan pasal 1 angka 4 UU No 12 tahun 2011 dijelaskan juga bahwa Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam konteks ini presiden

diberikan kewenangan subjektif untuk menerjemahkan realitas kegentingan dalam pemerintahannya sebagai pertimbangan untuk memutuskan kebijakan Perppu.

Pertanyaannya segenting apakah situasi sekarang ini sehingga pemerintah sampai mengeluarkan Perppu tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini titik tekannya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 138/ PUU-VII 2009 tentang pemaknaan kegentingan, dalam keputusan tersebut terdapat tiga poin yang menjelaskan situasi genting itu sendiri. Kegentingan lebih diistilahkan dengan *innere notstand* atau keadaan *emergency* di dalam internal pemerintahan. Presiden sebagai pemegang tugas-tugas kepala pemerintahan tertinggi atas keadaan negara dan pemerintahan yang dipimpinnya berhak mengeluarkan kebijakan jika timbul keadaan yang demikian genting dan memaksa, baik karena faktor yang bersifat eksternal ataupun internal sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945.

Jika dikaji dari tiga poin putusan MK tentang memaknai situasi "genting" tersebut bahwa pada poin pertama penjelasan putusan MK tentang situasi kegentingan adalah "adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang". Pemaknaan kegentingan di sini bisa diartikan sebagai keadaan mendesak di pemerintahan (*innere notstand*) yang artinya mendesak dari segi substansinya dan juga mendesak dari segi waktunya.

Dari aspek substansinya adalah keberadaan organisasi yang berpaham radikal di negara Indonesia berkembang dengan cepat dan telah berinfiltrasi ke berbagai organisasi

Islam lainnya. Hal ini terbukti dari survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bahwa sebanyak 79,3 persen responden menyatakan bahwa NKRI adalah yang terbaik bagi Indonesia, dan 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara *khilafah* atau negara Islam. Sementara 11,5 persen responden lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Jika dinominalkan angka sebanyak 9,2 persen warga yang ingin NKRI berubah menjadi negara *khilafah* bukanlah jumlah yang sedikit. Jumlahnya bisa mencapai sampai 20 juta penduduk atau lebih dari penduduk Singapura. Sebelumnya riset yang sama juga dilakukan oleh PPIM tentang intoleransi dan hasilnya menunjukkan bahwa ada 76% sepakat dengan nilai-nilai Pancasila dan 84% setuju NKRI berbasis Pancasila, namun ada 22,8% sepakat dengan inspirasi negara Islam. Maka situasi ini menunjukkan bahwa dari aspek substansi situasi kegentingan itu memang tampak secara nyata terjadi di negara kita.

Sedangkan yang dimaksud dengan mendesak dari segi waktu ialah bahwa pemerintah mengambil langkah cepat dalam membuat keputusan hukum, walaupun harus melakukan lompatan hukum dengan tidak mengikuti proses tahapan-tahapan (prosedural) karena situasi ini membutuhkan tindakan cepat semata-mata untuk menjaga NKRI dan Pancasila. Dalam konteks ini, negara pasti memiliki data konkret terkait geliat kelompok Islam radikal baik dalam berdakwah maupun bergerilya menyusun taktik tertentu.

Poin kedua putusan MK tentang makna situasi genting juga dijelaskan bahwa "undang-undang yang

dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada tetapi tidak memadai". Jika dikaji lebih jauh, lahirnya Perppu No 2 tahun 2017 atas dasar karena Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Ormas belum mengatur secara memadai soal sanksi terhadap paham organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara. Pada pasal 64 UU No 17 tahun 2013 sanksi yang diberlakukan masih sebatas pemberhentian bantuan dan pemberhentian sementara. Maka ini tidaklah seimbang dengan tindakan organisasi masyarakat yang ingin mengubah dasar negara.

Sedangkan dalam Perppu No 2 tahun 2017 sanksi terhadap organisasi yang mencoba mengubah ideologi negara lebih dipertegas, yakni dengan melakukan pencabutan status badan hukum sekaligus dinyatakan organisasi tersebut bubar. Ketegasan negara terhadap Ormas yang bertentangan dengan ideologi negara dalam Perppu No 2 tahun 2017 sudah semestinya harus di lakukan mengingat tanggung jawab negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD Negara tahun 1945 negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini presiden dalam memutuskan kebijakan Perppu No 2 tahun 2017 tidak serta-merta tanpa pertimbangan sosial politik hukum di masyarakat yang dalam istilah penulis sebagai politik kebangsaan. Pemerintah memiliki kemampuan yang didukung oleh sarana dan sumber daya yang memadai dalam menggali data dan fakta sosial politik di masyarakat. Sehingga pemerintah tidak menutup mata untuk mempertimbangkan kesejarahan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan

NKRI. Di sisi lain, pemerintah juga tidak mengabaikan jasa seluruh elemen masyarakat yang telah dengan susah payah mempertahankan ideologi Pancasila dan NKRI. Pemerintah juga meyakini bahwa agama Islam atau agama lainnya tidak pernah mengajarkan untuk melakukan perlawanan kepada sebuah kesepakatan kesejarahan yang sah.

Lagi pula, dalam sejarah sudah jelas bahwa kesepakatan para *founding father* kita atas ideologi negara adalah Pancasila, bukan Islam, Kristen, Hindu, Budha ataupun lain sebagainya. Meski mayoritas masyarakat Muslim, namun para pemimpin bangsa dengan segenap ulama dengan kejernihan berpikir meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Justru karena sikap toleransi tinggi ini Indonesia menjadi negara yang disegani baik dari dalam maupun luar negeri. Sebab sampai sekarang, hanya Indonesia salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbesar sedunia namun masih bersikukuh memegang pluralisme sebagai salah satu kearifan yang harus terus dijaga.

Dengan demikian ketegasan pemerintah dalam merespons perkembangan sosial politik hukum terhadap berbagai upaya gerakan dan infiltrasi ideologi Islam radikal di Indonesia sudahlah tepat. Dengan diterbitkan Perppu No 2 tahun 2017 bukan membuktikan bahwa negara ini anti terhadap Islam tapi suatu pertanda bahwa Islam kebangsaan adalah yang *rahmatan lil alamin* bukan *rahmatan lil muslimin*.

C. "Jas Hijau": Upaya Meneguhkan Kembali Peran Ulama dalam Bingkai Toleransi

Oleh Muksin

Sejarah telah mengukir betapa banyaknya anak bangsa yang telah menorehkan tinta emas dalam hati sanubari Indonesia, yang semua itu menjadi indikator bahwa pekerjaan yang berat kalau dikerjakan secara bersama sama akan terasa ringan. Perjuangan itu butuh tekad dan dilakukan bukan hanya pada tataran ide. Maka kalau kita kembali melihat sejarah bagaimana Indonesia lepas dari kolonialisme, kita tidak bisa serta-merta mengkultuskan segelintir orang saja sebagai *kingmaker*, tapi harus mengakui bahwa semua itu merupakan andil dari seluruh elemen masyarakat tak terkecuali.

Betapa heroiknya anak-anak bangsa pada waktu itu dalam berperang melawan penjajah baik secara fisik maupun dalam tataran opini untuk membumihanguskan penjajahan di Indonesia. Seandainya saja para perjuang kita tidak punya kemaun yang kuat mungkin saja kita sampai saat ini masih dalam genggaman penjajah. Sebut saja Soekarno, Mohammad Hatta, Soetomo dan tokoh-tokoh lainnya, mereka semua sangat familiar sebagai tokoh-tokoh bangsa yang selalu ditulis dalam sejarah yang mempunyai peran penting dalam menggagas bangsa

Indonesia yang bebas dari penjajahan. Perjuangan untuk bebas dari penjajah sudah menggema dalam hati setiap warga Indonesia pada kala itu, kita dapat membayangkan betapa susahnya hidup dalam genggaman penjajah, tentu akan banyak pembatasan-pembatasan hak yang dilakukan oleh penjajah pada masyarakat saat itu, yang mana hak-hak itu mungkin sudah diberikan dan dijalankan secara bebas di negara yang merdeka, tapi tidak dengan Indonesia yang masih dalam genggaman penjajah yang sangat otoriter.

Berbicara tentang para tokoh pejuang kemerdekaan tidak akan ada habisnya karena semua komponen bangsa bahu-membahu dengan sukarela untuk ikut serta dalam mengusir penjajah pada waktu itu sebagaimana yang sering dicantumkan dalam buku-buku sejarah *mainstream*. Namun selain itu, ada tokoh lain yang sering absen dari tinta sejarah. Kalaupun ada, hanya sering disampaikan secara tutur oleh segelintir orang yang sangat paham betul sejarah. Anda tahu, orang-orang yang saya maksud adalah para ulama.

Banyak yang lupa bahwa dalam belantika sejarah kemerdekaan Indonesia ada banyak sekali peran ulama di dalamnya. Peran serta mereka sangat penting dalam mengusir penjajahan di bumi pertiwi. Mereka sama halnya dengan para tokoh-tokoh pejuang nasional: menghabiskan waktu, tenaga materi bahkan rela mengorbankan nyawa demi merengkuh kemerdekaan dalam arti sesungguhnya.

Tak hanya sampai di situ, para ulama di republik ini juga ikut *urun rembuk* dalam menyusun piagam Jakarta yang pada ujungnya menjadi cikal-bakal pondasi yang kokoh dalam membangun nagara Indonesia. Seandainya pada kala itu para ulama mementingkan ego komunal,

barangkali hari ini kita tidak akan menjadi negara besar yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang semuanya hidup berdampingan dengan rukun, damai dan toleransi tinggi.

Jika kembali mengingat, saat itu usulan dari para ulama, salah satunya KH. Wahid Hasyim yang merupakan anggota dari tim Sembilan anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) justru menolak usulan terkait tujuh kata: "Ketuhanan… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya....". Sebab baginya, jika sampai usulan butir kata itu tetap dipertahankan maka saudara-saudara non-Muslim—khususnya bagian timur—jelas tak terima dan bahkan memilih pisah dari Indonesia.

Kalau kita amati begitu besar nilai-nilai toleransi yang dilakukan oleh para ulama agar semata-mata bangsa yang besar ini tidak tercerai-berai. Para perwakilan tokoh Islam di BPUPKI pada waktu itu memilih berkompromi demi kepentingan yang lebih besar: kepentingan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal kalau mau, bisa saja pada waktu itu para ulama memaksakan kehendak mereka untuk tetap mempertahankan tujuh kata tersebut. Namun sekali lagi, para ulama lebih memikirkan bagaimana kemaslahatan umat tetap terjaga karena pada esensinya setiap yang hidup di Indonesia akan menjadi keluarga besar yang harus sama-sama terlindungi dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Tidak salah ketika gagasan tentang "Jas Hijau" (jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama) yang diprakarsai oleh para santri dan kiai menjadi sangat penting untuk

digaungkan kembali seantero negeri. Jangan sampai anak-anak kita kelak hanya diperkenalkan kepada pahlawan tokoh nasional dan tidak pernah kita kenalkan pahlawan bangsa yang berasal dari ulama. Kita dapat mengambil hikmah dari perjuangan para ulama kita tentang nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang baik, terutama nilai-nilai toleransi antarumat beragama.

Yang tak kalah penting, nilai yang dapat kita ambil sebagai pegangan dalam menjaga bangsa ini adalah bahwa kita tidak hidup dengan satu agama, kita tidak hidup dengan satu suku, kita tidak hidup dengan satu bahasa, kita tidak hidup di negara yang homogen. Tapi kita hidup dengan berbagai agama yang sama-sama dilindungi oleh negara, kita hidup dengan banyak suku, kita hidup dengan banyak bahasa, kita hidup di negara heterogen maka jangan sekali-kali merusak nilai-nilai keberagaman dan toleransi yang sudah dibangun oleh para ulama.

D. PNS dan Perkara Ideologi Pancasila

Muhamad Arifin

Akhir-akhir ini kita banyak disuguhi berita-berita tentang adanya kelompok yang menghendaki berdirinya *khilafah* di Indonesia. Salah satu kelompok tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memberikan pernyataan pers di kantornya terkait wacana untuk membubarkan HTI.

Menurut Wiranto pemerintah mempunyai tiga alasan untuk membubarkan HTI. *Pertama*, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. *Kedua*, HTI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. *Ketiga*, pemerintah menilai bahwa aktivitas yang dilakukan oleh HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

"Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil

langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," tutur Wiranto.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas HTI. Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Pascapembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang anti Pancasila agar mengundurkan diri. Hal ini disampaikan mungkin karena ada indikasi PNS yang terlibat dalam kegiatan ormas yang anti Pancasila. Beberapa dosen perguruan tinggi yang mungkin saja juga berstatus PNS diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal ini sangat wajar karena PNS merupakan abdi negara yang digaji oleh negara dari uang rakyat maka seyogianya mereka juga berkerja demi mempertahankan negara serta membantu pemerintah untuk kemajuan dan ketertiban masyarakat, bukan malah ikut kegiatan-kegiatan organisasi yang anti terhadap Pancasila sebagai dasar negara, mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan."

Pada Pasal 3 disebutkan ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan.

Selanjutnya tentang nilai dasar ini dijelaskan dalam pasal 4 yang menyatakan: Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. memegang teguh ideologi Pancasila; b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; k. mengutamakan kepemimpinan

berkualitas tinggi; l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama; m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pada saat CPNS dilantik menjadi PNS, sebenarnya mereka sudah disumpah untuk setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar RI tahun 1945, dan NKRI. Hal tersebut sudah menjadi kontraknya dengan negara karena PNS adalah aparatur negara yang bertugas melayani masyarakat dan digaji oleh negara.

Bahkan pada lolos seleksi dan pemberkasan untuk proses penerbitan CPNS, setiap peserta yang lolos wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) ditandatangani di atas materi Rp 6.000,- yang di dalamnya juga menyatakan setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar RI 1945 dan NKRI. Selanjutnya para CPNS mengikuti diklat Prajabatan, yang pada saat itu pun didoktrin untuk setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Sumpah PNS sudah tegas diatur dalam Pasal 66 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang No. 5 tahun 2014 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Bunyi Pasal 66 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

(1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berbunyi sebagai berikut:

> "*Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:*
>
> *Bahwa saya, ntuk diangkat menjadi PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUDNRI tahun 1945, negara dan pemerintah;*
>
> *Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;*
>
> *Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;*
>
> *Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;*
>
> *Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara*."

Dilihat dari kata-kata dan tata cara pengambilan sumpah PNS tersebut tergambar betapa penting dan sakralnya sumpah yang diucapkan oleh setiap PNS yang diambil sumpah/janjinya. Bagi kita Kaum Muslimin kata-kata yang dimulai dengan "demi Allah" adalah suatu janji yang tertinggi dan tidak boleh dilanggar. Dalam surat an-Nahl ayat 91-92 Allah telah berfirman:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ # وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ

غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .

Artinya: *Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu*.

Dari segi bahasa, *al-yamiin* berarti tangan kanan, kemudian sumpah menggunakan istilah *al-yamiin* karena dahulu orang-orang jahiliah apabila bersumpah, mereka saling berjabatan tangan kanannya (bersalaman) sebagai tanda penguat sumpah mereka. Adapun secara istilah fikihnya, sumpah adalah menguatkan perkataan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan bentuk kalimat tertentu (Al-Jazairy, 1996: 55).

Sumpah juga berarti pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar maka secara umum sumpah adalah janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu). Terhadap setiap sumpah Allah Swt telah mengingatkan melalui firman-Nya dalam

surat al-Isra' ayat 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا .

Artinya: *Dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji-janji itu akan dimintai pertangjawabannya*.

Selanjutnya tentang pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang anti Pancasila mengundurkan diri sangat wajar dan tidak melanggar aturan karena jika PNS yang anti Pancasila tidak mengundurkan diri maka pemerintah dapat memberhentikan PNS tersebut tidak dengan hormat.

Hal ini dikarenakan PNS yang anti Pancasila atau pendukung organisasi yang anti terhadap Pancasila telah melanggar nilai dasar yang terkandung dalam prinsip profesi ASN, yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang anti terhadap Pancasila atau pendukung organisasi yang anti terhadap Pancasila ini sesuai dengan ayat 4 huruf (a) Pasal 87 Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa PNS yang anti terhadap Pancasila atau PNS pendukung organisasi anti Pancasila berarti telah melanggar UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mereka juga telah melanggar sumpah yang telah diucapkan ketika diangkat menjadi PNS.

Sehingga sumpah yang diucapkan ketika menjadi PNS adalah sumpah palsu.

Dapat diambil kesimpulan bahwa PNS yang anti terhadap Pancasila atau pendukung sebuah organisasi yang mengusung dan memperjuangkan ideologi apa pun selain Pancasila untuk diterapkan di Indonesia, mereka telah mengkhianati bangsa Indonesia dan mereka melakukan sumpah palsu sebagaimana yang diucapkan pada waktu pengangkatan PNS.

Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil langkah untuk menyikapinya dengan melakukan pembinaan bagi PNS yang anti terhadap Pancasila agar mereka kembali yakin dan setia terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Jika tidak bersedia maka pemerintah dapat memberhentikan mereka secara tidak hormat. Pembinaan dan sikap tegas itu harus segera dilaksanakan sebab menjalarnya ideologi anti Pancasila tersebut seperti jamur di musim hujan yang jika tak segera diatasi bakal semakin merepotkan di kemudian hari, terutama bagi keutuhan bangsa Indonesia.

BAGIAN III
GERAKAN RADIKALISME AGAMA DAN DERADIKALISASI DI INDONESIA

A. Dakwah Islam Moderat di Tengah Masyarakat Urban, *Middle-Class* dan Milenial

Oleh Muhammad Aziz Hakim

Beberapa tahun terakhir, dinamika kehidupan sosial masyarakat diwarnai dengan semakin menguatnya radikalisme dan intoleransi. Fenomena ini beriringan dengan perkembangan teknologi informasi dengan media sosial sebagai instrumen penyebarannya. Fenomena ini juga bisa dimaknai bahwa perkembangan ideologi transnasional yang bersifat ekstrem-radikal semakin hari semakin kuat. Jika situasi ini diabaikan, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam ancaman.

Fenomena menguatnya radikalisme dan intoleransi ini dapat dibaca paling tidak dari *survey* yang dilakukan

oleh Wahid Foundation bekerjasama dengan Lembaga *Survey* Indonesia (LSI). *Survey* yang dihelat pada Maret-April 2016 ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1520 responden dengan margin of error 2,6% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil *survey* cukup mengejutkan, responden yang menyatakan diri pernah bersikap radikal sejumlah 0,4%, sedangkan yang menyatakan bersedia radikal berjumlah 7,7%, adapun yang tidak bersedia radikal sebanyak 72%, dan responden yang tidak punya sikap sejumlah 19,9%.

Radikal atau potensi radikalisme sosial keagamaan dalam *survey* ini dimaknai sebagai partisipasi atau kesediaan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang melibatkan kekerasan atas nama agama. Ini di antaranya diukur dari perencanaan dan terlibat *sweeping* hal-hal yang dianggap berbau maksiat, berdemonstrasi menentang kelompok yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam atau melakukan penyerangan rumah ibadah pemeluk agama lain.

Memang, jika menilik angka 72% responden yang menyatakan tidak bersedia radikal, terasa masih dalam tahap nyaman. Akan tetapi jika melihat angka 0,4% ditambah dengan 7,7% responden yang menyatakan bersikap radikal atau bersedia bersikap radikal maka sejatinya ini adalah *alarm* bagi kehidupan sosial keagamaan kita. Betapa tidak, jika angka-angka itu diproyeksikan kepada 150 juta penduduk Muslim yang mempunyai hak pilih maka akan terdapat 600 ribu Muslim pernah terlibat tindakan radikal dan sekitar 11 juta Muslim bersedia radikal. Suatu angka yang mengkhawatirkan.

Masyarakat yang Berubah

Survey ini menjadi semakin menarik ketika dikorelasikan dengan situasi kehidupan sosial kemasyarakatan kita saat ini. Sekaligus dihubungkan dengan bagaimana strategi dakwah Islam moderat dalam menghadapi berbagai realitas itu.

Saat ini, situasi kehidupan sosial kemasyarakatan kita tengah mengalami perubahan dahsyat. Data BPS tahun 2015 yang diolah Alvara Research Center dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 268.074,6 juta pada tahun 2019 dan mencapai 305,6 juta pada tahun 2035. Diperkirakan pula persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 57,4% pada tahun 2010 menjadi 54,7% pada tahun 2035. Sebaliknya persentase penduduk yang tinggal di pulau-pulau lain meningkat, seperti, Pulau Sumatera naik dari 21,3 % menjadi 22,4 %, Kalimantan naik dari 5,8 % menjadi 6,6 % pada periode yang sama.

Berdasarkan proyeksi piramida penduduk Indonesia yang dilakukan BPS menunjukan di tahun 2019/2020 penduduk Indonesia paling banyak akan berada di rentang usia 15–39 tahun. Tahun 2019 penduduk Indonesia yang berusia 15–39 tahun sebesar 39.64%. Selanjutnya, diperkirakan pada tahun 2020, 56.7% penduduk Indonesia tinggal di Kota/Urban, 62.8% penduduk Indonesia masuk kelas menengah, dan 34.0% penduduk Indonesia berusia 20-39 tahun.

Jika melihat angka-angka tersebut maka masyarakat Indonesia ke depan didominasi oleh masyarakat urban, *middle-class*, dan milenial. Ciri dan karakter ada tiga yaitu, *Pertama*, *confidence*, mereka ini orang yang sangat percaya diri, berani mengemukakan pendapat dan tidak sungkan-sungkan berdebat di depan publik. *Kedua*, *creative*, mereka adalah orang yang biasa berpikir *out of the box*, kaya akan ide dan gagasan dan mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan itu dengan cemerlang. *Ketiga*, *connected*, mereka adalah pribadi-pribadi yang pandai bersosialisasi terutama dalam komunitas yang mereka ikuti, mereka juga aktif berselancar di sosial media dan internet.

Virus Radikalisme dan Intoleransi

Gairah semangat keberagamaan (religiositas) masyarakat urban dan *middle-class* digambarkan dengan menarik oleh Rofhani melalui artikel berjudul "Pola Religiositas Muslim Kelas Menengah di Perkotaan" (dalam *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, Maret 2013). Rofhani menyebutkan bahwa masyarakat urban dan *middle-class* ini adalah masyarakat yang tingkat mobilitas dan aksebilitasnya cukup tinggi dan mempunyai kemampuan untuk memilih serta daya tawar yang tinggi pula. Mereka termasuk orang rasional dan hidup di perkotaan, serta kebanyakan mereka mendapatkan pendidikan umum (bukan sekolah agama). Dari segi pekerjaan yang digelutinya juga sebagai seorang profesional yang bukan bidang agama juga, misalnya pengusaha, dokter, pegawai eksekutif, pengacara dan lain-lain. Oleh karena itu, rutinitas kehidupan kota yang demikian ramai dan sibuk menjadikan diri mereka muncul kesadaran

baru. Rofhani—mengutip Giddens—menyebutnya sebagai refleksi diri.

Giddens menjelaskan bahwa munculnya kesadaran diri pada manusia modern dipicu ketidakpercayaannya menghadapi kondisi yang kontras antara tradisi dengan dunia yang telah melampaui modern. Rutinitas sehari-hari menjadikan masyarakat modern terutama bagi *middle-class* adalah kondisi yang harus dihindari sehingga penemuan diri menjadi suatu proyek yang secara langsung dikaitkan dengan refleksi modernitas. Akibat yang muncul, menurut Giddens, adalah interpretasi pencarian identitas diri cenderung terbagi dengan cara yang sama sebagaimana pandangan tentang semakin lunturnya komunitas, yang mana tatanan komunal lama telah runtuh, dan menghasilkan kecenderungan narsisitik dan hedonistik terhadap ego.

Berbasis refleksi diri di atas bangunan narsistik dan hedonistik ini, masyarakat urban dan middle class, menampakkan identitas ke-Muslim-annya dengan menggabungkan hal-hal yang bersifat spiritual dengan materi. Bagi mereka, nilai-nilai spiritualitas agama tidak harus disembunyikan, bahkan dalam taraf tertentu ada nilai narsisnya. Oleh karena itu, yang mereka tampakkan adalah bagaimana menunjukkan identitas Muslimnya dengan tata cara, model dan gaya berbusana. Bila berzakat atau bersedekah mereka memanggil anak yatim ke rumahnya. Ini adalah suatu gambaran bagaimana supaya eksistensi diri dikenal masyarakat sekitar. Penampakan spiritual juga bisa dilihat dari pilihan pendidikan bagi anak-anaknya dengan memilih sekolah bernuansa Islam dengan fasilitas yang plus pula. Jarang ditemukan pilihan pendidikan untuk anaknya di

pesantren. Mereka memilih sekolah umum tapi bernuansa islami, dan di lembaga-lembaga pendidikan inilah mereka saling bertemu dan berkumpul membentuk komunitas.

Pada sisi lain, masyarakat urban dan *middle-class* dimanjakan dengan dunia yang serba instan. Mereka dapat memenuhi kebutuhannya melalui akses internet yang mudah dengan berbagai *tetek-bengek* tawarannya. Di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan terhadap pemahaman keagamaan. Dengan tipikal pragmatis, enggan bersusah payah, dan terbiasa dengan hal serba instan, mereka menikmati sajian pemahaman keagamaan yang praktis dan tidak berbelit yang dihidangkan oleh berbagai media, baik internet maupun televisi. Catatan *survey* Wahid Foundation cukup menarik, sebanyak 28,6% menyebut bahwa paham keagamaan mereka didapatkan dari ceramah melalui televisi. Angka ini menduduki posisi tertinggi dibanding mendapatkan di masjid (24,6%) dan dari kiai/ustaz (18,0%).

Kondisi seperti inilah yang rentan terhadap virus radikalisme dan intoleransi. Karena sajian pemahaman keagamaan nan praktis begitu mudah disampaikan secara literal dan tekstual. Materi yang tekstual dan literal inilah yang banyak ditemui pada ceramah di televisi, mimbar-mimbar pengajian, maupun *khutbah* jumat di masjid di daerah perkotaan. Pada umumnya, sajian tekstual dan literal mewujud pada anggapan bahwa jihad sebagai perang dan dukungan terhadap isu-isu dalam *muamalah*. Dalam situasi seperti ini, bisa dipastikan bahwa virus radikalisme dan intoleransi mudah menjangkiti masyarakat urban dan *middle class* itu. Kondisi ini semakin parah, jika terus-menerus mengonsumsi informasi keagamaan yang berisi

kecurigaan dan kebencian terhadap kelompok lain.

Pada konteks generasi milenial juga menghadapi problem yang tidak jauh berbeda. Penelitian yang dilakukan pada Februari-Maret 2017 oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang menghasilkan temuan menarik. Penelitian ini menjadikan kegiatan kerohanian Islam (Rohis) sebagai salah satu fokus penelitian. Hasilnya, sejumlah siswa SMAN setuju mengubah dasar Pancasila, memilih pemimpin berdasarkan kesamaan agama, serta pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, siswa-siswa SMA itu banyak yang mengidolakan tokoh-tokoh yang disinyalir mengusung radikalisme. Temuan ini mengindikasikan betapa virus radikalisme dan intoleransi juga sudah leluasa memasuki sekolah-sekolah menengah.

Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa penyebaran virus radikalisme dan intoleransi dilakukan melalui jejaring alumni atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan agama yang menangani kegiatan keagamaan di sekolah tersebut. Modus yang sering dipakai adalah dengan menawarkan berbagai program kegiatan keagamaan yang menarik bagi para siswa dan akhirnya disetujui sekolah. Melalui berbagai kegiatan Rohis inilah, pemahaman keagamaan yang literal dan tekstual disebarkan kepada para siswa. Selain itu, juga disertai informasi keagamaan yang berisi kecurigaan dan kebencian terhadap kelompok lain.

Strategi Dakwah

Perkembangan paham keagamaan yang tekstual dan literal demikian akrab di masyarakat urban, *middle class*, dan milenial. Kondisi ini bak "bahan bakar" yang semakin berbahaya jika terus-menerus disiram dengan berbagai informasi keagamaan yang berisi kecurigaan dan kebencian terhadap kelompok lain. Dalam kaitan itulah perlu merancang ulang strategi dakwah yang tidak tekstual dan tidak literal.

Dakwah yang tidak tekstual dan tidak literal dengan kata lain adalah dakwah yang kontekstual. Dakwah yang mencoba mensinergikan antara teks dengan konteks, antara *naql* dan *aql*. Sinergi ini menghasilkan pemahaman keagamaan yang mengambil jalan tengah, *wasathan* atau Islam *Wasathiyah*.

Dalam pengertian Wasisto Raharjo Jati (2015), pengertian *wasat* sendiri dapat dianalisis dalam berbagai pengertian seperti halnya "jalan tengah", "adil", "pilihan","paling baik", Berbagai macam pengertian itu tersebut dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 143 berbunyi, "*wa kadzalika ja'alnakum ummatan washatan*." (Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang "*wasat*").

Dalam konteks Indonesia sendiri, makna *wasat* kemudian diterjemahkan dalam bentuk "Islam Jalan Tengah" atau "Islam Moderat". Pilihan kata tersebut sebenarnya merujuk pada terbentuknya Islam Indonesia yang inklusif dan mampu menjadi pedoman nilai dalam menentukan peradaban bangsa.

Saat ini, Islam moderat di Indonesia dengan masyarakat yang cenderung berubah dengan dominasi urban, *middle-class*, dan milenial menghadapi berbagai tantangan. *Pertama*, membutuhkan lebih banyak energi. Betapa tidak, dalam memberikan pemahaman yang kontekstual dengan menggunakan *naql* dan *aql* membutuhkan ruang dan waktu yang lebih banyak ketimbang memberikan pemahaman tekstual belaka. Ibaratnya, memberikan pemahaman "jalan tengah" tentu harus memahami dan memahamkan apa saja dua sisi lainnya alias paham "sisi kanan" dan "sisi kiri" dari "jalan tengah" itu. Tentu, hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah.

Kedua, tuntutan yang serba instan. Di tengah kebutuhan akan ruang dan waktu serta energi lebih¸ dakwah Islam moderat juga dihadapkan pada masyarakat yang telah nyaman hidup serba instan. Artinya, butuh strategi khusus bagaimana menjelaskan "jalan tengah", "sisi kiri" dan "sisi kanan". Pemahaman komprehensif Islam moderat harus dikemas dengan menarik agar mudah dikonsumsi oleh masyarakat urban, *middle class*, dan milenial. Sajian Islam moderat yang mudah diakses dan mudah didapatkan harus disediakan.

Ketiga, tuntutan "tahan banting" di media sosial. Pada umumnya, orang yang berpaham Islam moderat memiliki kecenderungan memberikan argumentasi rasional, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, serta enggan mencaci maki orang yang berbeda pendapat dengannya. Faktanya, saat ini kita dihadapkan pada dunia media sosial yang penuh dengan angkara murka. Caci maki dan sumpah serapah begitu mudah keluar manakala

bersilang pendapat. Kadang, argumentasi yang sudah sangat rasional, berbalas dengan ejekan dan hinaan. Pada titik inilah, dibutuhkan semangat "tahan banting" dalam menghadapi caci maki, sumpah serapah, ejekan, dan hinaan itu. Berat memang, tapi inilah salah satu resiko dalam menyebarkan Islam moderat.

Paling tidak, tiga tantangan itulah yang dihadapi dalam mendakwahkan Islam moderat. Upaya selalu meng-*upgrade* pengetahuan keagamaan adalah sesuatu yang harus terus menerus dilakukan. Selain itu, harus selalu mencari cara yang kreatif dan komprehensif dalam menjelaskan pemahaman keagamaan mengenai isu-isu tertentu. Sajian yang praktis tanpa menghilangkan kontekstualitas pemahaman keagamaan serta siap dikonsumsi oleh masyarakat urban, *middle-class*, dan milenial. Dan yang tidak kalah penting adalah menata mental serta niat untuk "tahan banting" dalam menghadapai irrasionalitas pengusung gerakan radikalisme keagamaan dan intoleransi di dunia maya maupun dunia nyata. *Wallahu a'lam*.

B. Radikalisme Agama Era Digital di Indonesia

Oleh Saiful Mustofa

"Radikalisme dan terorisme atas nama Islam tidak dapat dibenarkan. Sebab kata "Islam" diambil dari akar kata yang sama dengan "salam" yang artinya damai. Islam dengan demikian adalah agama damai."—**Hassan Hanafi**

Saya sebenarnya agak kurang *sreg* menyandingkan istilah "radikalisme" dengan "agama". Sebab dalam praktiknya, term itu sudah tereduksi sedemikian rupa sehingga menyempit maknanya. Dalam tradisi filsafat, radikal diartikan berpikir kritis dan mendalam (sampai ke akar). Namun sekarang, istilah radikal identik dengan gerakan ekstrem kanan dalam menyebarkan paham keagamaan. Saya tidak tahu asal-muasal terjadinya reduksi makna itu dan dipelopori oleh siapa. Namun yang pasti, kita memang terlanjur mafhum dengan penyempitan-penyempitan makna semacam itu. Jadi anggap saja kita tidak ada masalah ketika kata "radikalisme" dimaknai dengan gerakan (Islam) yang destruktif.

Saya tertarik dengan radikalisme dunia maya berawal dari penelitian tesis saya di Pascasarjana Jurusan Akidah dan Filsafat Islam (AFI) IAIN Tulungagung. Saya mencomot judul, *Media Online Radikal di Indonesia dan Kematian*

Rasionalitas Komunikatif menurut Jürgen Habermas. Tesis saya itu, menilik fenomena model gerakan baru radikalisme di Indonesia pascareformasi yang memanfaatkan media *online* sebagai ladang dakwah dan doktrinasinya. Dengan meminjam kacamata hermeneutika kritis Habermas, saya memilih *Nahimunkar.com* sebagi objek penelitian. Jadi esai ini tidak akan jauh dari topik itu, pun saya tidak akan menspesifikan hanya pada *Nahimunkar.com* saja.

Pertama-tama, gerakan radikalisme di Indonesia mulai mengubah strategi dakwahnya bisa dirunut pascatumbangnya Orde Baru; dari dakwah konvensional menuju dakwah digital dengan memanfaatkan *website* dan *blog*. Sydney Jones dalam *Online Activism and Social Media Usage Among Indonesian Extremists* (2015), menyebut bahwa Imam Samudera adalah orang pertama yang berhasil mengobarkan *cyber-jihad* di Indonesia. Bahkan pernah mendesak Indonesia untuk melakukan jihad secara *online*, sembari mengajarkan banyak cara untuk melakukannya dari dalam penjara sebelum dieksekusi pada tahun 2008 silam. Ia mulai bergabung dengan jaringan *online* Jamaah Islamiyah (JI) pada tahun 2000 melalui akun Yahoo.

Pada tahun 2001—sejauh penelitian Jones—Imam Samudra mendirikan sebuah situs *web* untuk mempromosikan dan mengklaim penghargaan atas operasi Jamaah Islamiyah (JI), termasuk pemboman pada Natal Bulan Desember tahun 2000. Situs itu diberi nama tibb. *beritaislam.com*. Istilah "tibb" merupakan akronim dari Tentara Islam Batalyon Badar; sebuah nama yang merujuk kembali pada salah satu pertempuran besar di awal sejarah Islam. Menurut Jones, situs itu kemudian tidak dibuka lagi

dan setelah sekian lama Imam Samudra mendekam di balik jeruji besi, kebanyakan orang Indonesia tidak pernah tahu bahwa ia telah mengaku bertanggung jawab secara *online* atas serangan pra-Bali, meskipun ia tidak menyebutkan nama JI.

Setelah itu, ia juga merilis pernyataan pada sebuah situs dengan tujuan untuk pembenaran atas tindakan pemboman Bali tahun 2002 yang diberi nama *www.istimata.com*. *Istimata* dicomot dari istilah bahasa Arab yang berarti "tindakan bunuh diri". Deklarasi itu menjelaskan bahwa pembom menggunakan istilah musuh al-Qaeda. "Bagi Anda, tentara salib-kafir, jika Anda mengatakan bahwa pembunuhan tersebut ditujukan terhadap warga sipil yang tidak berdosa dari negara Anda, ketahuilah bahwa Anda telah melakukan jauh lebih buruk dari itu. Apakah 600.000 bayi di Irak, setengah juta wanita dan anak-anak di Afghanistan kalian anggap pantas terkena ribuan ton bom Anda?" ujar Imam Samudra.

Imam Samudra ditangkap pada bulan November 2002 dan dijatuhi hukuman mati sepuluh bulan kemudian, namun ia terus menyeru *cyber-jihad* dari penjara dan beberapa pengikutnya mendirikan situs untuk mempromosikan berita tentang jihad global, kendati kebanyakan dari mereka pada akhirnya berumur pendek. Yang paling profesional adalah *www.muharridh.com*, yang dipengaruhi langsung oleh unit media al-Qaeda di Pakistan, yang mulai *online* sekitar bulan April 2004. Meski Imam Samudra sudah tinggal nama, namun spririt perjuangannya telah menginspirasi mereka yang senapas dengannya.

Sepanjang dua tahun terakhir (2015-2017), pemerintah melalui Kemenkominfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) setidaknya sudah tiga kali memblokir situs-situs yang dinilai memuat unsur seruan jihad ke Syiria, paham-paham takfiri, mengobarkan semangat permusuhan antar/sesama umat beragama, memuat unsur SARA, dsb. *Pertama*, sebagaimana dilansir *Kompas.com* (30/03/2015), pada Maret 2015 mereka memblokir sembilan belas situs *online*: *arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salamonline.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, dan daulahislam.com*.

Kedua, pada November 2016 Kemenkominfo kembali merilis berita tentang pemblokiran sebelas media *online* (Islam) radikal: *lemahirengmedia.com, portalpiyungan.com, suara-islam.com, smstauhiid.com, beritaislam24h.com, bersatupos.com, pos-metro.com, jurnalmuslim.com, media-nkri.net, ontaranews.com, dan nusanews.com* (*Kompas.com*, 03/11/2016).

Ketiga, pada Januari 2017, masih menurut *Kompas.com* (04/01/2017) Kemenkominfo kembali memblokir sebelas situs yang sebagian masih sama dan sebagian lagi nama baru: *voa-islam.com, nahimunkar.com, kiblat.net, bisyarah.com, dakwahtangerang.com, islampos.com, suaranews.com, izzamedia.com, gensyiah.com, muqawamah.com*, dan *abuzubair.net*.

Kendati demikian, sependek pengamatan saya tidak semua media yang masuk kriteria pelarangan itu diblokir. Ditambah lagi pemblokiran itu juga bersifat remanen alias sementara. Pemerintah dalam hal ini terkesan latah sebab merebaknya media *online* tersebut sudah cukup lama dan pemerintah baru melakukan tindakan semenjak ramainya kemunculan ISIS, merebaknya gerakan radikalisme dan isu-isu hangat lainnya.

Saya coba sajikan salah satu tulisan di portal berita *Nahimunkar.com* yang dalam hal ini tergolong media paling radikal dan masih bebas diakses sampai sekarang. Sebelum itu, yang perlu diketahui, *Nahimunkar.com* adalah situs yang menyediakan informasi dengan misi melawan "kesesatan". Media ini mengaku sebagai situs pribadi (*personal website*) milik Hartono Ahmad Jaiz yang beralamatkan di Rawajati 001/02 nomor 23, Pancoran, Jakarta. Sebagaimana informasi yang tertera di kanal "Tentang *Nahimunkar.com*", Hartono adalah mantan wartawan/redaktur surat kabar nasional Harian Pelita di Jakarta, selama 15 tahun (1982-1997). Pendidikan strata satunya ia tamatkan di Fakultas Adab IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 1981.

Meskipun media ini mengklaim dirinya tidak berafiliasi dengan ormas manapun, namun dari model konten yang disuguhkan dan alur logika berpikir, media ini lebih condong ke gerakan dakwah Salafi-Wahabi. Hal ini sejalan dengan penuturan Abu Muhammad Waskito, bahwa Hartono Ahmad Jaiz dikenal sebagai ustaz Salafiyah. Menurutnya, Ahmad Jaiz gigih dalam membantah aliran-aliran sesat, paham munkar, budaya destruktif, serta politisi-politisi busuk dari kalangan sekuler. Sehingga ia

melakukan jihad pena melalui media *Nahimunkar.com* (Abu Muhammad Waskito, 2012).

Sebagai bukti bahwa *Nahimunkar.com* terjebak pada pemahaman radikal dan tafsir yang literal-skriptural maka coba simak catatan bertajuk, "Sayang, Mereka Pilih Membela Kekafiran, Kemusyrikan, Ahmadiyah, Syiah, Liberal dan Aneka Kesesatan" (*Nahimunkar.com*, 5/12/2015) yang isinya mengutuk para ulama Indonesia sekaliber Said Aqil Siroj, Buya Syafii Ma'arif, dan tokoh cendekiawan Muslim sekelas Azyumardi Azra sebagai pembela liberalisme dan penyebar racun kesesatan. Lantas mereka mengutip berbagai dalil dengan tafsir tekstualistik untuk menguatkan tuduhan kesesatan itu, salah satunya adalah, (QS. Al A'raf: 38):

> Artinya: *Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), ia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu: Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman: Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui.*

Alasan kenapa *Nahimunkar.com* gemar menghujat dengan istilah *bid'ah*, syirik dan kafir karena interpretasi ayat yang mereka jadikan rujukan adalah dari pendapat ulama Salafi-Wahabi. Mereka gemar mengutip pendapat Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai

founding father aliran Wahabi. Kalau sudah demikian maka tidak ada model penafsiran lain selain tekstual karena Ibnu Taimiyah adalah pengikut aliran *Musyabbihah* yang menginterpretasi teks-teks secara literal (*zahir*).

Padahal—menurut Idrus Ramli (2009)—dalam tradisi Ahlusunnah wal Jama'ah (Aswaja) ada tiga model pendekatan yang digunakan dalam memahami sebuah teks: tekstual, sufistik dan rasional. Sedangkan Abdul Wahab gemar sekali mengadopsi *bid'ah-bid'ah* yang digagas oleh Ibnu Taimiyah tentang pengharaman *tawassul* dengan nabi dan orang saleh, *tabarruk*, ziarah kubur dan lain sebagainya. Bahkan Abdul Wahab sering menambahkan pendapat-pendapat baru yang keluar dari *ijma*' ulama, misalnya tentang pengafiran terhadap semua kaum Muslimin pada masanya karena tidak mengikuti ajarannya. Padahal yang pertama-tama harus dipahami sebelum seseorang memaknai teks al-Qur'an adalah mampu membedakan antara mana ayat yang tergolong *muhkamat* (terang, tegas maksudnya) dan *mutasyabihat* (tidak jelas maksudnya). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt (QS. Ali Imran: 7), yang isinya tentang pengecaman terhadap orang-orang yang mengikuti ayat *mutasyabihat* dengan tujuan menimbulkan fitnah.

Maka bila *Nahimunkar.com* sering mengafirmasi kelompoknya sebagai golongan Aswaja tentu saja itu tidak benar, tidak tepat dan tidak jujur. Sebab secara makna kata "*al-Jama'ah*" mengacu pada kolektivitas dan kebersamaan sehingga istilah itu menjadi identitas golongan yang selalu memelihara sikap kebersamaan dan kerukunan. Hal ini bakal terwujud bila pengikut golongan tersebut menjauhi kegemaran menyulut perpecahan, sikap saling mengafirkan,

mem-*bid'ah*-kan, dan mem-*fasik*-kan.

Senada dengan pendapat di atas, menurut Arkoun—sebagaimana dikutip Irwan Masduqi (2011)—dengan meminjam teori *la rigidite mentale* (*ṣaramah al-'aqliyah*) Milton Rokeach dalam psikologi agama, fenomena eksklusivisme dan fanatisme merupakan penyakit kekakuan mental beragama yang disebabkan oleh doktrin dogmatis. Pemeluk agama yang mengidap penyakit ini cenderung mudah menegasikan kelompok lain yang bebeda pandangan karena dinilai tidak seiman. Dengan kata lain, pemeluk agama eksklusif tidak bisa menerima pemikiran kelompok lain dengan tuduhan sesat sehingga pendapat kelompok minoritas yang disesatkan akan masuk dalam "kategori terlarang untuk dipikirkan" (*dairah namnū' al-takfīr fīh*). Sikap eksklusif pada proses berikutnya akan diikuti oleh munculnya stagnasi pemikiran keagamaan (*al-jumūd al-fikr*). Nalar dogmatis eksklusif, yang berdiri di atas paradigma dualistik antara kelompok iman dan sesat disebut dengan istilah *le belief system/et les disbelief system*, yang merupakan akibat dari wawasan agama yang tunggal, sempit, dan tertutup. Nalar inilah yang memicu sikap-sikap intoleran dan gerakan radikalisme termasuk dalam konteks media *online*.

Kalau begitu, teknologi komunikasi—sebagaimana kata Ignatius Haryanto (2014)—dengan segala perkembangannya menyajikan sejumlah pertanyaan mendasar: kemana arah teknologi ini berjalan; apakah demi kemuliaan dan kemajuan manusia atau justru sebaliknya, kemunduran dan kehancuran?

Wallahu a'lamu Bishowab.

C. Dakwah Digital di Era Milenial

Oleh Citra Ayu Kumala Sari

Generasi milenial adalah terminologi yang sering digunakan untuk menyebut generasi muda yang saat ini berusia dikisaran 16-36 tahun. Milenial yang juga dikenal sebagai Generasi Y adalah kelompok demografis setelah Generasi X. Peneliti sosial sering mengelompokkan generasi yang lahir di antara tahun 1980-an sampai 2000-an sebagai generasi milenial. Kehidupan generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari teknologi terutama internet yang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi ini. Data dan statistik dari Kemenkominfo menunjukkan grafik bahwa pengguna internet paling banyak adalah kisaran usia 25-40 tahun, yaitu sebesar 63%.

Saat ini, hampir tidak ada satupun orang dari generasi milenial yang tidak mempunyai akun media sosial (medsos), baik Facebook, Instagram, Twitter, Path, maupun aplikasi *chatting*. Mereka minimal paling tidak punya satu akun medsos, entah Facebook ataupun aplikasi *chatting* semacam Whatsapp dan BBM. Begitu mudahnya kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman ataupun rekan kerja tanpa mengenal tempat dan waktu. Begitu mudahnya pertukaran informasi dan berbagai media berseliweran setiap hari di *gadget* kita. Dalam sosiologi segala macam *platform* medsos yang saya sebut di atas masuk dalam salah

satu saluran sosialisasi: media massa.

Bersosialisasi adalah sebuah kebutuhan. Dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan bersosialisasi (*social need*) adalah tingkatan kebutuhan ketiga setelah kebutuhan dasar fisik dan kebutuhan akan rasa aman terpenuhi. Manusia cenderung menginginkan untuk menjalin hubungan secara sosial, manusia membutuhkan afiliasi dan berinteraksi dengan sesama ataupun lawan jenisnya. Oleh karena kebutuhan bersosialisasi inilah *platform* medsos sebagai ajang sosialisasi semakin populer.

Kekuatan media sosial inilah yang sekarang banyak digunakan oleh kelompok Islam yang terindikasi radikal untuk menyebarkan paham intoleran dan hasutan yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan umat Islam sendiri. Isinya banyak bertentangan dengan akidah Aswaja sebagaimana dianut oleh kaum Nahdliyin dan juga Pancasila. Propaganda yang mereka sebarkan terkesan sangat rapi dan massif. Mereka banyak meng-*upload* konten video ceramah di Youtube dengan judul yang menarik perhatian sehingga gampang memikat *viewer*. Isi dari video tersebut banyak mengandung propoganda secara implisit, sering juga eksplisit.

Misalnya, tentang salah video dari seorang ustaz yang menayangkan pelarangan kepada para siswa menyanyikan lagu kebangsaan. Sangat jelas hal tersebut bertentangan dengan kehidupan berbangsa. Kanal Youtube dengan konten seperti itu ada puluhan dengan ratusan ribu *subscriber*.

Di media sosial berbasis foto *sharing* seperti Instagram, lebih banyak lagi akun propoganda dengan konten yang sama. Lebih banyak foto dan video yang diunggah dan lebih mudah untuk disimpan dan di-*share* ulang oleh *followers*-nya. Tak sedikit juga konten dukungan terhadap sistem *khilafah* yang mudah sekali kita temukan. Selain itu banyak pula konten yang menyalahkan atau mem-*bid'ah*-kan amalan yang selama ini dilakukan kaum Nahdliyin. Pengikut dari kelompok ini kian hari kian banyak. Mereka memanfaatkan *bandwagon effect* dalam media sosial. *Bandwagon effect* adalah kecenderungan orang untuk mengikuti perilaku, gaya, bahkan cara berbicara orang lain karena orang lain melakukan itu. Dalam media sosial, ketika ada teman yang men-*share* sebuah foto atau video kita jadi ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Itulah kenapa banyak sekali informasi yang menyebar lewat *broadcast* di aplikasi *chatting* maupun di beranda medosos kita. Karena manusia mempunyai kecenderungan untuk diakui dan diterima dalam sebuah kelompok sosial. Sederhananya, kita merasa semakin diterima dengan menjadi sama dengan orang lain.

Efek negatif dari *bandwagon effect* ini adalah tidak mempertimbangkan logika dan kebeneran dari apa yang diikuti, tanpa mericek dan tanpa *tabayun*. Sehingga ketika ada teman *posting* atau mengunggah sesuatu di media sosial kita dengan mudah melihat, membaca dan mengikutinya. Tidak peduli apakah yang diunggah tersebut benar atau *hoax*. Selain itu masih ada beragam *website*, Facebook dan Twitter yang menjadi tempat mereka untuk "berdakwah" digital. Portal-portal tersebut banyak dijadikan rujukan sebagian orang Islam yang kaku dalam beragama.

Dakwah Digital NU

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, selalu berpegang teguh untuk menjaga persatuan dan toleransi tanpa mengabaikan budaya tradisi kearifan lokal. NU menganut paham *Ahlussunah wal jamaah*, jalan tengah dari paham ektremis *aqli* dan ektremis *naqli*. Pendekatan dakwahnya mengikuti metode Walisongo dulu, sosialisasi kepada *grassroot* dengan menggunakan pendekatan budaya sebagai salah satu elemen penting dakwah Islam di Tanah Air. Dewasa ini, NU harus lebih serius menggarap ladang dakwah digital untuk menghadapi gempuran dari propoganda dan hasutan kelompok radikal yang sangat massif pergerakannya di dunia maya.

Sejatinya NU sudah membentuk perangkat pelaksana program yang menyosialisasikan ajaran Aswaja via media massa cetak maupun elektronik dan *platform* medsos seperti Facebook, Twitter, WA dan lain sebagainya di bawah naungan Aswaja NU *Center*. Akun Instagram resmi NU yang dikelola PBNU mempunyai empat puluh tujuh ribu pengikut. Di twitter nu_online dua ratus tiga sembilan ribu pengikut. Dan di Facebook NU_online mempunyai sekitar sembilan ratus ribu pengikut. Akun *official* tersebut juga masih rutin mengunggah berita-berita ke Nuan. Namun, menurut saya konten dari media tersebut masih belum cukup untuk membendung gencarnya propoganda dan hasutan dari kelompok lain. Karena kontennya didominasi oleh berita-berita yang hanya akan dibaca oleh warga NU sendiri. Hemat saya, konten akun *official* tersebut harusnya lebih menarik, dengan *edit*-an yang kekinian dan mengikuti tren. Sehingga kader-kader NU percaya diri untuk

mengunggahnya di akun sosial media masing-masing.

Contohnya konten berisi tentang masalah akidah dan fikih kontemporer yang banyak dicari di internet. Saat ini orang lebih tertarik *googling* jika ingin mencari tahu sesuatu daripada mencari sumber referensi yang kompeten. Taruhlah mencari hukum memilih pemimpin non Muslim, tata cara salat yang benar, hukum amalan *yasinan* sebagai contohnya. Generasi milenial lebih tertarik untuk mengetikkan kata tersebut di halaman *google* dibandingkan membaca kitab atau *ngaji* kepada ulama. Dan hasil yang keluar didominasi konten dari kelompok yang mengaku-ngaku paling *nyunnah*. Tak salah jika kemudian pengikut kelompok radikal terus bertambah.

Konten alternatif sangat diperlukan untuk membendung golongan radikal yang selalu berupaya menyerang dan menyebarkan konten-konten kaku dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Pemahaman yang mereka sebarkan sangat tekstual tanpa melihat konteks. Sehingga gampang menyalahkan dan mem-*bid'ah*-kan kelompok lain. Ketika sudah dipengaruhi oleh pemikiran kaku semacam ini, masyarakat Indonesia akan sampai pada level tidak siap dengan pluralisme di Indonesia.

NU di dunia nyata sangat besar, namun di dunia maya masih kalah pamor dengan kelompok lain. Kelemahan di dunia maya inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk mengesankan bahwa NU itu kecil. Kalau hal ini tidak disikapi dengan serius, bibit radikalisme akan terus bermunculan, seperti bom waktu yang tinggal menunggu saat meledak. NU harus mengisi celah tersebut dengan menyebarkan paham Islam yang moderat dan toleran di dunia maya. Dunia maya adalah lini dakwah yang potensial

untuk terus melanjutnya ideologi *Ahlussunnah wal jamaah*, yang berkomitmen untuk selalu menjaga keutuhan NKRI.

Sebagai pamungkas, saya ingin mengutip perkataan dari Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawarsa yang mengatakan bahwa dunia maya adalah ruang pertarungan yang mesti direbut untuk menyebarkan konten-konten keagamaan yang toleran dan damai. Dan ini adalah PR kita semua, sebagai kader NU era milenial.

D. Modernisme dalam Kepungan Paham Radikal

Oleh Didin Wahyudin

Belakangan ini, perbincangan mengenai Islam radikal kembali menyeruak ke permukaan dan sempat menjadi isu nasional. Bahkan ada yang menyebut bahwa Indonesia sedang dalam "darurat radikalisme". Seketika Islam radikal menjadi *common enemy* karena dianggap berbahaya, baik dalam konteks beragama maupun konteks bernegara. Dalam konteks beragama, Islam radikal dianggap bisa menjadikan umat Islam semakin terpecah belah. Sedangkan dalam konteks negara, kelompok ini dianggap mengancam keutuhan bangsa karena ingin mengubah sistem negara yang mereka anggap *thagut* dan kafir, dengan sistem *khilafah*.

Secara pribadi, saya tidak merasa begitu terganggu atau terancam dengan keberadaan kelompok Islam radikal, Islam salafi, Islam liberal, maupun lainnya. Tapi secara sosial, mau tidak mau saya harus merasa terganggu sebab tak jarang kelompok Islam radikal menjadi *biang kerok* di masyarakat.

Saya punya sebuah cerita. Menjelang akhir Ramadhan 2016, saya dicurhati oleh seorang *ajengan* (kiai). Ia menuturkan perihal seorang warga kampung kami yang lama merantau ke kota. Begitu pulang ke kampung, dia mengaku sudah menjadi ustaz. Si ustaz mulai "minta

jatah" untuk mengisi ceramah di berbagai pengajian rutinan kampung. Awalnya sempat disambut baik oleh pak Kiai dan warga, karena ada regenerasi pendakwah di kampung kami. Tapi ternyata pada pengajian perdananya saja, kuping pak kiai dan jamaah pengajian dibuat panas karena isi cermahnya mencela tradisi-tradisi keagamaan warga kampung. *Tahlilan, maulid, Qunut*, tarawih 23 rakaat, *selamatan*, disebutnya sebagai *bid'ah* dan ziarah kubur disebutnya syirik.

Setelah kejadian itu, kata pak kiai, beberapa kali pendakwah keliling datang ke kampung kami dan biasanya tinggal di masjid-masjid kampung barang dua-tiga hari untuk berdakwah. Namun tema dan isi dakwahnya tidak jauh berbeda: mem-*bid'ah*-kan tradisi-tradisi keagamaan masyarakat. Ini membuat warga kampung yang—maaf—umumnya awam menjadi resah dan bingung.

Cerita ini *mutawattir*. Periwayatnya bukan hanya pak kiai, melainkan juga dari warga kampung mengenai para ustaz yang muatan cermahnya berisi penyerangan terhadap tradisi keagamaan mereka. Beruntung, *the power of kiai kampung* bisa membuat warga yang sempat resah kembali tenteram dan tidak memedulikan ceramah-ceramah dari ustaz dadakan tersebut.

Radikalisme: Dulu dan Kini

Radikalisme serupa tapi tak sama dengan fundamentalisme, ektremisme, revivalisme atau terorisme. Tapi kesemuanya memiliki ciri dan watak yang sama persis, sikap keras, baik keras secara pemikiran ataupun keras dalam tindakan/gerakan (Mujamil Qomar, 2012). Sikap beragama seperti

ini telah ada sejak masa Islam klasik. Nama Khawarij hampir pasti berada pada *list* teratas sebagai pelopor paham radikal-fundamental Islam. Sikapnya yang keras membuat Ali bin Abi Thalib, keponakan sekaligus sahabat nabi wafat terbunuh oleh pemuda yang konon ahli ibadah, rajin puasa, dan penghafal Qur'an bernama Abdurahman Ibn Muljam, seorang Muslim dari kelompok Khawarij (Said Aqil, 2014).

Dalam dunia Islam modern, berbicara tren Islam radikal maka tidak lepas dari nama Muhammad Ibn Abdul Wahhab, pendiri atau pelopor paham/gerakan Wahabi. Abdul Wahab banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah, yang juga dianggap sebagai pelopor fundamentalisme modern. Tapi sepertinya Abdul Wahab memiliki pemahaman yang lebih radikal dari Ibnu Taimiyah. Menurut Khaled el-Fadl, ajaran Abdul Wahab menekankan umat Islam hanya pada dua pilihan: menjadi orang yang benar-benar beriman atau tidak. Dan jika seseorang memilih tidak beriman—menurut standar Abdul Wahab—maka jelas telah kafir (Khaled Abou el-Fadl, 2005).

Selain takfirisme, kelompok Wahabi juga paling getol menyerang berbagai tradisi keagamaan Islam, termasuk tasawuf dan filsafat yang mereka sebut *bid'ah* dan kesesatan karena datang dari luar Islam. Dengan jargon pemurnian Islam, kelompok ini tidak segan-segan melakukan berbagai aksi kekerasan. Berbagai peninggalan-peninggalan sejarah tidak segan mereka hancurkan karena menurut mereka akan menjerumuskan umat Islam pada kemusyrikan.

Sikap beragama seperti ini sebenarnya telah mendistorsi logika berpikir umat Islam. Dengan cara

memahami agama secara tekstualis tersebut maka tidak heran jika mereka sangat mudah melabeli siapa pun di luar kelompoknya sebagai orang sesat, ahli *bid'ah*, pelaku syirik dan kafir. Sampai-sampai kata *bid'ah*, sesat dan syirik—menurut Gus Mus—seolah menjadi latah yang sulit disembuhkan. Dan sangat disayangkan bahwa paham radikal seperti ini sedang membiak di Indonesia, yang tidak lain merupakan negara Muslim terbesar yang syarat dengan berbagai tradisi keagamaan.

Tantangan

Islam Indonesia merupakan *prototyp*e Islam moderat (*tawasuth*), tidak radikal-fundamental dan tidak juga sekuler-liberal, hal itu karena cara beragama Muslim Indonesia merujuk pada keseluruhan produk dari berbagai interaksi: umat Islam, teks-teks keagamaan, dan situasi yang melingkupinya.

Cara beragama seperti inilah yang sesungguhnya menjadikan Islam Indonesia itu menarik dan unik. Maka tidak mengherankan jika banyak tadisi Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonseia. Tradisi Islam tidak harus dipandang suatu kesesatan, tapi justru menunjukan bahwa Islam itu selalu mampu berdialektika, tidak antipati terhadap tradisi sehingga Islam diterima dengan baik. Maka dalam konteks ini "perselingkuhan" antara agama dan tradisi adalah niscaya (Said Aqil, 2014).

Berpuluh tahun umat Islam Indonesia hidup rukun dalam keragaman dan perbedaan karena tingginya sikap toleransi dan sikap saling menghargai perbedaan. Namun belakangan umat Islam Indonesia sepertinya sedang asik

tukaran seiring munculnya kelompok-kelompok radikal yang dengan mudah mengobral kata-kata *bid'ah*, syirik, sesat dan kafir. Apalagi mereka semakin masif dalam menyebarkan pahamnya melalui berbagai ceramah-ceramah, termasuk melalui radio dan televisi yang mereka miliki. Terkadang, dengan bahasa dan caranya yang halus, banyak orang terpesona sehingga mereka mulai meninggalkan *tahlil, shalawat*, maulid Nabi dan berziarah karena takut jadi ahli *bid'ah*. Begitu pulang ke kampung langsung jadi ustaz, persis ustaz dadakan di kampung saya dulu.

Serangan kelompok radikal yang kian gencar telah direspon oleh banyak kalangan. Dan tentu saja oleh NU sebagai ormas keagamaan "tradisional" yang senantiasa melestarikan tradisi-tradisi keagamaan Islam. Jelas bahwa NU menjadi yang pertama mendapat "serangan" kelompok radikal maka NU juga menjadi yang terdepan dalam meng-*counter* paham dan gerakan radikal.

Pelan namun pasti, Islam radikal terus berkembang. Bahkan kelompok radikal juga sudah mulai masuk ke tubuh NU. Beberapa kantong NU justru direbut oleh beberapa ormas yang pahamnya sangat bersebrangan dengan NU. Hal ini, menurut Zuhairi Misrawi dalam (Abdullah Ubaid [ed.], 2015) karena NU belum mampu membentengi paham moderatnya ke dalam dan tidak mengembangkannya ke luar komunitasnya. Moderasi yang diusung NU hanya pada tataran wacana yang belum sepenuhnya diterjemahkan dalam realitas sosial. Ini tentu menjadi tantangan yang tidak bagi NU.

Maka, NU harus memiliki strategi yang lebih elegan dalam mengerem laju kelompok radikal. Bukan hanya–misalnya–dengan membubarkan paksa pengajian-pengajian mereka dan bisa menimbulkan gesekan-gesekan fisik. Karena cara kekerasan justru bisa jadi mengesankan kalau NU juga senang melakukan cara-cara kasar dan tindak kekerasan.

Cara yang bisa dilakukan adalah dengan meneguhkan kembali paham moderat (*tawassut*) yang selama ini melekat pada tubuh NU pada seluruh lapisan masyarakat, terutama Nahdiyin. Sehingga sikap moderat benar-benar dipahami dan diterjemahkan dalam berbagai sendi kehidupan: beragama, bermasyarakat dan bernegara. Konsep moderasi yang diusung NU harus dipahami dan diaktualisasikan bukan hanya oleh kelompok elit melainkan harus mampu dipahami kelompok akar rumput yang berada di desa dan kampung-kampung. Karena orang desalah yang selalu setia menjaga dan menjalankan tradisi-tradisi Islam. Sedang mereka umumnya sangat taat terhadap ritual agama tapi, sekali lagi maaf, masih awam dan tidak tahu bagaimana bersikap dan menghadapi gelombang paham radikal. Sebagaimana di kampug saya tadi, secara tradisi mereka sangat NU, tapi tidak banyak yang tidak tahu tentang NU. Sehingga begitu datang paham yang berbeda, mereka gagap dan kalap.

Selanjutnya, benar yang dikatakan Zuhairi Misrawi, bahwa NU harus mampu mengenalkan dan mengembangkan sikap moderat ke luar komunitas NU agar modernisme yang dikembangkan NU tidak diterjemahkan secara keliru. Tema Muktamar NU ke-33 Jombang 2015 misalnya,

"Meneguhkan Islam Nusantara" oleh beberapa orang masih saja diterjemahkan secara salah kaprah. Beberapa kelompok begitu khawatir jika ajaran Islam yang dibawa Rasulullah lambat laun akan lenyap karena menganggap Islam Nusantara akan menjadikan agama Islam harus tunduk pada budaya lokal.

Padahal "Islam Nusantara" tidak bermaksud menjadikan Indonesia seperti negara Turki, yang mengubah azan ke dalam bahasa mereka. Tidak juga bermaksud memisahkan agama dari negara hingga menjadi sekuler atau mengubah *assalamu' alaikum* dengan selamat pagi atau *sampurasun*. Melainkan ingin meneguhkan identitas Islam Indonesia yang ramah dan damai, akomodatif terhadap tradisi, mencintai agama dan bangsanya demi Islam yang lebih maju. Maka penting kiranya untuk terus berdialog dan memberikan pemahaman pada setiap lapisan masyarakat bahwa sikap moderatlah yang saat ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kerukunan beragama dan bermasyarakat juga demi keutuhan berbangsa dan bernegara.

Wallahul muwaffiq illa aqwami thariq…..

E. Membaca Radikalisme Agama dan Problem Toleransi di Indonesia

Oleh Abduloh Safik

Sebuah harapan untuk mewujudkan perdamaian semakin terasa muskil, terutama setelah banyak kalangan mengaitkan aksi kekerasan dengan agama. Kendati kekerasan terjadi di mana-mana sekaligus melibatkan semua agama besar, namun dunia Barat kerapkali menghubungkan kekerasan dengan Islam, bahkan melebihi agama lain. Atas fenomena ini beberapa pihak yang selalu berkutat dengan teori konspirasi selalu menjawab dengan standar mereka. Beberapa pihak menganggap bahwa berita radikalisme, terorisme dan sebangsanya adalah konspirasi dari Amerika, Israel dan kelompok Zionis, terutamaa saat tragedi penyerangan menara kembar WTC 11 September 2001 di Amerika. Hal demikian, semakin memperkuat stereotipe negatif Islam di mata penduduk dunia.

Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus konflik kekerasan berlatarbelakang agama yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya mengagetkan warga Indonesia, tapi juga kalangan luar yang sebelumnya mengenal Indonesia sebagai bangsa yang ramah, toleran dan santun. Potensi dan ekstensitas konflik kekerasan di masyarakat kita akhir-akhir ini telah melibatkan penganut agama-agama dengan tingkat kekejaman yang sulit

diterima akal sehat (Mun'im Sirry, 2015). Dari sini kita sangat prihatin terhadap kondisi bangsa kita padahal bangsa Indonesia sering memberi kebanggaan sebagai bangsa yang memiliki tingkat toleransi dan kerukunan beragama yang amat tinggi.

Bila dicermati, letupan konflik agama itu muncul seiring dengan kebangkitan fenomena global radikalisme agama. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diteliti oleh Karen Amstrong (2000) dengan istilah fundamentalisme agama. Ia menyebut bahwa fundamentalisme agama merupakan fenomena paling menakjubkan di awal abad ke-21 ini dan mencapai titik klimaksnya pada peristiwa 11 September kelabu itu. Dengan demikian, melalui slogan-slogan anti-Barat yang mengiringi peristiwa tragis itu, cukup aman untuk dikatakan bahwa serangan teroris adalah benturan antara peradaban Yahudi-Kristen Barat—yang sarat dengan nilai-nilai kebebasan, pluralisme, dan sekularismenya—dengan apa yang disebut Islam "autentik" anti Barat.

Skema intelektual semacam ini mudah dipahami bila kita membicarakan teologi Osama Bin Laden, Taliban, Wahabisme Arab Saudi dan organisasi jihad lainnya. Perilaku teologis kaum Muslim radikal ini bukan saja bersebarangan secara fundamental dengan cara hidup Barat melainkan juga dengan gagasan masyarakat dunia atau nilai-nilai kemanusiaan universal. Mereka mengedepankan eksklusivitas dan intoleransi serta supremasi nafsu perang *vis-a-vis* yang lain. Menurut cara pandang mereka, Islam adalah satu-satunya jalan hidup dan harus dijalankan apa pun dampaknya terhadap hak-hak dan kebaikan orang lain.

Dalam konteks ini akhirnya kita mengerti mengapa kaum Muslim radikal menganggap hidup yang dicurahkan untuk menjunjung tinggi aturan hukum seperti itu sebagai superior terhadap cara-cara hidup yang terhormat (Mun'im Sirry, 2015: 184). Cara pandang demikian sangat menimbulkan keresahan dan memicu ketidakadilan yang merata di semua aspek kehidupan, baik ketidakadilan sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Ketidakadilan yang nyata itu juga menimbulkan potensi radikalisme yang tidak bisa ditampik. Radikalisme struktural yang ditampilkan oleh media dan pengetahuan Barat yang mendiskreditkan Islam, seringkali juga menyulut kekerasan, seolah-olah meyakinkan kaum radikal bahwa radikalisme harus dimanifestasikan dalam tidakan aktual.

Radikalisme dalam Bingkai Sejarah Islam

Masih menurut Mun'im Sirry (2015: 185), sebuah keyakinan dengan dalih atas nama agama, menganggap mereka yang beriman memiliki nilai khusus yang membedakannya dari penganut agama lain. Dengan demikian, ajaran supremasi kelompok radikal sangat distingtif dan berbahaya. Alam pikiran mereka mempunyai elemen-elemen supremasi yang berorientasi kepada dominasi kultural dan politik. Kelompok-kelompok tersebut tidak merasa cukup dengan hidup sesuai dengan diktum lain. Semua jalan hidup yang berbeda dengan jalan mereka danggap sebagai kejahatan terhadap Allah dan karenanya harus dilawan dan diperangi.

Kemunculan radikalisme Islam tidak membuat sesuatu hal yang simpatik, sebagian sistem keagamaan mengalami gejala serupa dalam perjalanan sejarahnya.

Dalam komunitas agama terdapat kelompok yang mengedapankan ekstremisme absolutis. Pada abad pertama Islam, kaum radikalis keagamaan dikenal dengan nama Khawarij yang telah membunuh banyak orang Muslim dan non Muslim, dan mereka bertanggung jawab terhadap pembunuhan keponakan dan sahabat nabi, yaitu *Khalifah* Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah dan 'Amr bal-'Ash (M. Ayoub, 2003: 142). Namun setelah sekian abad berada dalam pertumpahan darah, mereka menjadi moderat. Hal ini menjadi satu pelajaran menarik yang dapat kita petik, bahwa kelompok-kelompok ekstremis terlempar dari *mainstream* Islam.

Saat ini, Islam berada dalam gelombang pergeseran yang tak dapat dibendung, berbeda dengan apa yang dialami masa lalu. Peradaban Islam mengalami disintegrasi dan institusi-institusi tradisionalnya yang semula menyanggah dan mendakwahkan ortodoksi Islam ekstremisme telah mengalami kehancuran. Namun kemudian pada masa Umayyah dan Abbasiyah, keberadaan institusi tradisional tersebut difasilitasi sepanjang tidak menganggu wilayah kekuasaan *khalifah*. Ulama pada masa itu mengemban fungsi ganda: memprsentasikan kepentingan negara terhadap masyarakat, dan kepentingan masyarakat terhadap negara. Secara tradisional epistemologi Islam ditolerir dan bahkan disambut hangat sehingga menghasilkan beragam pendapat dan mazhab fikih.

Kalangan Muslim radikal mengkonstruksi teologi ekslusif dan intoleran mereka dengan membaca ayat-ayat al-Qur'an secara terisolasi. Seolah maknanya transparan sehingga pertimbangan ide-ide moral dan konteks

historisnya tidak relevan bagi penafsiran mereka. Padahal sesungguhnya mustahil untuk menganalisis ayat-ayat tersebut tanpa meletakkannya dalam konteks dimasa ayat itu turun dan mengaitkannya dalam konteks kekinian. Adapun al-Qur'an sendiri merujuk pada noktah-noktah moral yang bersifat generik, seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan ('*adl*), kepatutan (*ikhsan*), dan kebaikan (*ma'ruf*). Al-Qur'an tidak mendefinisikan kategori-kategori tersebut sebab mengasumsikan bahwa para pembacanya telah memiliki ketulusan moral tertentu (Mun'im Sirry, 2015: 192).

Lebih dari itu, dalam studi Islam melalui pendekatan sosiologis, berkembang beragam pendapat tentang latar belakang muncul dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan, antara lain: *pertama*, kesepakatan para majelis ulama yang mengkaji dan melihat bahwa muncul dan berkembangnya aliran keagamaan oleh ketidaktahuan para penganutnya terhadap ajaran Islam dan berbagai aspeknya. *Kedua*, Azyumardi Azra mengatakan muncul dan berkembangnya beragam aliran atau paham keagamaan yang menyimpang dari paham keagamaan yang berlaku dipercepat oleh kenyataan berlangsungnya perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang begitu cepat dan sedikit latah, dan juga disebabkan oleh globalisasi yang menimbulkan disorientasi, dislokasi psikologis dalam masyarakat tertentu. *Ketiga*, terindikasi kuat terjadi fragmentasi otoritas atas interpretasi teks kitab suci, yang beimplikasi pada pergeseran otoritas keagamaan, pergeseran posisi sentral ulama dalam masalah-masalah agama yang merupakan fenomena alamiah seiring telah terjadinya ortodoksi Islam dari Makkah-Arab ke belahan

dunia lain seperti Mesir, Iran, Suriah. Pergeseran ortodoksi ini terus berlangsung ke Indonesia hingga sekarang (R. Aditya, 2014).

Bila menilik dari sejarah ini, tindakan kekerasan mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh beberapa kelompok aliran sangat tidak bisa diterima dalam ajaran Islam. kecenderungan penafsiran yang mereka lakukan secara skriptual dan jumud seperti ini mengakibatkan Islam jauh dari cita-citanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tekanan dan penindasan Barat dari media dan pengetahuan, harus dihadapi dengan pola pikir sehat. Ditambah lagi, watak Islam dalam rentetan sejarah itu, kendati berada pada posisi minoritas tak lantas menjadi keras.

Adapun dalam al-Qur'an, Islam menegaskan dengan kalimat gamblang bahwa membunuh seorang manusia, sama halnya dengan membunuh seluruh manusia. Lantas bagaimana mungkin kaum radikal, mampu menolak ayat al-Qur'an dan membandingkan ini dengan ayat *jihad* yang ditafsirkan secara serampangan.

Dengan demikian jelas sudah bahwa ketidakmampuan mereka membaca sejarah, ditambah dengan ideologi radikal yang bukan saja anti Barat, namun juga terjerumus pada anti kritik dan anti perbedaan telah membawa mereka pada ideologi kekerasan yang dilabeli agama. Peledakan bom di negara mayoritas Muslim seperti di Indonesia adalah contoh jelas bahwa senyatanya mereka bukan lagi membela ajaran Islam, melainkan sudah berkembang jauh ke arah politis, penguasaan dan pendirian negara-negara yang mereka inginkan dengan selubung negara Islam (al-Fikrah: edisi 89: 2015). *Wallahu a'lam bil al-Showab.*

F. Ancaman Gerakan Radikalisme Agama bagi Keutuhan NKRI dan Upaya Pencegahannya

Oleh Mukhamad Sukur

Perkembangan gerakan radikalisme agama di dunia termasuk Indonesia sudah sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu kelompok radikal yang cukup menyita perhatian dunia saat ini adalah kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Pasalnya, sejak berdirinya pada tahun 2014, ISIS telah menciptakan bencana kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok radikal ISIS hampir setiap hari bisa kita jumpai, baik melalui media cetak maupun elektronik. Puluhan ribu nyawa melayang akibat aksi brutal yang dilakukan oleh mereka. Aksi pembunuhan yang mereka lakukan sangat sadis, ada yang dipenggal kepalanya, ditembak, dimasukkan ke dalam jeruji besi kemudian dibakar, dikubur hidup-hidup, digantung, dimasukkan ke dalam mobil lalu diledakkan, diseret dengan menggunakan mobil sampai mati, dst. Korbannya pun tak pandang bulu, mulai dari orang dewasa, perempuan bahkan anak-anak kecil sekalipun. Kelompok radikal ISIS juga tak segan-segan merusak dan menghancurkan tempat-tempat suci

yang dihormati umat Islam termasuk situs-situs bersejarah yang merupakan warisan kebudayaan dan peradaban Islam.

Saat ini, ISIS tidak hanya sekadar kelompok radikal yang melakukan aksi terorisme dan menciptakan ketakutan bagi masyarakat yang ada di negara Irak dan Suriah bahkan masyarakat dunia. Namun lebih dari itu, ISIS telah menjelma menjadi sebuah negara mini yang suatu saat nanti bisa saja menjadi negara yang utuh sebagaimana cita-citanya: mendirikan *Daulah Islamiyah* atau Negara Islam. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan ISIS yang mampu mengerahkan lebih dari 30 ribu pasukan yang tidak dimiliki oleh kelompok radikal lain seperti Al-Qaeda. ISIS melakukan infiltrasi militer, merebut dan menduduki suatu wilayah yang dikuasainya dengan cepat, bahkan memiliki kekuatan tempur yang hampir setara dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Pengaruh kelompok radikal ISIS ini telah melampaui batas-batas wilayah yang dikuasainya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah anggota ISIS yang mencapai 170 ribu orang yang berasal dari 40 negara di dunia termasuk ada juga yang berasal dari Indonesia.

Kekerasan Berkedok Agama

Kekerasan yang berkedok agama sesungguhnya bersumber dari manusia, bukan agama. Karena secara normatif agama-agama di dunia ini menebarkan kasih sayang dan rahmat, bukan kekerasan, laknat apalagi melakukan pembunuhan dengan alasan yang tidak dibenarkan. Salah satu tujuan dari diturunkannya kitab suci al-Qur'an adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan

di dunia dan akhirat. Perdamaian itu masuk bagian dari kebaikan, jadi sudah jelas al-Qur'an akan mengajarkan kebaikan dan melarang perbuatan yang buruk sebagai mana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِين

Artinya: *Dan tiadalah Kami utus engkau (ya Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam* **(QS. Al Anbiya 107).**

Kata "*rahmah*" dalam pemaknaan Said Aqil Siroj, (2015), berasal dari bahasa Arab yang maknanya ialah kelembutan, pengampunan dan kasih sayang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata "rahmat" mempunyai makna kebajikan dan belas kasih. Memang belum semua komunitas Islam menerapkan ajaran Nabi Muhammad secara *kaffah*, termasuk menerapkan ajaran bermasyarakat sebagaimana tertuang dalam piagam madinah yang mencerminkan keluhuran peradaban itu.

Adapun gerakan radikalisme dipengaruhi oleh beberapa hal. *Pertama*, karena pemahaman keagamaan yang dangkal, bukan hanya kurang belajar tetapi mereka sengaja tidak mau masuk kedalam ruh agama, hanya memahami agama dari kulit luarnya saja. Pola keberagamaan seperti ini membuka peluang yang cukup besar dalam pembentukan pola pikir dan sikap keagamaan yang cenderung ekstrem dan eksklusif. Kelompok radikal cenderung menolak tafsir dan pemahaman agama dari kelompok lain. Bagi kelompok radikal, pemahaman agama yang benar hanyalah menurut mereka. Kelompok yang tidak sepaham dengan mereka dianggap salah, *bid'ah*, *khurafat, toghut*, musyrik, kafir bahkan boleh dibunuh walaupun sama-sama beragama Islam.

Munculnya kekerasan yang berkedok agama juga disebabkan oleh adanya monopoli pemahaman terhadap teks atau *nash* al-Qur'an. Ada beberapa teks atau *nash* al-Qur'an yang seolah memerintahkan kekerasan. Teks semacam itu sangat tergantung kepada pembacanya. Apabila dibaca dengan semangat kekerasan maka teks itupun akan menjadi legitimasi aksi kekerasan. Begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dalam membaca teks-teks hukum, terutama yang terkait dengan ayat-ayat tentang jihad. Sebab dibutuhkan pengetahuan tentang *asbabul nuzul, asbabul wurud* serta penguasaan kaidah-kaidah pembacaan teks yang baik. Sehingga makna teks tidak keluar dari konteksnya.

Kedua, gerakan radikalisme merupakan reaksi atas ketidakpuasan dan frustasi atas modernitas dan perubahan yang tengah terjadi. Kelompok radikal beranggapan bahwa, berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia seperti persoalan kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, pergaulan bebas, maraknya narkoba, meningkatnya pelaku kejahatan dan semakin banyaknya pejabat yang melakukan korupsi merupakan akibat dari penerapan sistem pemerintahan yang sekuler. Penganut Islam radikal beranggapan bahwa permasalahan itu hanya bisa diselesaikan dengan menerapkan Islam secara *kaffah*: mengganti hukum positif dengan penerapan syariat Islam atau hukum Islam, mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan *Daulah Islamiyah* atau Negara Islam, mengganti asas atau dasar negara Pancasila dengan asas Islam, mengganti UUD 1945 dengan al-Qur'an dan hadis serta mengganti presiden dengan sebutan *khalifah*.

Membendung Gerakan Radikalisme

Maraknya gerakan radikalisme agama sudah menjadi fakta dan peristiwa yang menjadi bagian dari persoalan semua negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan banyaknya warga negara di dunia termasuk warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Bahkan sampai dengan saat ini, ISIS sudah melakukan ekspansi ke beberapa negara mulai dari Irak, Suriah, Libya, Mesir, Nigeria, Turki, dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, termasuk Indonesia. Peristiwa Marawi dan bom bunuh diri yang terjadi di kampung Melayu, Jakarta yang menewaskan tiga polisi menunjukkan bahwa ISIS benar-benar menjadi ancaman serius bagi negara-negara yang ada di Asia Tenggara.

Negara Indonesia sangat rentan terhadap berkembangnya gerakan radikalisme dan terorisme. Karena banyaknya jaringan-jaringan radikalisme dan terorisme yang masih hidup di negara multikultural ini. Beberapa organisasi yang ada di Indonesia mempunyai cita-cita dan tujuan organisasi yang hampir sama dengan kelompok militan ISIS, seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansoru Tauhid (JAT), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Fron Pembela Islam (FPI). Dari sisi epistemologi, kelompok tersebut mempunyai kemiripan dalam hal cita-cita dan tujuan organisasi.

Masyarakat khususnya generasi muda harus dilindungi dari paham radikalisme. Kita harus mengkampanyekan gerakan anti radikalisme mulai dari lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk membendung penyebaran paham radikalisme dan

terorisme, dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Pertama, memberikan pemahaman agama yang utuh dan komprehensif kepada masyarakat terutama berkaitan dengan ayat-ayat jihad. Jihad tidak harus mengangkat senjata apalagi membunuh sesama saudara, tetapi lebih dari pada itu mengendalikan hawa nafsu, mengajak kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan mendakwahkan agama dengan cara yang ramah dan santun.

Kedua, melakukan sosialisasi empat pilar negara kepada seluruh komponen masyarakat, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar negara tersebut merupakan pilihan yang sangat realistis dengan kondisi Negara Indonesia yang sangat heterogen dan majemuk, mulai dari sisi agama, bahasa, suku, adat istiadat dan membentang ribuan pulau mulai sabang sampai meraoke. Sebenarnya pembahasan tentang empat pilar negara tersebut sudah purna sebab telah melalui pembahasan yang cukup panjang yang dilakukan oleh *founding fathers* atau para pendiri bangsa. Tugas kita adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam emapt pilar tersebut.

Ketiga, membendung upaya propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media. Media mempunyai peranan sangat strategis dan efektif yang dapat memengaruhi situasi, baik lokal, regional, nasional maupun internasional dalam berbagai hal. Kekuatan media dapat dijadikan alat untuk memengaruhi dan mengubah cara pandang dan opini masyarakat terhadap sesuatu, utamanya yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan dan negara. Kelompok ISIS menggunakan media untuk melakukan propaganda

dalam memengaruhi calon anggota yang direkrut termasuk melakukan teror kepada masyarakat luas. Banyak sekali foto-foto dan video yang diunggah melalui media sosial dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat yang melihatnya.

Keempat, membatasi ruang gerak kelompok radikal yang akan mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan yang radikal dan membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan ekspansi ke berbagai wilayah atau negara. Hal ini bisa dilakukan dengan mengamati dan mendeteksi sejak dini munculnya gerakan radikal yang muncul di masyarakat. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh komponen masyarakat utamanya tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat, TNI dan Polri dalam menghalau gerakan radikal yang akan muncul di masyarakat. Dunia pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Mengingat sekolah dan perguruan tinggi merupakan lahan subur yang cukup potensial untuk tumbuh dan berkembangnya gerakan radikal. Faktanya banyak siswa, mahasiswa bahkan guru dan dosen sudah terpengaruh oleh paham radikal, utamanya kampus-kampus yang basiknya umum.

Kelima, mengampanyekan wawasan Islam Nusantara yang telah terbukti ketangguhannya dalam membimbing masyarakat Muslim Indonesia melalui perjalanan sejarahnya hingga mewujud dalam tatanan sosial-politik yang modern dan demokratis sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Islam Nusantara menawarkan gagasan pemikiran, nilai-nilai dan prinsip keadilan, kesetaraan, moderat serta toleransi dalam bingkai NKRI.

G. Membaca Wajah Fundamentalisme Islam di Indonesia

Oleh Budi Harianto

Fundamentaslime tidak dapat dilepaskan dengan sejarah dalam perkembangan agama-agama samawi. Fundamentalisme terkait kuat dengan keyakinan kelompok agamawan yang selalu mencari landasan teologis dalam gerakannya bagi komunitas yang mengidealisasi masa lalu yang diyakininya sebagai sesuatu yang paling benar. Di samping keyakinan demikian, fundamentalisme melakukan usaha untuk tidak terjebak dalam *hiruk-pikuk* kehidupan dunia yang semakin maju. Ia tidak ingin agama tereduksi oleh kemajuan peradaban yang semakin kuat jauh dari agama itu sendiri.

Menurut William Montgomery Watt (2001: 140), keyakinan dalam upaya menjaga dan mempertahankan ajaran agama menjadi suatu keniscayaan dan karenanya bermakna membentengi keyakinan mereka agar selalu selaras dengan doktrin ajaran agama sehingga golongan ini hampir selalu mengidentikkan diri dengan kelompok yang dapat disebut sebagai paling taat terhadap ajaran pokok agama dan pembelaannya terhadap berbagai macam kritik. Sehingga banyak ciri umum atau karakteristik yang melekat atas individu maupun kelompok berhaluan fundamentalisme bagi agama-agama samawi di dunia

termasuk Islam. Mereka adalah kelompok yang tertutup, intoleran, keras, berorientasi ke masa lalu sebab dianggap sebagai zaman keemasan yang niscaya dihadirkan kembali ke zaman kini.

Selain intoleran, mereka juga gemar dengan kekerasan karena kuatnya obsesi untuk mengubah orang lain dan lingkungannya sesuai dengan keyakinan yang mereka imani, yakni agar orang lain kembali kepada bentuk kehidupan awal Islam persis sebagaimana praktik awalnya, hal ini sekaligus sebagai solusi pada masa kini terhadap internal umat beragama.

Dengan ciri-ciri tersebut, fundamentalisme yang pada awalnya lahir di kalangan tradisi Kristen Amerika Serikat kemudian lepas dari akar historis sehingga yang tampak adalah sebuah makna baru bagi Islam yang juga dapat disebut fundamentalisme. Kelompok fundamentalisme adalah mereka sebagaimana dalam tradisi Kristen awal memahami kitab suci (Bible) sebagai kebenaran mutlak sehingga tidak dibutuhkan tafsir terhadap kejelasan dan ketidakberubahan maksud atau maknanya. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok fundamentalisme Islam yang memahami wahyu—secara tekstual—sebagai satu-satunya sumber kebenaran mutlak disamping hadis nabi. Dengan kata lain, klaim kebenaran tunggal (*single truth*) juga menjadi ciri atau karakter bagi kelompok fundamentalisme Islam (Rumadi, 2006: 24).

Jika dilihat dalam sejarahnya, karakteristik awal fundamentalisme Islam dapat ditemukan dalam dua kemungkinan besar. *Pertama*, akar fundamentalisme dalam Islam merujuk pada generasi awal: pada masa nabi dan

sahabat yang dikenal dengan istilah *al-Salaf al-Shalih.* Akar fundamentalisme pada masa ini dalam pola atau bentuk pelaksanaan agama berpegang pada prinsip dasar agama Islam mazhab *salaf.* Dalam istilah lain, pelaksanaan keagamaan pada masa *salaf* adalah praktik keagamaan yang sederhana sebab pada masa itu implementasinya langsung merujuk sepenuhnya kepada nabi, sahabat dan para tabi'in. Tentu saja praktik sederhana masa itu tidak terkait kuat dengan problem kondisi sosial masyarakat yang tidak mengglobal.

Kedua, akar fundamentalisme—menurut Harun Nasution (1986: 31)—tampak dari adanya kaitan substansi dengan gerakan kelompok Khawarij yang muncul pada akhir pemerintahan Ali Ibn Abi Thalib. Secara historis, pada awalnya mereka adalah pendukung setia Ali yang memiliki prinsip radikal dan ekstrem, yang kemudian menyatakan diri keluar dari barisan Ali setelah selesainya keputusan sengketa dengan kelompok Muawiyah melalui jalan arbitrase. Dengan keputusan atau jalan arbitrase Ali pun telah dianggap tidak mengikuti apa yang ada dalam al-Qur'an.

Sikap fundamentalisme Khawarij tersebut dilandasi oleh pandangan teologis dalam salah satu ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 44 yang berbunyi *"waman lam yahkum bima anzalallah faulaika hum al-kafirun*" (siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah Allah turunkan maka mereka adalah kafir). Dari pandangan teologis itu mereka kemudian membuat semboyan populer "*la hukma illa lillah* (tidak ada hukum kecuali hukum Allah). Dengan pandangan tersebut mereka tidak segan menganggap

individu atau kelompok lain dengan stigma kafir atau murtad oleh karenanya harus dibunuh.

Di samping pandangannya tersebut, mereka (Khawarij) juga bersikap ekstrem dalam bidang politik. Mereka memandang orang lain yang berseberangan dengannya dianggap musyrik dan boleh dibunuh. Maka kawasan yang aman dan harus dilindungi adalah wilayah yang disebut *Dar al-Islam.* Sedangkan kawasan lainnya disebut *Dar al-Kufr* atau *Dar Harb,* suatu wilayah yang harus diperangi atau wajib dihancurkan sebab mereka dianggap tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran agama (Islam). Pola pemahaman dan praksis gerakan Khawarij ini kemudian menjadi gerakan fundamentalisme Islam pada masa berikutnya.

Bila merujuk pada data sejarah yang disajikan Ahmad Zainul Hamdi (2012: 7), kelompok Salafi pertama kali dipelopori oleh Ibn Hambal pada abad ke IV H yang menentang pendekatan keislaman Muktazilah dan para rasionalis Muslim lainnya, namun bukan berarti Ibn Hambal merupakan tokoh fundamentalisme Islam. Karakternya kemudian dilanjutkan oleh Ibn Taimiyyah (1263-1328) pada abad ke VII. Dalam rentang perjalan berikutnya kemudian dibakukan oleh Muhammad Ibn Abd Wahab (1703-1792) pada abad ke XII H, kemudian orang-orang tersebut dikenal sebagai bapak kaum fundamentalisme Islam. Dalam hal ini gerakan Salafi dengan jargonnya kembali kepada Islam murni seperti yang dipraktikkan nabi, para sahabat dan tabi'in semakna dengan fundamentalisme Islam.

Sedangkan fundamentalisme Islam di Indonesia dapat dilihat dengan adanya agenda tertentu dari kelompok

garis keras seperti Hizbut Tahrir, Wahabi, dan Ikhwanul Muslimin. Gerakan transnasional atau fundamentalisme Islam ini melahirkan gerakan-gerakan kekerasan di dunia Islam ataupun Wahabisasi global (penyebaran ideologi). Melalui gerakan terselubung ini mereka berharap bisa menyebarkan ideologinya karena kalau dilakukan secara terbuka maka masyarakat yang mengetahui tentang sejarah pembentukan organisasi yang bersifat transnasional ini pasti akan menolak. Gerakan-gerakan ini banyak memberikan dana beasiswa, penyebaran dan penerjemahan buku-buku gagasan para tokoh gerakan transnasional, pendirian lembaga pendidikan, sosial dan budaya (Abdurrahman Wahid [ed.], 2009: 48-49).

Obsesi penerapan syariah Islam sangat jelas bertentangan dengan konstitusi. Namun kelompok garis keras menemui celah untuk penerapan syariah, yaitu melalui otonomi daerah. Artinya mereka berpikir bahwa sulit untuk penerapan Islam secara konstitusional maka ditempuhlah cara yang istilahnya "desa mengepung kota"; melalui formalisasi penerapan syariah di daerah-daerah hingga nanti ketika sebagian besar daerah telah menerapkan hukum Islam secara regional maka penerapan Islam secara nasional hanyalah menunggu waktu. Agenda formalisasi hukum Islam itu adalah misi para ormas Islam seperti HTI dengan "Selamatkan Indonesia dengan Syariah", MMI dengan "Penegakan syariah memalui institusi negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi kemelut bangsa", FPI dengan "Krisis multidimensi akan berakhir dengan diberlakukannya syariat Islam" atau PKS dengan "Islam adalah solusi". Dengan demikian, alasan-alasan kelompok tersebut yang mengatakan bahwa agama

Islam adalah agama yang sempurna sangatlah tidak realistis. Karena umat beragama lain pun mengakui bahwa agama mereka (juga) yang paling sempurna.

Keberadaan gerakan-gerakan di atas merupakan konsekuensi berkembangnya paham Wahabi di negera Indonesia ini. Sebab ada keterkaitan sikap dan sifat kelompok fundamentalisme Islam di negeri ini sangat identik dengan gerakan yang terjadi di Timur Tengah. Kebanyakan pemimpin mereka adalah keturunan Arab atau setidaknya mereka pernah belajar di Timur Tengah yang kemudian kehilangan tradisi keberagamaan (Nusantara) dan berubah menjadi berhaluan Ikhwanul Muslimin atau Wahabisme. Maka gerakan pemberlakuan hukum Islam di daerah-daerah adalah suatu bentuk mengecilkan ketetapan Allah, mengecilkan keluasan rahmat Allah bahkan kebesaran Allah ke dalam kotak kecil perda syariah. Lagipula negara-negara yang telah menerapkan syariat Islam meskipun tampak islami pada faktanya degradasi moral, korupsi dan lain sebagainya tetap saja merajalela.

Oleh karena itu, beragama dengan menggunakan akal sehat merupakan salah satu alternatif menangkis pemahaman golongan fundamentalisme Islam tersebut. Hakikatnya Islam adalah moderat dan toleran yang dilandasi prinsip *rahmatan lil alamin.* Wajah Islam di Indonesia sejak awal merupakan wajah yang sejuk, bukan wajah *ngamuk*. Maka memunculkan wajah Islam Nusantara merupakan benteng bagi umat Islam Indonesia agar tidak terjangkit virus fundamentalisme. Akhirnya tidak ada cara lain bagi umat Islam selain memiliki semangat membentengi diri dari pemahaman Islam secara fanatik dan tertutup dengan

tiga tumpuhan hidup sebagai insan *ulul albab:* zikir, pikir dan amal salih.

H. Deradikalisasi Agama: Eksperimen Pesantren Salaf-Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia

Agus Zaenul Fitri

Islam—menurut Huston Smith (1991: 221-270)—sebagai sebagai salah satu tradisi besar agama dunia (selain Nasrani, Yahudi), merupakan "organisme hidup", yang berkembang sesuai denyut nadi perkembangan manusia. Salah satu watak Islam menurut Clifford Geertz adalah bahwa ia bukan entitas yang otonom, Islam senantiasa tampil dalam wajahnya yang beragam searah keragaman sosio-kultural dimana Islam berada. Islam bukan monumen mati yang diberhalakan, tetapi ia perlu terus dihidupkan, dibaca, diinterpretasikan dan dikontekstualisasikan. Islam dengan demikian bukan saja sistem ritual yang menyangkut keyakinan dan akidah yang *taken for granted*, tetapi lebih luas dari itu ia merupakan sistem budaya, yang memiliki keterkaitan penting terhadap setiap problem hidup manusia. Islam dari waktu ke waktu akan terus dihubungkan dengan setiap fenomena kebudayaan, guna mencari relevansi nilai-nilai universal agama menjawab problem kemanusiaan.

Indonesia, seperti halnya negara-negara lain dimana sel-sel jihadis telah berhasil dibongkar, selama beberapa tahun terakhir ini sedang melakukan eksperimen dengan program "deradikalisasi". Meskipun istilah ini memiliki arti

yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda, pada dasarnya program ini meliputi proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi *root causes* (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini tetapi pada umumnya, semakin luas definisinya, semakin kurang tajamnya fokus program-progam yang disusun.

Pengalaman menunjukkan bahwa upaya-upaya deradikalisasi di Indonesia, betapapun kreatifnya, tidak dapat dinilai secara terpisah dan kemungkinan akan gagal kalau tidak dimasukkan ke dalam sebuah program kurikulum pendidikan baik formal maupun non-formal, di sekolah maupun di pesantren. Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam upaya deradikalisasi agama. Pesantren salaf di dalam perkembangan sejarah menunjukkan bahwa mereka menggunakan cara-cara yang santun dalam berdakwah. Pesantren salaf-NU merupakan salah satu bagian dari itu karena pesantren-pesantren Salaf-NU memiliki prinsip sebagaimana oganisasi NU itu sendiri, yaitu: *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (moderat), *tawajjun* (adil). Hal ini yang membuat para santri di pesantren salaf-NU memiliki pemahaman bahwa untuk berdakwah atau menyebarkan keyakinan terhadap orang lain atau penganut agama lain harus dengan cara-cara yang arif dan bijaksana serta jauh dari kekerasan, sebagaimana cara dakwah yang telah dilakukan oleh para Walisongo atau ulama-ulama dari Gujarat ketika menyebarkan Islam pertama kali ke Indonesia, mereka menggunakan cara yang santun tidak dengan cara melukai bahkan membunuh masyarakat yang

saat itu masih menyembah agama Hindu. Hal ini juga ditegaskan di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

> Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.* (**Q.S. An-Nahl: 125**).

Pesantren salaf-NU dalam kurikulum pendidikannya dapat memberikan pemahaman kepada para santri sekaligus untuk memberikan pengertian bahwa jihad tidak hanya dimaknai dengan berperang, dan bahkan menuntut ilmu bagi para santri juga dimaknai dengan jihad, sebagaimana yang diajarkan Al-Zarnuji dalam Kitabnya *Ta'limul Mutaa'llim*.

Ketika para santri diajarkan dengan konsep dasar dakwah Islam dengan cara yang santun dan tanpa kekerasan maka mereka akan membuka dirinya terhadap argumentasi agama oleh ustaz-ustaz yang kredibilitas di dalam gerakan jihad tidak bisa diragukan. Beberapa dari mereka kemudian telah menerima bahwa penyerangan-penyerangan terhadap warga sipil, seperti bom Bali I dan II dan bom Kedubes Australia, adalah salah.

Hingga saat, ini program di Indonesia tersebut sebagian besar telah dilihat secara terpisah dari perkembangan yang lain dan tanpa banyak mempertanyakan mengenai sebab dan akibatnya. Contohnya, hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk menilai apakah lebih banyak yang meninggalkan daripada yang masuk organisasi jihad; atau apakah orang-orang yang ikut program tersebut memang sudah cenderung sebelumnya untuk menolak pengeboman; atau apakah

inisiatif tersebut telah menimbulkan reaksi balik di dalam kelompok-kelompok jihadis.

Pesantren salaf-NU dianggap berhasil menangkal radikalisasi keagamaan karena memegang teguh peran tradisi yang sudah ada. Dengan satu kaidah *fiqhiyyah* yang sering diajarkan di pesantren-pesantren yaitu:

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيْدِ الأَصْلَحِ

Kaidah tersebut menjelaskan tentang pentingnya menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Islam masuk ke dalam sebuah tradisi agama lain yang dianggap baik maka tidak serta-merta menghancurkan bahkan merusaknya, akan tetapi secara bertahap dilakukan upaya penyadaran sehingga dicapai hal baru yang lebih baik. Cara seperti ini telah banyak diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun dalam sistem pendidikan dan pengajaran di Pesantren salaf-NU. Salah satu usaha yang sering digunakan di pesantren salaf-NU adalah menjaga tradisi.

Setidaknya ada lima tradisi yang seharusnya dijaga secara seimbang, agar umat beragama memiliki hati, pikiran, dan wawasan yang luas. Berbekalkan hati, pikiran, dan wawasan yang luas itu, maka akan muncul pada diri seseorang sifat lebih toleran dan berhasil memahami orang lain apa adanya. Sebagaimana disebutkan di muka bahwa intoleransi yang terjadi selama ini, lebih banyak disebabkan oleh wadah yang dimiliki—hati, pikiran, dan wawasan—tidak mencukupi untuk menampung sesuatu yang beraneka ragam dan berjumlah besar tersebut.

Memperkecil jenis dan jumlah yang harus diwadahi dalam alam modern seperti sekarang dan yang akan datang, jelas tidak akan mungkin dilakukan. Oleh sebab itu, pendekatan yang strategis adalah memperluas wadah itu. Apalagi sebenarnya, Islam adalah merupakan ajaran yang menuntun umatnya agar menjadi orang yang berpikiran, perasaan, dan berhati luas. Dalam Islam diajarkan keharusan mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun pribadi unggul, membentuk masyarakat setara dan adil, memberikan tuntunan tentang bagaimana menjalankan ritual untuk membangun spiritual yang kokoh dan konsep tentang amal saleh. Tradisi inilah yang seharusnya dikembangkan di kalangan umat Islam.

Manakala umat Islam berhasil mengembangkan tradisi tersebut maka akan terbangun karakter umat Islam yang berpikiran luas, memiliki pandangan mata dan telinga yang tajam, berhati yang lembut serta memiliki semangat untuk berjuang membela kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya tradisi keagamaan yang seharusnya dikembangkan secara terus menerus tanpa henti. Bahkan pengembangan tradisi itu harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, serta seharusnya pula mengikuti perkembangan metodologi yang selalu berkembang sehingga hasilnya semakin lebih meningkat kualitasnya. Pesantren salaf-NU di dalam kurikulumnya mengajarkan prinsip-prinsip toleransi (*tasammuh*) dalam beragama dan *tawasuth* (moderat), karena hal inilah yang merupakan salah satu cara untuk menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan pendapat, hal ini sering diajarkan oleh kiai-kiai di pesantren salaf-NU: bahwa perbedaan di antara umat adalah rahmat, hal ini pula yang membuat para santri

di pesantren ini mengembangkan sikap untuk tidak ekstrem dalam menghadapi perbedaan pendapat.

Munculnya Radikalisme dalam Islam

Islam radikal adalah respon umat beragama yang dimanifestasikan dalam bentuk tindakan atau pemikiran yang ekspresif, bahkan adakalanya ditunjukkan dalam bentuk tindakan pemaksaan melalui kekerasan. Sartono Kartodirjo memandang radikalisme agama sebagai gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total suatu tatanan politis atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan. Sebuah konsepsi ekspresif yang mirip dengan konotasi revolusi. Anthony Reid, dalam tulisannya bertajuk "Revolusi Sosial, Revolusi Nasional" yang dimuat *Prisma* (1981) mendeskripsikan revolusi sebagai restrukturisasi fundamental dari suatu sistem politik dengan kekerasan dalam waktu yang relatif singkat. Dari kedua istilah ini ada kesamaan tujuan sama yang ingin dicapai: "perubahan keadaan secara total".

Radikalisme agama mulai menjadi isu utama ketika bom mengguncang ketenangan manusia. Kasus bom Bali, bom Natal, WTC 11 September, KFC dan banyaknya kekerasan dan kerusakan tempat maksiat yang dilakukan oleh laskar-laskar dan ormas-ormas Islam Radikal, semisal Ikhwanul Muslimin Indonesia, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad Ahlussunah Wal Jamaah, Hisbullah, Jundullah dan ormas sejenis yang memiliki karakteristik serupa menyuarakan suara lantang berjihad melawan kezaliman (Zainuddin Fananie [ed.], 2002: 5-37).

Persoalan radikalisme keagamaan mencakup persoalan yang cukup kompleks karena hal tersebut mencakup dimensi kehidupan seperti keyakinan, interpretasi, ajaran, hubungan personal dan kemasyarakatan. Hal itu terkait dengan tingkat pendidikan umat, lingkungan sosial, tradisi budaya, kemauan dan pemahaman terhadap setiap perubahan. Dengan kata lain, persoalan radikalisme keagamaan akan berdimensi vertikal dan horizontal. Berikut ini beberapa perspektif yang dianggap memiliki keterkaitan kuat yang melatari bangkitnya Islam radikal.

Pesantren NU: Dakwah Islam Tanpa Kekerasan

Memperjuangkan Islam, apa pun bentuk pilihan paradigmanya: fundamentalisme, liberalisme atau radikalisme sebagai respon atas perubahan global, sedini mungkin menghindari cara-cara kekerasan. Islam adalah agama damai dan condong pada perdamaian. Untuk itu upaya-upaya kekerasan dan sikap-sikap intoleran pada tingkat tertentu akan mencoreng wajah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Islam di Indonesia adalah fenomena Islam yang menarik dibandingkan Islam yang ada di wilayah atau belahan dunia lainnya. Hal ini disebabkan karena Islam di Indonesia adaptif, insklusif dan toleran.

Namun, kondisi ini bertolak belakang secara diametral, jika melihat Indonesia akhir-akhir ini, dimana kekerasan mengalami eskalasi. Peristiwa ini misalnya dapat dilihat dari banyaknya kasus yang berakhir dengan tindakan kekerasan; kasus bom Bali, amuk masa di Banjarmasin, Ambon, Maluku, Situbondo, Tasikmalaya dan sebagainya. Kasus-kasus kekerasan berlatar belakang agama dapat

menggiring pandangan baru tentang Islam Indonesia; intoleran dan kekerasan. Edward Said, (1981: xv) menulis:

> "... bagi kelompok Kanan Islam mewakili barbarianisme, bagi kelompok Kiri merupakan teokrasi abad pertengahan, bagi kelompok tengah, semacam eksoterisme yang tak disukai. Namun dalam semua kelompok ada kesepakatan bahwa walaupun dunia Islam cukup dikenal, tetapi tak begitu diakui di sana, menyangkut isu-isu kekerasan dan arti kekerasan, Islam biasanya dipandang sangat berorientasi pada kekerasan".

Untuk menghindari asumsi dan persepsi Islam di Indonesia sebagai hantu-hantu gentayangan dalam *republic of fear*, meminjam istilah Samir al-Kholil, mengidentikan istilah kekerasan dan pemaksaan, penting kiranya kembali mempertimbangkan perjuangan tanpa kekerasan. Menimbang kembali nilai profetis Islam yang menghargai tentang kehidupan.

Glenn D. Paige, Profesor Emeritus pada Ilmu Politik dan Presiden *Center for Global Nonviolence*, menyatakan bahwa agama secara prinsip memiliki keterkaitan antara ajaran dan agama yang memerintahkan manusia untuk tidak mengganggu kehidupan. Dalam rangka menghindari ancaman terhadap kekerasan, agama harus dikembalikan fungsinya sebagai sumber nilai, yang menjamin kelangsungan kehidupan. Menghindari kekerasan pada dasarnya manifestasi dari perilaku yang menghargai hidup. Islam secara khusus sangat menghargai dan melindungi hidup. Bila seseorang menyelamatkan satu jiwa ia seolah-olah menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi sebaliknya barang siapa membunuh satu manusia tanpa alasan yang jelas ia seolah-olah membunuh manusia seluruhnya.

Inilah pentingnya untuk melihat kearifan dalam konteks dakwah manusia dan menyeru kepada kebaikan harus dilakukan dengan tujuan baik sekaligus cara-cara yang baik. *Wallahu a'lamu Bishowab*.

BAGIAN IV

DIALEKTIKA ISLAM NUSANTARA, FENOMENA PENDANGKALAN AGAMA DAN KEMANDIRIAN EKONOMI

A. Menimbang Ulang Islam Nusantara

Oleh Syamsul Umam

Belum lama ini saya membaca buku Bob Heffner tentang "antropologi konversi", yaitu penelaahan antropologis perpindahan agama atau konversi, serta aktivitas yang menyertai perpindahan itu, proselitas atau dakwah. Kajian ini sangat menarik karena dilihat dari berbagai sudut agama, satu hal yang saya catat adalah perpindahan agama adalah salah satu jalan bagi suatu bangsa untuk menjadi bagian dari suatu peradaban. Haffner memberikan contoh: bayangkan seorang yang semula adalah anggota dari suku terasing di pedalaman kemudian memeluk agama Kristen atau Islam; dalam kasus itu jelas menjadi suatu "gempa-budaya" yang dahsyat karena orang itu seperti meloncat suatu lingkaran kebudayaan sempit dan masuk ke dalam "gerbong" peradaban besar yang penghuninya melintasi

batas-batas nasionalitas.

Hal lain juga dijelaskan V.S Naipaul dalam bukunya *Beyond Belief* yang mengatakan bahwa ketika orang-orang dari kawasan Arab masuk Islam maka dia mengalami peristiwa yang dahsyat, Naipaul menggambarkan dengan istilah "Ikonoklasme" alias suatu penghancuran bukan saja terhadap ikon-ikon tetapi juga terhadap konsepsi. Sebagai gambarannya, begitu orang Jawa masuk Islam, dia mengalami peristiwa yang dahsyat; sejarahnya, kitab sucinya, pahlawannya, harapannya, konsepsinya tentang Tuhan, legendanya, tentang manusia, tentang yang baik dan jahat, orang Jawa yang semula mengenal nama-nama seperti Kresna, Werkudara, Arjuna, sebagai nama-nama pahlawan mereka, tiba-tiba mengenal nama-nama lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Harun Al-Rasyid, dan nama-nama lain yang jauh dari bumi Nusantara mereka berpijak. Tiba-tiba mereka harus peduli dengan pertikaian yang begitu dahsyat antara Syiah-Sunni, tiba-tiba harus peduli terhadap perikaian Sunni-Ahmadiyah, tiba-tiba harus peduli terhadap pertikaian kaum rasional dan tekstual, dan seterusnya.

Begitu masuk Kristen atau Islam orang-orang Nusantara seperti dipaksa masuk dalam gerbong peradaban yang usianya ribuan tahun, pindah agama dengan cara seperti itu jelas seuatu peristiwa yang dahsyat, tentu akan beda efeknya dengan orang yang masuk ke agama pribumi yang hanya mempunyai sejarah dan ingatan yang pendek, agama pribumi bisa mempunyai umur lebih panjang dari agama semitik seperti agama Kristen dan Islam tetapi dalam perkembangan peradabannya jelas dua agama itu tidak bisa

ditandingi peradabannya oleh agama manapun.

Islam dan Kristen memang seperti "Multi Nasional Corporation" (MNC), mirip seperti sebuah perusahaan raksasa yang bergerak melintasi batas batas bangsa-bangsa dan tanah air. Sedangkan agama-agama pribumi—kalau saya boleh menyebutnya—ibarat *home industry* yang kecil-kecil, terserak-serak, dan tak pernah mengalami pertumbuhan menjadi "firma" besar, seperti saya tunjukan tadi, kekuatan Islam-Kristen sebagai MNC adalah karena dia bertumpu pada mesin utama: budaya tulis.

Kekuatan yang kedua adalah agama yang mempunyai scripture kitab suci yang tertulis. Dua agama ini mengembangkan suatu peradaban yang fondasi utamanya adalah "kultur tulis" karena tradisi tulis yang begitu kuat berakar pada dua agama itu maka perkembangan pemikiran dan spekulasi teologis yang berkembang di dalamnya dapat berkembang dengan sistematis. Apakah kita pernah melihat di agama-agama lain suatu khazanah literatur yang melahirkan ribuan jilid buku seperti yang berkembang dalam Islam dan Kristen? Saya ragu kalau ada yang melampaui dua agama itu.

Setelah membaca bukunya Walter J Ong atau Tuan Ong bertajuk, *Literacy The Technologizing of Word,* saya memeroleh kesan bahwa "budaya tulis" jauh lebih superior ketimbang budaya lisan, pelan-pelan kita sukai atau tidak akan tergusur, susut dan digantikan oleh budaya tulis, saya kira satu rahasia yang diungkap Tuan Ong adalah bahwa dalam budaya tulislah suatu modus berpikir yang abstrak, bukan yang konkret, salah satu ciri budaya tulis adalah memang yang abstrak di samping ada yang konkret.

Bayangkan apakah mungkin spekulasi tentang wujud dan sifat Tuhan dilangsungkan dalam budaya lisan, apakah mungkin dalam pantun melayu kuno terjadi satu perdebatan spekulatif mengenai masalah-masalah filsafat? Saya kira jawabannya jelas: tidak mungkin. Dengan modus pemikiran yang abstrak itu agama-agama besar seperti Islam-Kristen kemudian mengembangkan suati sistem kepercayaan yang solid, kokoh, sistematis dengan dasar-dasar argumen yang berlapis-lapis.

Kalau kita mau jujur, Islam sebetulnya dimulai dari dan berjangkar pada budaya lisan yang kuat, bahkan Nabi Muhammad di gambarkan sebagi nabi "*ummiy*" alias tidak bisa baca tulis. Seorang pemikir Libiya, Shadiq an Nayhum, mempunyai tafsiran yang "nakal" dan lain mengenai kata *ummiy*. Dalam bukunya *Islam Dlid al Islam*, ia mengatakan bahwa dalam ayat-ayat al-Qur'an yang turun di Makkah mempunyai ciri-ciri yang menonjol dalam sastra lisan, dimana pengulangan, pemenggalan kalimat dalam sekuen-sekuen yang pendek, dan penggunaan rima dan sajak yang sangat menonjol, peristiwa yang sangat penting dan revolusioner dalam sejarah kesadaran Islam adalah kodifikasi al-Qur'an oleh sahabat Ustman, kodifikasi ini mengubah secara radikal watak al-Qur'an dari yang semula sebagai "kitab bagi masyarakat lisan" menjadi "kitab bagi masyarakat tulis". Al-Qur'an pada zaman sebelum Utsman adalah "al Qur'an Oral" yang kemudian diteruskan dengan kodifikasi hadis maka sempurnalah kesadaran dalam Islam, sejak saat itulah dimulai spekulasi teologis dan filosofis dalam al-Qur'an yang begitu canggih. Dalam hal ini, Nashr Abu Zayd pernah mendeskripsikan peradaban Islam sebagai "peradaban teks", bahkan bapak lingusitik Ferdinand de

Saussure pernah mengatakan dalam karyanya yang terkenal *Course in General Linguistics*, bahwa tulisan secara serentak mempunyai kegunaan, kekurangan sekaligus bahaya.

Seperti yang sudah saya singgung Tuan Ong membuat pengamatan yang menarik salah satu akibat dari munculnya budaya tulis adalah munculnya budaya cetak (*print*) dalam percetakan suatu naskah, terjadi proses penutupan (*close*), begitu al-Qur'an telah dikodifikasi, Dicetak dalam versi yang resmi maka al-Qur'an dalam istilah Muhammad Arkoun sebagai "korpus tertutup" tidak lagi menjadi kitab yang terbuka kepada pembacaan-pembacaan alternatif yang kaya dan liar. Dari sanalah muncul ancaman fundamentalisme, itulah bahaya budaya tulis seperti yang diisyaratkan oleh Saussure.

Tetapi ada aspek dalam tulisan yang mempunyai sisi positif, dan segi inilah atas perkembangan Islam-Kristen untuk menjadi agama raksasa, dengan munculnya "tulisan" pelan-pelan lahirlah suatu kesadaran tentang "individualism" pada orang perorang. Dengan munculnya "tulisan" disertai dengan kuatnya budaya tulis kesadaran individual mulai tampak kepermukaan dan orang berani mengatakan "aku" bukan "kami" atau "kita".

Apakah akibat ini semua pada perkembangan tafsir dan kitab suci yang tertulis? Akibatnya sangat revolusioner karena individu mulai sadar dengan dirinya dan kemampuan untuk berpikir dan berkata-kata secara berbeda dengan yang dikatakan oleh masyarakat dan kelompoknya. Maka kitab suci menjadi arena pertandingan antara individu untuk melakukan tafsir yang bersifat personal dan unik, masing-masing orang bisa memberikan tafsirannya sendiri. Kitab

suci, dalam istilah Ahmad Baso, menjadi "arena kontestasi".

Namun proses ini tidak terjadi pada agama-agama pribumi sebab agama-agama itu terjabak dalam kesadaran kolektivistik dan akibatnya adalah fatal: agama-agama pribumi menjadi agama yang bersifat komunal artinya terbatas dengan komunitas tertentu dan tidak pernah menjadi agama universal. Sedangkan keunggulan Islam-Kristen adalah karena agama ini berkembang menjadi agama universal berkat kesadaran personal yang dimungkinkan oleh budaya tulis.

Bagaimanapun sulit kiranya meruntuhkan dominasi Kristen-Islam yang sudah kadung menjadi MNC itu. Setiap kali terjadi perjumpaan antara Kristen dan Islam dengan budaya lokal maka yang terjadi adalah "penaklukan" oleh agama-agama universal, banyak pengamat mengatakan kehadiran Islam di Nusantara disambut antara lain oleh perlawanan lokal dalam berbagai bentuk, dalam bentuk sinkretisme, misalnya pencampuradukan antara Islam dengan unsur-unsur budaya lokal atau menyerap unsur-unsur tersebut untuk kemudian diisi dengan semangat yang sesuai dengan ajaran agama univesal itu.

Dengan cara pandang seperti ini saya hendak meragukan kembali, meski ini hanyalah keraguan metodologis untuk lagi diskusi agar lebih maju, apakah benar-benar ada yang disebut sebagai Islam Nusantara? Sudah tentu Islam memang terus berjumpa dengan berbagai budaya, dengan begitu Islam juga mengalami perubahan warna sesuai dengan budaya itu: Islam jelas warna warni, tidak ada Islam tunggal, tetapi apakah kita bisa menolak kenyataan-kenyataan yang terang benerang ini, bahwa

dengan seluruh peradabanya itu, Islam tetaplah agama universal dengan kredo tunggal.

Pada akhirnya yang disebut Islam Nusantara itu bukanlah hasil dari dialog seimbang Islam dan budaya lokal sebab yang terjadi, Islam lebih unggul dan dominan terhadap budaya lokal. Dengan sangat terpaksa, saya harus menyebutnya bahwa agama lokal itu pada akhirnya ditaklukan oleh agama universal dengan cara sesuai dengan keinginannya sendiri, dan dialog ini tetap tidak akan pernah imbang. Sebab terletak pada faktor yang sudah saya singgung di atas: Islam dan Kristen berhasil mengembangankan sistem kepercayaan yang canggih berkat budaya tulis.

Dalam situasi semacam itu, kita layak kembali menoleh kepada pemikiran-pemikiran Mazhab Frankfurt, salah satunya adalah buah pikiran Max Horkheimer, yang mengkritik tentang tendensi-tendensi ke arah totalitarianisme dan pembatasan sistem sekuler pada manusia. Di sini kita menjadi tahu dan sadar, baik sistem sekuler, agama universal, maupun agama lokal mempunyai tendensi-tendensi sendiri yang kurang sehat: tendensi pengekangan kebebasan manusia.

Saya ingin ke pokok persoalan yang disinggung Tuan Ong tadi, yaitu berkembangnya kesadaran individu karena berkembangnya budaya tulis. Perkembangan kesadaran individu ini akhirnya memperkokoh landasan untuk mewujudkan kebebasan manusia, baik sistem universal serta sistem lokal mempunyai kecenderungan serupa, yaitu mengancam "interioritas" manusia dan dengan demikian juga kebebasannya.

Intinya, jika kita mau membangun suatu kehidupan yang baik di masa yang akan datang, satu cara yang mungkin bisa kita tempuh, yaitu dengan mengusahakan timbulnya kesadaran bahwa hubungan dialektika yang sehat antara tiga hal berikut ini adalah penting: *pertama*, sistem universal (entah sistem atas nama agama atau sekuler). *Kedua*, sistem lokal (pengetahuan dan budaya pribumi). *Ketiga*, kebebasan pribadi, saya tidak tahu bagaimana membangun kehidupan yang seperti itu.

B. Walisongo: Mengislamkan Masyarakat Jawa Tanpa Menghilangkan Identitas Kebangsaan

Oleh Ahmad Yuzki Maksum

Banyak versi mengenai penyebaran Islam di Nusantara. Pada saat ini terdapat empat versi penyebaran Islam di Nusantara, yaitu Teori Gujarat, Teori Persia, Teori Arab, dan Teori China. Teori-teori tersebut mempelajari tentang asal muasal Islam di Indonesia. Keempatnya mempunyai dasar yang kuat dengan dibuktikan dengan bukti-bukti arkeologis dan juga bukti sosial budaya yang digunakan masyarakat di Nusantara. Perlu diketahui bahwa semua teori tersebut berhubungan dengan perdagangan di abad pertengahan yaitu abad ke-10 hingga 15 (Houtsma, 1993: 576-577). Perdagangan pada masa lampau di Nusantara berhubungan dengan jalur laut yang memerlukan waktu bertahun-tahun karena mengandalkan angin musim untuk mencapai daerah tujuan dan kembali lagi ke daerah asal. Ketergantungan akan alam membuat pedagang dari daerah yang disebutkan empat teori tersebut berhubungan dengan masyarakat pesisir untuk menunggu angin. Masa tunggu tersebut menjadikan para pedagang bermukim dan banyak dari mereka menikah dengan penduduk pribumi. Islam di Nusantara termasuk di Jawa berawal dari hal tersebut (Nor, 2007: 31-51).

Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Islam di Jawa sudah ada sejak tahun 1082. Fakta tersebut diperkuat dengan ditemukannya sebuah nisan atas nama Fathimah binti Maimun binti Hibatullah di Desa Leran, Gresik, Jawa Timur (Syam, 2005: 69). Jadi komunitas Islam telah terdapat di Jawa jauh sebelum Kerajaan Majapahit. Dari data yang disajikan oleh Badan Litbang dan Diklat (2010: 115), secara geografis Gresik terdapat di Jawa Timur tidak dapat menutup kemungkinan bahwa Islam telah bersinggungan dengan masyarakat di Jawa sebelum tahun 1082 karena secara geografis Banten, Sunda Kelapa, Cirebon merupakan kota-kota yang besar kemungkinan dapat disinggahi terlebih dahulu. Komunitas Islam mulai menunjukkan perkembangan pesat pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 dengan ditemukannya makam Islam di Trowulan yang bertuliskan tahun 1374, Mojokerto dan makam Islam di Gresik pada tahun 1419 (Verhoeven, 2008: 85). Komplek pemakaman Islam di Trowulan yang merupakan ibukota Majapahit menunjukkan bahwa Islam diterima di Jawa dan makam di Gresik membuktikan bahwa pada awal abad ke-15 telah terdapat komunitas Islam yang bermukim dan membangun sebuah kota yang diakui oleh Majapahit (Denys, 2005: 34). Bukti-bukti sejarah di atas baru mencakup komunitas Islam di Jawa Timur dan sangat memungkinkan sekali bahwa Islam sudah ada di Jawa jauh sebelum masa itu.

Permasalahan terbesarnya adalah Islam sebagai agama merupakan suatu kemutlakkan, namun budaya asal Islam dari empat teori yang berlainan dengan budaya lokal di Jawa merupakan permasalahan yang harus diungkap. Islam di Jawa secara garis besar sangat berbeda dengan Islam

di daerah empat teori tersebut dan uniknya Islam diterima secara luas. Islam di Jawa tetap mengedepankan identitas budaya lokal (Musyarof, 2006: 23). Identitas keislaman tersebut yang menarik untuk dijelaskan lebih lanjut.

Seputar Walisongo

Walisongo memang merupakan fakta sejarah namun banyak yang berdebat mengenai waktu dakwah secara bersamaan. Walisongo sendiri merupakan istilah yang mengacu pada ulama penyebar Islam di Jawa yang mempunyai derajat yang tinggi sehingga disebut wali dan berjumlah sebanyak sembilan ulama dari berbagai daerah di Jawa (Oey, 1991: 286). Walisongo merupakan ulama penyebar Islam yang dikenal secara luas di seluruh tanah Jawa khususnya dalam Suku Jawa pada masanya akan tetapi tidak mustahil terdapat ulama penyebar Islam di Jawa sebelum Walisongo mengingat komunitas Islam telah menyebar di pesisir utara pantai Jawa (Kasdi, 1999: 128). Perbedaannya adalah Walisongo mempunyai cara dan karya yang melekat dalam hidup orang Jawa sehingga nama-nama Walisongo abadi dan harum di dalam jiwa mereka.

Metode Kultural

Nama harum Walisongo abadi bukan hanya sukses menyebarkan Islam atau berperan dalam membangun Kerajaan Islam di Jawa namun Walisongo melakukan islamisasi tanpa harus mengubah jati diri orang Jawa yang sangat kental dengan budaya (Saksono, 1995: 9-198). Berikut ini adalah dakwah Walisongo yang terbagi menjadi

tiga bagian yang berhubungan dengan budaya khususnya Jawa.

Simbol Identitas Lokal

Walisongo selalu berdakwah dengan nama istilah yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Penguasaan ilmu agama yang tinggi serta penguasaan bahasa Arab yang baik tidak berarti Walisongo menggunakan nama dan istilah dalam bahasa Arab dalam berdakwah. Walisongo justru menjunjung tinggi budaya lokal untuk menarik masyarakat dalam mengenal dan mempelajari Islam (Nuh, 2013:206). Cara Walisongo dalam mengangkat simbol identitas lokal dalam dakwah Islam seperti pemakaian nama "kejawen" dalam mengenalkan diri ke masyarakat. Dari waktu ke waktu bahkan masyarakat Jawa lebih paham dan mengingat nama Walisongo dengan nama "kejawen" daripada nama aslinya yang kental dengan bahasa Arab. Hal tersebut menciptakan anggapan bahwa Walisongo itu adalah Jawa dan bukanlah pendatang. Gelar "syekh" yang melekat pada nama ulama juga tidak dipakai dan diganti menjadi "sunan" dari kata *susuhunan* yang memiliki arti junjungan (Gin, 2004: 864).

Kehidupan Masyarakat dan Kesenian

Walisongo berdakwah selaras dengan tipe budaya lokal yang ditempati. Walisongo berdakwah tanpa melukai hati pemeluk kepercayaan selain Islam. Misalnya adalah dakwah Sunan Kudus yang melarang menyembelih sapi di daerah Kudus. Bangunan masjid terpengaruh oleh Hindu dan Budha, bangunan Hindu diwakili oleh gapura masjid

serta menara azan yang berupa candi sedangkan bangunan Budha diwakili adanya tempat wudhu yang terkenal dengan istilah dalam agama Budha: *Asta Sanghika Marga* (Lee, 2013: 147).

Dalam kesenian tidak diragukan lagi kepiawaian Walisongo berubah untuk bersatu dengan rakyat melalui kesenian. Sejarah mengakui bahwa Walisongo juga dapat menjadi seniman luar biasa dan bakat tersebut digunakan sebagai media dakwah. Walisongo menciptakan tembang-tembang Jawa dengan "*macapat*" yang penuh dengan filosofi (Sutrisno, 2007: 81), dan Walisongo juga menciptakan alat musik bahkan menciptakan kesenian rakyat berupa wayang kulit yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya (Bull, 2005: 49). Dalam hal rumit bahkan Walisongo tidak mempermasalahkan upacara adat kematian tujuh hari, empat puluh hari, dan seterusnya (Turner, 1999: 63). Intinya masyarakat Jawa mencintai kearifan budaya yang diangap baik dengan maksud-maksud tertentu dan mencintai kekayaan budaya seperti kesenian. Sikap Walisongo terhadap fenomena tersebut tidak melarang bahkan mengikuti pola masyarakat dengan ketentuan islami agar misi islamisasi tercapai.

Kepercayaan terhadap Legenda

Hal ini yang paling sulit dihilangkan dalam masyarakat Jawa. Kepercayaan-kepercayaan—menurut Woodward (2008: 105)—yang mempunyai nilai mistis merupakan bagian hidup masyarakat Jawa. Kepercayaan terhadap bencana, kesialan, dan hal-hal yang merugikan hidup dipahami dengan baik-baik dan untuk menolak itu semua

masyarakat Jawa menggunakan ritual upacara-upacara tertentu. Tidak hanya bersifat tempat dan alam, masyarakat Jawa juga mempercayai dengan seutuhnya terhadap kekuatan-kekuatan khusus yang terdapat dalam diri manusia terlebih pada para wali.

Dalam legenda-legenda Jawa diyakini secara turun-temurun bahwa bangunan candi yang jumlahnya banyak deselesaikan dalam waktu semalam. Pada masa Islam kepercayaan terhadap kekuatan dalam diri manusia juga dikenal luas dalam masyarakat. Oleh sebab itu beredar cerita dari mulut ke mulut tentang kesaktian para sunan dalam memperjuangkan Islam di tanah Jawa. Misalnya Sunan Kalijaga yang menjaga tongkat Sunan Bonang selam berbulan-bulan hingga tubuh beliau ditutupi oleh rumput, tongkat yang berubah menjadi emas, dan sebagainya (Laksana, 2014: 32).

Cerita tersubut disampaikan dari mulut ke mulut dan diyakini merupakan kehendak Allah Swt bagi hamba-hambanya yang dipilih dan bertakwa. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Jawa bahkan tidak mengubah pandangan masyarakat awam tentang konsep kesakralan tanah Jawa (Woodward, 2008: 104). Walisongo hanya menginginkan bahwa Islam dapat menyebar ke suluruh pelosok Jawa dan penyempurnaan Islam dapat diwujudkan jika kerajaan dan sistem pendidikan Islam telah terbentuk di Jawa dan Islam agama dan kekuatan sebagai mayoritas.

Islam "*Kejawen*"

Banyak beranggapan bahwa kata "*kejawen*" dimaknai secara sempit dan negatif. Jika dimaknai Islam "*kejawen*"

berarti Islam yang dijawakan. Jika makna tersebut yang muncul tentunya Islam di Jawa akan berbeda dengan makna Islam sesungguhnya karena *kejawen* menawarkan konsep-konsep budaya yang terdapat kepercayaan kuno sebelum Islam (Sofwan, 2002: 99). Makna lain yang dapat diambil dari Islam "*kejawen*" adalah Islam sebagai agama mutlak tentang ke-*tauhid*-an terhadap Allah dan budaya Jawa sebagai identitas kebangsaan. Jadi "*kejawen*" bermakna bahwa agamanya Islam namun orangnya tetap berperilaku sebagai orang Jawa (Woodward, 2008: 106).

Walisongo tahu betul bahwa bangsa timur berbeda dengan bangsa barat. Pola kemasyarakatan dan geografis sangat mempengaruhi terhadap cara pandang dan cara hidup suatu bangsa. Tidak mungkin budaya Arab dimasukkan seluruhnya di Jawa. Budaya Arab yang terakomodasi dalam Islamlah yang dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat Jawa. Pada akhirnya Walisongo tahu bahwa perbedaan suatu bangsa merupakan kemutlakan yang tidak dapat dilawan karena Allah sendiri telah menjelaskan dalam al-Qur'an mengenai hal tersebut.

C. Islam Nusantara dan Persatuan Indonesia

Oleh Mochamad Chobir Sirad

Terminologi Islam Nusantara dapat dimaknai dua hal: *pertama*, Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan *kedua,* Islam yang khas Indonesia: adaptif dengan tradisi dan budaya serta santun dalam dakwahnya. Islam Indonesia berbeda dengan Islam yang berkembang di *jazirah* Arab. Dalam istilah yang lebih jelas, Islam Nusantara—terutama dalam praktik *muamalah*-nya—tidak sama dengan Islam di belahan dunia manapun sebab mempunyai ekspresi yang khas dengan pusparagam yang ada. Maka tak aneh bila saat ini Indonesia dijadikan referensi keislaman dunia, bukan lagi Timur Tengah atau negara Islam lainnya.

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa negara-negara di Timur Tengah sampai detik ini masih terselimuti kemelut konflik, baik bernuansa politis maupun ideologis. Muaranya adalah aksi teror terjadi dimana-mana dan wajah Islam semakin buram di mata dunia. *Islamophobia* menjadi momok yang sampai sekarang tak kunjung hilang. Seolah, ketika melihat orang Islam yang berjenggot identik dengan terorisme, padahal tidak selalu demikian.

Perlu dipahami, Islam Nusantara tidaklah anti terhadap budaya manapun, termasuk Arab. Namun meski

begitu, bukan berarti menerima begitu saja segala bentuk arabisasi. Harus dibedakan antara mana yang produk budaya dan mana yang produk agama. Dengan kata lain, arabisasi adalah sebuah bentuk pencomotan segala sesuatu (terutama tradisi dan budaya) yang ada di sana kemudian dipindah begitu saja di Indonesia. Hal ini tentu saja kurang pas sebab setiap bangsa mempunyai akar sejarah dan nilai-nilai kearifannya sendiri.

Lebih dari itu, negara Indonesia adalah negara majemuk yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa, dihuni oleh 700-an suku bangsa, 500-an bahasa, ribuan tradisi-budaya, dan agama serta kepercayaan lokal. Dan hadirnya Islam Nusantara dengan proses perjalanan sejarah yang panjang sudah membuktikkan mampu bertahan dan ikut merawat keragaman itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Harus kita akui bahwa adat istiadat dan budaya yang ada di tanah air Indonesia telah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial yang mendarah daging. Semua itu merupakan *local wisdom* warisan nenek moyang kita, jauh sebelum Islam masuk di bumi Nusantara. Kalau dilacak secara historis, sebelum Islam masuk ke Nusantara, sudah ada agama/kepercayaan dan budaya yang mapan. Agama seperti Hindu-Budha dan agama-agama lokal sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka ketika Islam masuk, para pembawanya tidak serta merta mem-*babat* habis adat-istiadat yang sudah ada. Bahkan banyak penyebar Islam yang justru mengakulturasikan nilai-nilai agama Islam dengan tradisi serta agama terdahulu. Tujuannya tidak lain agar Islam bisa

dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia tanpa harus melalui benturan atau peperangan.

Semua itu bukanlah taktik semata agar Islam bisa menyebar, melainkan lebih dari itu adalah bukti nyata bahwa Nusantara adalah suatu wilayah yang dengan kemolekannya harus terus dijaga dan dirawat sedemikian rupa. Walisongo yang selama ini dikenal sebagai penyebar Islam di Jawa amat memahami betul realitas itu. Membumikan Islam dengan cara membasmi kredo-kredo yang ada sama halnya dengan mencabut nyawa suatu bangsa. Oleh karena itu, cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan "mengawinkan" keduanya tanpa harus membunuh kandungan-kandungan nilai dari salah satunya. Salah satu metode yang digunakan, misalnya dengan menggunakan wayang sebagai sarana dakwah. Dari sinilah masyarakat menganggap bahwa Islam bukan ancaman, melainkan malah "saudara baru" yang menawarkan kedamaian.

Dalam suatu kesempatan, KH. A Mustofa Bisri atau Gus Mus mengatakan bahwa Walisongo memiliki ajaran-ajaran Islam yang mereka pahami secara betul dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Menurut *sesepuh* NU ini, Walisongo tidak hanya mengajak *bil lisan*, tapi juga *bil hal*, tidak mementingkan formalitas, tetapi justru masuk ke dalam inti ajaran Islam. Hal ini jelas berbeda dengan metode dakwah yang digunakan oleh sebagian kelompok sekarang ini. Seolah-olah, mereka adalah Tuhan yang paling benar.

Hadirnya Islam Nusantara di negara Indonesia ini kerap disalahartikan, ada yang menyebutnya pengkotak-kotakkan, bahkan ada juga yang mengatakan *bid'ah* lantaran tidak ada dalilnya. Padahal menurut Akhmad Sahal, Islam

Nusantara memiliki *sanad* sufi yang *mutawassil* kepada Nabi Muhammad, dari Islam Nusantara ala Walisongo yang diteruskan lagi oleh ulama Ahlusunnah wal Jama'ah (Aswaja). Ulama Aswaja yang penulis maksud adalah secara akidah merujuk pada ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al- Maturidi, *istimbat* hukum fikih sesuai dengan metode salah satu dari empat imam mahzab dan bertasawuf mengikuti *Junaid* al-Bagdadi, dan Abu Hamid al-Ghazali.

Dengan demikian, Mazhab Aswaja, keautentikan ilmunya terus-menerus dijaga secara *talaqqi* dari garis *sanad* yang jelas. Para ulama itu mengajak kita kembali menghadirkan wajah Rasulullah yang *tabasyam*, yang selalu tersenyum, menghadirkan wajah Islam *rahmatan lil alamin*, mengembangkan sikap *tawasuth wal itidal*; sikap tengah yang lurus dan adil, moderat tidak ekstrem, dan juga tidak liberal. Islam Nusantara adalah wujud dari keragaman dan kesejukan, bukan kemarahan apalagi kekerasan. Dalam konteks kebangsaan, Islam Nusantara adalah salah satu unsur yang menjaga persatuan-kesatuan serta nilai-nilai kearifan yang menjadi pegangan setiap insan. *Waallahu 'alam bi al-Showab*.

D. Masyarakat Profetik: Islam Nusantara

Oleh Luluk Indarti

Secara umum dunia yang dulunya belum mengenal Islam, sekarang mengenalnya dengan pemahaman yang beragam. Kemajuan teknologi dan informasi membuat orang dengan leluasa mencari arti tentang Islam, bahkan apa pun yang berkaitan dengan Islam berseliweran begitu saja di media sosial (medsos). Orang bebas membaca dan bebas mengartikan sendiri apa yang tertulis di medsos terlepas itu benar atau hasil pemelintiran. Itulah yang menyebabkan mereka mengenal Islam sepenggal-penggal atau bahkan secara ekstrem.

Keadaan seperti ini sesungguhnya sangat disayangkan sebab banyak yang mengaku Islam murni sebagaimana *laku* Rasulullah, namun sikap dan perangainya tak satupun menunjukkan persis dengannya, kecuali jubah atau gamis semata. Realitas semacam ini sedikit banyak menimbulkan kesan negatif bagi orang-orang non-Muslim sehingga tak aneh bila kadang mereka menganggap bahwa Islam adalah agama teroris dan sarang orang-orang anarkis.

Realitas Islam Nusantara

Sampai saat ini mayoritas penduduk di Indonesia masih beragama Islam. Jumlah masjid semakin bertambah banyak, lembaga-lembaga pendidikan juga menjamur

di mana mana. Tradisi yang berkaitan dengan Islam juga semakin marak, bahkan *halal bihalal* dikemas sedemikian rupa dalam rangkaian lebaran. Peringatan Hari Besar Islam juga diperingati dan dilaksanakan dengan meriahnya yang diikuti oleh Islam dari berbagai kalangan. Secara kasat mata keadaan seperti ini menjadikan Islam semakin banyak dikenal, bukan hanya sebagai agama, namun juga bagian dari tradisi dan budaya itu sendiri. Hal ini sejalan dengan sejarah kehadiran Islam di bumi Nusantara.

Selain itu, adanya perintah dan larangan, adanya pahala dan dosa dalam Islam tentu terkandung tujuan yang luar biasa. Islam menginginkan ketenangan, perdamaian di muka bumi ini. Menyelesaikan persoalan tanpa adanya kekerasan, memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah. Upaya Islam untuk membuat kedamaian tidak hanya sebatas urusan duniawi, namun juga *ukhrawi*.

Dalam memahami dan mengkaji hukum-hukum Islam tidak hanya berpedoman pada al-Qur'an, namun juga dilengkapi dengan keterangan dan kajian dari hadis hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Sehingga dalam hukum Islam mudah untuk dilaksanakan dan tidak memberatkan umatnya. Semisal dalam urusan salat, secara hukum seseorang yang salat adalah dengan cara berdiri yang kemudian diteruskan dengan gerakan-gerakan lainnya. Namun untuk orang yang sakit kewajiban berdiri ini tidak berlaku, bagi orang sakit diperbolehkan untuk melakukan semampunya, bisa dengan duduk atau bahkan dengan berbaring jika benar-benar tidak mampu lagi untuk berdiri. Begitu juga ketika bersuci, saat tidak ada air ataupun sakit dan tidak memungkinkan untuk kena air maka *wudhu*-nya bisa diganti dengan *tayamum*.

Pendek kata, kedua hal itu merupakan contoh keringanan-keringan yang ada dalam Islam.

Lebih dari itu, umat Islam di Nusantara, sejak lama sudah membaur dengan masyarakat dan dapat hidup dengan tenteram dengan pemeluk agama yang lainnya. Status sosial, perbedaan suku dan ras tidak menjadikan pertikaian sesama umat Islam sendiri. Keberagaman yang ada di masyarakat bukan dijadikan sebagai alasan untuk permusuhan, melainkan sebagai warna-warni yang indah dalam hidup bermasyarakat. Hal ini sebagaimana ajaran Nabi Muhammad Saw dalam hidup bermasyarakat. Kala itu Piagam Madinah dijadikan pedoman hidup bermasyarakat. Beliau dan umatnya bisa hidup damai dengan kelompok lain: Yahudi dan Nasrani. Peradaban ini sangat indah dan luhur dimana ketika itu mereka dapat hidup berdampingan, bukan hanya beda suku bangsanya, namun berbeda pula agama dan keyakinannya.

Jika pada masa Nabi Muhammad Saw ada Piagam Madinah, di Indonesia ada Pancasila yang menjadi pemersatu bangsa. Lima sila yang terkandung di dalamnya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Arti Bhinneka Tunggal Ika membawa makna yang indah dan damai. Bagaimanapun perbedaan yang ada, seberapa banyak berbedaan itu tetap mempersatukan seluruh warga Indonesia. Jika semua warga negara memahami arti dari Bhinneka Tunggal Ika maka tidak ada lagi pertikaian sesama kelompok, tidak ada kelompok yang menganggap kelompoknya paling kuat, paling benar hingga menyalahkan kelompok lain. Tidak ada lagi istilah kafir mengafirkan sesama pemeluk umat Islam karena bila ini terjadi maka

bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya "Bagimu agamamu, bagiku agamaku".

Sejauh ini kehidupan bermasyarakat umat Islam masih harmonis dengan berpedoman pada ajaran-ajaran Islam dan *sunnah* Nabi Muhammad SAW. Islam di Indonesia masih menjalankan tradisi dari para pendahulunya, para penyebar Islam di Indonesia dan para Wali terutama Walisongo. Tradisi-tradisi yang dilakukan tersebut tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, di antaranya tradisi dalam bentuk ritual maupun seremonial. Semua dijalankan sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Semisal tradisi yang dilakukan oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan putra maupun putrinya maka biasanya orang yang punya hajat mendatangi saudara-saudaranya dan para tetangga untuk meminta doa restu agar hajatnya berjalan lancar dan mendapat ridha, diberkahi oleh Allah Swt. Dalam istilah Jawa tradisi semacam ini dinamakan dengan *atur-atur*. Tradisi masih berlanjut sampai menjelang hari pernikahan, biasanya orang yang akan punya hajat melaksanakan doa bersama dengan mengundang para tetangga dan saudara-saudaranya dengan harapan yang sama, yakni berharap acara pernikahan putra-putrinya mendapat berkah. Sampai mendekati hari pernikahan tradisi juga masih dilaksanakan, biasanya 2 hari menjelang acara pernikahan orang yang punya hajat sudah mulai masak dalam jumlah banyak dan melibatkan para tetangga dan saudara-saudaranya untuk membantu persiapan pernikahan. Mereka bersuka ria bersama-sama bahu-membahu mengerjakan pekerjaan yang ada.

Di sinilah nilai *ukhuwah* tertanam di masyarakat, yang biasanya tidak bertemu karena masing-masing disibukkan dengan urusanya sendiri sendiri, disibukkan dengan pekerjaan, maka dalam moment ini mereka para tetangga dan saudara dipertemukan dalam acara yang bahasa Jawanya adalah *rewang* atau *ewang-ewang* yang artinya membantu dan tidak mendapat upah ataupun bayaran. Mereka bersuka cita mengerjakan pekerjaan yang ada sesuai dengan kemampuannya. Masih berkaitan dengan tradisi menjelang acara pernikahan, biasanya setelah masakan matang dan persiapan dirasa sudah cukup maka *shahibul hajad* melakukan ritual yang di daerah saya dinamakan *manggulan*. Dalam acara ini juga mengundang tetangga dan saudara untuk melakukan doa bersama untuk kelancaran acara pernikahan, dan juga sebagai pertanda bahwa rangkaian acara pernikahan sudah dimulai. Setelah acara *manggulan* ini biasanya *shahibul hajad* memberikan nasi beserta lauk-pauk dan dilengkapi jajan (*berkat*) ke para tetangga dan saudara dengan cara diantarka ke rumah-rumah para tetangga dan saudara. Tradisi seperti ini sebenarnya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya "Wahai Abu dzar, apabila kamu memasak sayur (daging kuah) maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu" (H.R. Muslim).

Islam itu agama indah, ajarannya mudah dilaksanakan hingga tradisi-tradisi yang ada di masyarakat merupakan ajaran Islam yang sudah dikombain sedemikian rupa sesuai denga adat, situasi dan kondisi masing-masing daerah. Tradisi *slametan*, ziarah, tradisi *suran* (*Muharram*), tradisi *mauludan*, termasuk tradisi *halal-bihalal* adalah

sarana untuk menjalankan prinsip kemasyarakatan dan kebangsaan. Kehidupan bermasyarakat umat Islam mampu untuk mempersatukan perbedaan dan membuat ketenangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan beragama.

E. Membangun *Ukhuwah* dalam Bingkai Islam Nusantara

Oleh Ade Idham Prayogi

Islam Nusantara menjadi topik hangat yang terus dan terus diperbincangkan di kalangan intelektual baik akademisi maupun non akademisi belakangan ini. Tema ini menjadi perbincangan hangat karena memberikan solusi baru terkait *karut-marutnya ukhuwah* di antara kaum Muslimin dewasa ini. Muncul berbagai macam gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam dengan membawa paradigma yang cukup miris bahkan mampu memecah belah *ukhuwah Islamiyah, watahaniyah dan basyariah*. Harapan untuk selalu hidup tenang dalam keragaman perlahan mulai terusik bahkan hampir pudar seiring berjalannya waktu.

Untuk kembali menggapai harapan itu maka muncul istilah Islam Nusantara yang dimotori oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi besar Islam ini mengangkat prinsip *tasamuh* dengan harapan agar Muslim di Indonesia kembali meraih ketenangan hidup dalam keragaman yang ada. Inilah prinsip utama dari Islam Nusantara.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh KH. Aqil Siroj selaku ketua umum PBNU dalam dialog kebangsaan di Sumatera Utara. Dalam dialog tersebut beliau mengatakan bahwa pentingnya menjaga *ukhuwah*

watahaniyah dalam bingkai ke-*bhinneka*-an. Dalam pandangan Kiai Said, prinsip *tasamuh* (toleransi) merupakan inti dari Islam Nusantara.

Dari apa yang disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara hadir dengan membawa prinsip *tasamuh* agar mampu menyatukan keragaman yang ada di tubuh umat Islam. Kiai Said mengungkapkan bahwa Islam Nusantara dapat menjadi jembatan perdamaian antaragama. Islam Nusantara berprinsip pada sikap *tasamuh* (toleran). Dan seseorang bisa menjadi *tasamuh*, kalau akhlaknya mulia.

Dalam pandangannya, Islam mengajarkan pentingnya memajukan peradaban dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sejarah, Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun mendeklarasikan negara Islam, kecuali negara *civilized* yang maju. Dengan Islam Nusantara, agama dan budaya terkoneksi secara harmonis. Dengan kata lain, Islam Nusantara itu menghormati budaya dan selama tidak bertentangan dengan Islam, budaya justru menambah estetika.

Prinsip *tasamuh* (toleransi) yang menjadi prinsip Islam Nusantara secara implisit mengajarkan kita untuk selalu menjaga *ukhuwah*, baik di antara sesama kaum Muslimin maupun dengan pemeluk agama lain. Maka jelas bahwa Islam Nusantara hadir untuk kembali membuka harapan umat untuk bisa hidup berdampingan dalam keragaman.

Pendapat negatif yang muncul dalam benak kaum Muslimin tentang konsep Islam Nusantara memang wajar terjadi karena itulah manusia. Manusia diciptakan dengan

perbedaan sudut pandang yang kadang bisa sama dan kadang bisa berbeda. Sayangnya, perbedaan tersebut terus diagungkan layaknya sebuah program kerja unggulan dalam sebuah organisasi. Hingga yang terjadi adalah umat terkotak-kotak, umat terpecah-belah yang akhirnya *ukhuwah* terbengkalai.

Jika diteliti lebih jauh, dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan agar kita tidak bercerai-berai. Artinya, kaum Muslimin dituntut oleh Allah agar selalu menjaga hubungan baik. Dengan prinsip *tasamuh* maka *ukhuwah* akan terbentuk dengan sendirinya. Karena prinsip *tasamuh* sebetulnya hanya menyangkut sisi kemanusian (*insaniah*) dari ajaran Islam tentang bagaimana orang-orang Islam Indonesia secara empiris mengamalkan ajarannya sesuai dengan budayanya dengan tetap berpegangan pada ketentuan syariat.

Maka dari itu, untuk terus menjaga *ukhuwah* dengan berpegang pada prinsip *tasamuh*, ada tiga langkah yang coba saya tawarkan: *pertama*, adalah mencari kebenaran yang dianut bersama. Maksudnya adalah kaum Muslimin bersama mencari kebenaran yang absolut dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Contoh, kewajiban melaksanakan salat *fardhu*. Semua kaum Muslimin jelas meyakini bahwa salat *fardhu* itu wajib yang diperintahkan oleh Allah melalui sebuah perjalan suci Nabi Muhammad Saw, terlepas dari tata cara salat mulai dari takbir hingga salam. Yang jelas, kewajiban salat *fardhu* 5 waktu telah diyakini kebenarannya secara mutlak. Maka, seyogianya inilah yang menjadi pegangan.

Kedua, adalah bukan selalu mencari persamaan dari sebuah perbedaan melainkan justru yang lebih utama

adalah menghargai perbedaan. Sebab perbedaan adalah rahmat Tuhan. Dengan selalu segala bentuk perbedaan terutama keyakinan beragamaan maka sama halnya dengan mengukuhkan persaudaraan. Sikap saling menyalahkan bahkan sampai saling mengafirkan sebenarnya terjadi karena kita belum siap menerima perbedaan. Maka cara terbaik menghargai perbedaan yakni dengan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau harus disingkirkan. Anggaplah perbedaan itu sesuatu yang bisa memberikan kenyamanan tersendiri entah sekarang atau suatu saat nanti.

Ketiga adalah berpandangan objektif dalam suatu masalah. Harus disadari bersama bahwa pandangan objektif adalah pandangan yang tidak akan menimbulkan diskriminasi sosial. Pandangan objektif adalah pandangan yang melihat segala sesuatu dengan mempertimbangan berbagai variabel. Inilah yang harus dilakukan. Selama ini, yang terjadi adalah kita masih selalu menggunakan sudut pandang subjektif dalam menilai permasalahan yang akhirnya tidak menemukan benang merah bahkan bisa menimbulkan permasalahn yang baru. Hal inilah yang harus dihindari. Coba bayangkan apabila kita berada pada posisi mereka, yang terbiasa dengan hujatan dan diskrimasi sosial maka kita akan berpikir berkali-kali untuk memberikan *statement* yang tidak akan menyudutkan mereka.

Nah, dalam konteks Islam Nusantara, sikap seperti inilah yang harus kita kembangkan. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pandangan subjektif, namun lebih pandai untuk menempatkan kapan subjektivitas digunakan dan kapan objektivitas dipakai. Dengan tiga langkah di atas

maka diharapkan *ukhuwah* di antara kita mampu terjalin dengan baik dengan tetap berpegang pada prinsip *tasamuh*. *Insya* Allah kehidupan *ukhuwah* dalam bingkai Islam Nusantara akan kita raih bersama.

F. Merawat Tradisi Menyemai Toleransi

Oleh Muhammad Fatoni

Keberagaman adalah fakta yang tak terbantahkan di negeri yang masyhur dengan sebutan *gemah ripah loh jinawi* ini. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan bentang alam nan luas dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah pulau mencapai ribuan adalah satu anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Rasa syukur itu bisa diungkapkan dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan segala potensi sumber daya yang ada di dalamnya, serta menjaga dan melestarikan segala bentuk tradisi dan budaya yang tersebar luas di pelosok Nusantara.

Semua kebudayaan dan tradisi yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara adalah satu wujud keragaman yang harus dijaga dan dilestarikan. Keragaman bukanlah alasan bagi bangsa ini untuk saling menyerang dan bermusahan antara satu dengan yang lain. Sebaliknya keragaman itu harus bisa menjadi sebuah kekuatan yang mampu memperkokoh keberadaan bangsa ini. Hal itu mustahil bisa tercapai bila tidak ada upaya untuk saling mengenal, saling mengakui dan melengkapi kekurangan serta kelebihan masing-masing.

Sejarah sudah membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah hasil kerjasama dan jerih payah dari

seluruh anak bangsa yang memiliki latar belakang berbeda: suku, budaya, agama maupun ras. Perasaan senasib sepenanggungan untuk meraih kemerdekaan telah mengikis sekat-sekat perbedaan sehingga berpadu dalam bentuk perjuangan. Semua itu diyakini oleh *founding fathers* sebagai berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pilihan bentuk negara ini bukanlah negara Islam melainkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pilihan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan negara berdasarkan satu agama tertentu, adalah satu pilihan yang tepat. Tidak bisa dibayangkan seandainya bentuk negara yang dipilih adalah negara Islam misalnya, mungkin negara ini akan hancur berkeping-keping karena perseteruan antara satu dengan yang lain. Meski bukan negara agama, nyatanya pendiri *cikal-bakal* negara ini telah memilih Ketuhanan yang Maha Esa sebagai salah satu sila dalam dasar negara Pancasila. Satu bentuk pengakuan bangsa Indonesia atas kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan semua makhluk ciptaan-Nya.

Kendati mayoritas penduduk bangsa ini beragama Islam, namun tidak tepat juga bila syariat Islam diformalkan sebagai landasan negara. Apalagi jika harus memberangus berbagai tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam ajaran syariat Islam, entah itu *taghut, bid'ah* ataupun *khurafat*. Sungguh Rasulullah tidak pernah mengajarkan tuntunan demikian.

Cara dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw sangat santun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sesantun beliau. Sejarah telah mencatat dan mengukir

nama beliau sebagai manusia yang menduduki peringkat nomor *wahid* dan paling berpengaruh di dunia. Semua itu tidak terlepas dari kesantunan beliau dalam berdakwah dan kepiawaian beliau dalam meraih simpati baik dari kawan maupun lawan. Akhlaknya adalah al-Qur'an. Beliau mencerminkan al-Qur'an yang berjalan di dunia ini. Karenanya setiap hal yang beliau miliki selalu menjadi teladan dan panutan yang patut untuk ditiru semua umat manusia, khususnya umat Islam.

Secara historis, kedatangan Islam di Nusantara diterima dengan baik, bahkan sebagai agama baru, Islam mengalami perkembangan yang luar biasa pesatnya. Sampai saat ini mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Mengapa Islam mudah diterima dan bisa berkembang dengan pesat di bumi Nusantara? Karena Islam datang dengan membawa kedamaian untuk semua kalangan. Islam tidak membenarkan adanya sistem kasta dalam struktur masyarakat. Semuanya sama, yang membedakan hanyalah iman dan takwanya di hadapan Allah Swt.

Lebih dari itu, H.A.R. Gibb (1945) mengatakan bahwa penyebaran Islam yang spektakuler di negara-negara Asia Tenggara adalah berkat sikap sufi yang dalam banyak hal cenderung kompromis dengan adat-istiadat dan tradisi setempat. Para penyebar Islam di Nusantara pada umumnya adalah kaum sufi yang memiliki jiwa toleransi, bukan kaum fuqaha yang kebanyakan bersikap saklek dan tekstual. Dalam mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam, mereka tidak serta merta melakukan pemberangusan terhadap berbagai tradisi yang ada di masyarakat kala itu. Sebaliknya mereka bersikap kompromis dan melakukan pendekatan secara

halus hingga mampu melakukan perubahan sedikit demi sedikit terhadap tradisi yang dianggap menyimpang.

Para penyebar Islam di Nusantara lebih memilih bersikap toleran terhadap adat dan tradisi yang ada. Hanya saja semua tradisi itu diberi warna yang dalam istilah lain disebut dengan akulturasi. Wujudnya beragam, salah satu di antaranya adalah tradisi *slametan* dan ziarah kubur. *Slametan* sebagaimana yang sering dijumpai di masyarakat Jawa adalah satu bentuk toleransi para pendakwah generasi awal terhadap tradisi. Tradisi ini tidak akan pernah dijumpai di negara-negara Islam lain semisal Timur Tengah. Tradisi ini seolah menjadi ciri khas yang membedakan Muslim Indonesia dengan Muslim lainnya. Kecerdasan para pendakwah awal telah memodifikasi tradisi yang awalnya berbau syirik semisal membuat sesaji untuk arwah leluhur yang telah meninggal dan sejenisnya, menjadi mengeluarkan sedekah untuk sesama manusia yang akrab dikenal dengan istilah *berkat*.

Demikian halnya dengan ziarah kubur. Ziarah kubur dahulu dilakukan untuk meminta pertolongan kepada ruh-ruh nenek moyang atau *danyangan*. Tentu hal ini adalah perbuatan syirik yang dilarang oleh agama. Siapa pun orangnya tidak dibenarkan untuk meminta pertolongan kepada arwah leluhur yang telah mati sebab itu sama halnya menyekutukan Allah. Oleh karena itu tujuan ziarah kubur sebagaimana tuntunan Rasulullah Saw dan para penyebar Islam adalah untuk mengingat kematian, mendoakan dan memohonkan ampun atas dosa yang pernah mereka lakukan selama hidup kepada Allah Swt. Dengan mengingat kematian seseorang akan lebih tekun

dalam menjalani ibadah kepada-Nya.

Nah, karena itulah tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam harus dilestarikan sebagai satu bentuk khazanah Islam. Mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW karenanya ia termasuk ke dalam bentuk *bid'ah* yang menyesatkan dan harus dimusnahkan. Pendapat ini jelas tidak serta merta bisa dibenarkan, apalagi bila sistem dakwah yang diterapkan adalah dengan melakukan kekerasan. Alih-alih akan mendapatkan simpati dari umat, yang terjadi justru sebaliknya, Islam akan dianggap sebagai agama yang menakutkan. Kalau sudah begitu *image* yang timbul, bukannya berdakwah, tetapi sesungguhnya menghancurkan Islam itu sendiri.

Sebetulnya konsep toleransi telah dicanangkan oleh Islam jauh hari sebelum piagam Hak Asasi Manusia (HAM) oleh PBB. Konsep *tasamuh* telah tersirat dalam Surat al-Kafirun (109); 1-6 dan Surat al-Mumtahanah (60); 8. Sangat disayangkan apabila ada di antara orang Islam yang menganggap seorang yang memiliki keyakinan berbeda sebagai musuh yang harus diperangi. Bukankah dalam hukum fikih ada istilah kafir *dzimmi*: seorang yang tidak sekeyakinan dengan umat Islam, namun wajib dilindungi dan tidak boleh diperangi.

Dengan demikian, bangsa Indonesia dengan bentang wilayah yang luas dengan aneka ragam budaya dan tradisi yang ada di dalamnya harus tetap bersatu. Jangan sampai keragaman itu menjadi benih yang menyebabkannya hancur berkeping-keping. Setiap tradisi yang bisa

menambah khazanah bangsa harus dijaga dan dilestarikan. Sikap toleransi harus dikedepankan untuk kepentingan bersama. Dengan sikap toleransi yang kuat maka kemajuan peradaban bangsa, akan segera terwujud sehingga menjadi negara yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

G. Dogma dan Pendangkalan Pemahaman Agama

Oleh Refki Rusyadi

Hadirnya Islam sebagai *trust* bukanlah sebuah kebetulan. *Millah* Ibrahim yang tumbuh dan berkembang di Palestina—bumi para Nabi—sempat menjadi Mercusuar peradaban anak manusia yang mencari *Ilah*. *Millah* yang awalnya tunggal, justru kini hingga sekarang melahirkan tiga arus keyakinan yang terus saling curiga. Bergeser jauh ke selatan, tepatnya di semenanjung Arab di lembah Bakkah (baca; Makkah) tempat Ibrahim mendirikan pondasi awal Kakbah semata karena perintah Tuhannya. Di sanalah selanjutnya, Islam lahir dan berkembang. Sebagai jalur perdagangan antartiga benua besar, Makkah merupakan post-strategis bagi terminalnya para saudagar dari berbagai penjuru dunia. Imbasnya, Makkah pun dihuni oleh masyarakat yang pluralis.

Berdagang adalah mata pencarian masyarakat Makkah. Philip K. Hitti lewat *History of The Arabs*-nya menyatakan, "Praktik pasar dengan corak dan pelaku kapitalis sudah terjadi di Makkah saat itu". Ini artinya, persoalan kesenjangan sosial terjadi begitu menganga. Ada kelas yang ditindas dan menindas. Selain mengemban misi tauhid, nabi juga menitikberatkan pada dakwah keadilan sosial dan ekonomi. Alhasil dakwah nabi dirasa berhasil.

Islam sebagai agama dan spirit pembaru sosial tertancap di Makkah dan Madinah. Keduanya menjadi kota dengan peradaban baru yang lebih beradab (Marshall G.S. Hodgson, 2002). Sejarah emas terukir di kota tersebut. Cerminan bumi damai bagi keragaman corak budaya bahkan agama umat manusia bersinar di kedua kota itu.

Di era global yang amat kompleks ini, Islam dan Muslim dihadapkan pada segudang persoalan. Terjadinya kesimpangsiuran informasi atas klaim-klaim keislaman secara sepihak-subjektif, semakin hari kian membingungkan masyarakat dan tidak terkontrol oleh siapa pun. Kecanggihan teknologi informasi media elektronik lewat jaringan internet, sangat besar pengaruhnya dalam membentuk opini publik tentang agama bagi masyarakat luas. Isi dakwah para pemuka agama lewat media ceramah dan *majelis-majelis ta'lim*-pun lebih bersifat *profan* dan menjemukan.

Teologi yang awalnya dekat dengan keadilan sosial dan ekonomi, mulai beralih ke masalah-masalah eskatologis dan *kavling-kavling* kebenaran golongan. Sebenarnya gejala ini sudah lama terdeteksi, sejak zaman imperium Bani Umayyah. Islam, penguasa, dan kekuasaan bergandeng mesra mempertahankan status *quo*-nya. Sehingga Islam semakin menjauhkan perhatiannya kepada masyarakat lemah, *mustada'fin* dan kaum proletar.

Ada banyak faktor yang menyebakan masyarakat Muslim tidak berdaya dihempas realitas baru, yakni gelombang revolusi informasi dalam *borderless society*. Hemat penulis, salah satu pemicunya ialah soal sudut pandang umat atas Islam sebagai realitas masa kini.

Kontribusi Islam dan Muslim, belum banyak mewarnai dan berperan atas peradaban maju hari ini. Jumlah mayoritas tadi cuma sibuk mengejar kepopuleran dalam segala hal. Semisal, eksistensi, jati diri, bahkan beragama. Dalam term yang lain: meninggalkan yang hakiki demi mengejar yang imaji. Jean Baudillard menyindir tentang kesejatian dan keabadian pada masyarakat kontemporer adalah semu. Hal ini dicirikan lewat kegandrungan umat akan budaya popular, komoditas, *lifestyle*, konsumerisme, permainan citra (*image*) yang kesemua itu telah terseret dan bercampur pada realitas ritual keagamaan, misalnya salat, puasa, zakat, lebaran, dan haji. Maka sejumlah ritual tadi akan bernilai dangkal sebab yang muncul adalah artifisialitasnya saja.

Faktor lainnya ialah, watak konsumerisme menjangkiti pelaku beragama. Watak konsumerisme tidak hanya berhasrat pada hal materialistik saja, ranah spiritual pun bisa menjadi objek jajahannya. Apa yang ditampilkan oleh konsumerisme ialah pesona citra dan penampakan yang bernilai *imanen*. Masyarakat konsumerisme adalah masyarakat "tontonan" yang akan gemar dan bangga dengan apa-apa yang dilakukannya untuk selalu terekspose. Amir Piliang lewat bukunya yang berjudul *Postrealitas* mengatakan:

> Di era saat ini (kontemporer), masyarakat dihadapkan dengan kondisi post-spiritualitas. Kondisi ini ditandai dengan sesuatu yang disebut suci dicemari oleh yang kotor, yang spiritual dirusak oleh material yang ilahiah ditunggangi duniawiah. Kesucian itu sendiri kini hadir lewat bentuk simulasinya yang bersifat permukaan dan artifisial, yang mendeviasi wajah kesucian yang sebenarnya (*simulacrum of holiness*)."

Kembali pada permasalahan awal, agama sebagai objek yang tak kasat mata (non materi) merupakan bagian dari realitas. Objek realitas bukan melulu membahas yang nyata. Jika yang nyata itu kita maksud dengan sesuatu yang kita lihat, dengar, cium, dan rasakan maka ke semua tadi hanyalah definisi yang hadir dari sinyal otak lewat pembiasaan. Persoalan tentang realitas memang sudah setua umur peradaban manusia itu sendiri. Plato mendefiniskan realitas lewat karyanya yang fenomenal berjudul *Politea.* Dalam buku itu, Plato menggambarkan manusia hidup di dalam gua dengan tangan yang terikat di leher. Di mulut gua, ada api yang menimbulkan bayangan mereka sendiri dan entitas lain yang lalu-lalang di depan gua. Seolah bayangan tadi adalah objek yang hidup dan nyata, sedangkan manusia tadi hanya menyaksikan sosok bayangan dengan keadaan seperti itu selamanya tanpa hendak keluar, melihat dan menyaksikan wujud keadaan sebenarnya. Padahal ke semua objek tadi adalah sebuah "sangkaan".

Begitulah Plato menggambarkan realitas. Sama halnya dengan agama, jika kita hanya berprasangka tanpa mau mengenalinya dengan kesadaran berpikir dalam mengkaji nilai-nilai ajaran agama, al-Qur'an, sunah, hadis lewat bimbingan ahlinya, kita pun akan terperangkap dalam sangkaan kita sendiri. Gempuran informasi keagamaan lewat dunia maya pun harus kita sadari dengan mata terbuka. Jangan sampai gambaran agama yang kita sangka lewat dunia maya justru melampaui sangkaan yang kita kira hingga menjadi *hyper-rality.* Sampai saat ini, sebagian dari kita masih terpesona pada tampilan luar realitas keagamaan. Nilai-nilai *transenden* kita abaikan demi yang *imanen.*

Semua ritual yang kita geluti tiap hari, sedikitpun tidak berdampak pada perubahan individu dan sosial yang lebih baik. Agama sebagai ajaran moralitas hanya mengarahkan pemeluknya kepada tujuan surgawi dan (barangkali) materi semata. Hampir tidak ada implikasi sosial yang kita torehkan. Melihat sesama Muslim yang beda pandangan saja seketika mulut kita ini menyeletuk dengan beragam kata: sesat, kafir, *bid'ah* dan seterusnya. Lantas sejak kapan manusia diperbolehkan bertindak laiknya Tuhan? Belum lagi, perkara iri dan dengki. Pertanyaan yang kemudian patut kita ajukan, sebenarnya apa yang kita cari? Kemuliaan, kekayaaan, atau semata-mata menyenangkan Tuhan? Kalau semata-mata menyenangkan Tuhan berarti kita tak hanya saleh secara spiritual melainkan juga sosial. Saleh sosial berarti menghargai perbedaan, merawat keragaman dan santun dalam betutur serta bertingkah laku.

H. Polaritas Keberagamaan Modern di Indonesia: Titik Temu Liberalisme dan Fundamentalisme Islam

Oleh Mir Fahmi M.R

Wacana liberalisme dan fundamentalisme Islam menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk memikirkan kembali apa hakikat Islam dan bagaimana Islam yang *rahmatan lil alamin*? Meskipun upaya untuk mencari titik temu (*meeting point*) ini bagaikan mengukir langit atau paling tidak menemukan tanda-tanda keduanya untuk menjadi salah satu solusi bagi perkembangaan Islam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui masing-masing kelompok saling memberikan pengaruhnya melalui media dan organisasi sampai pada akhirnya menciptakan polaritas.

Tidak jarang polaritas ini berbuah menjadi bentrok fisik ketika emosi dan sentimen dilibatkan atas nama agama bahkan Tuhan. Di sebagian negara Timur Tengah terjadi berbagai tindak kekerasan atas nama agama yang dampaknya terasa sampai Indonesia. Gerakan terorisme yang dilakukan juga memakan korban dari umat Islam sendiri. Tindakan kekerasan atas nama agama terhadap sesama umat Islam kemudian mengambil bentuk lain seperti pengafiran sampai pengahalalan darah seorang Muslim.

Kita juga melihat pihak yang berseberangan mempunyai upaya yang sistematis dengan alur sebaliknya, menyuarakan liberalisme, yang dalam taraf tertentu menggoyahkan sisi-sisi keberagamaan masyarakat yang mapan. Dua sisi ekstrem yang telah disebutkan di atas sesungguhnya adalah minoritas. Sedangkan kelompok mayoritas pada umumnya mereka bertindak sebagai "*silent majority*". Seiring berjalannya waktu tampak bahwa kubu mayoritas menjadi lahan untuk menanam benih-benih pengaruh ekstrem masing-masing kelompok. Sehingga bukan tidak mungkin kelompok mayoritas justru akan terpecah.

Oleh sebab itu, upaya mencari *meeting point* dengan menjembatani polaritas di atas diharapkan mampu meredakan anarkisme-radikalisme. Meskipun ini sulit namun upaya-upaya menciptakan dialektika keislaman tetap perlu dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman yang komprehensif demi kemaslahatan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya.

Polaritas: Liberalisme dan Fundamentalisme Islam

Hegemoni Barat memicu reaksi yang bersifat intelektualis yang terpolar pada gerakan oksidentalisme oleh kelompok Islam Liberal. Liberalisme Islam lahir dari tokoh-tokoh yang sebagian besar pernah menempuh studi di Eropa atau Amerika: Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, Ashgar Ali Engineer, Ali Syariati. Demikian halnya dengan Harun Nasution, Nurcholis Madjid, Ulil Absar Abdalla juga pernah studi di Eropa dan Amerika. Dengan demikian kita dapat menganalogikan eksistensi mereka dengan kaum

Muktazilah yang hidup pada masa Daulah Abbasiyah, masa keemasan Islam.

Keberadaan kaum Muktazilah sangat membantu kemajuan Islam karena mereka merupakan sekelompok kaum Muslimin yang sangat mengutamakan pemikiran rasional (Engineer, 1993: 73). Runtuhnya peradaban Islam ditandai dengan hilangnya kaum Muktazilah dari keilmuan Islam. Petaka di tubuh Muktazilah justru terjadi karena ekstremitas yang mereka usung sendiri. Ekstremitas Islam liberal juga terlihat dengan memposisikan perkembangan zaman sebagai tolok ukur sedangkan ayat-ayat kitab suci hanya diposisikan sebagai *makmum*. Maka tidak jarang di antara mereka dengan berani membongkar hal-hal baku dalam tradisi Islam yang dianggap tidak relevan dengan zaman.

Etos modern yang menekankan rasionalitas dan sikap kritis menumbuhkan kecenderungan liberal dalam diri seseorang. Seorang modern tidak cukup sekadar melestarikan tradisi keberagamaan melainkan juga menemukan bentuk keberagamaan yang diyakininya. Muslim liberal juga bisa pula berarti orang yang tidak tertarik dengan bentuk keberagamaan yang doktriner, legal-formal, hitam-putih, Muslim-kafir, *sunnah-bid'ah* tetapi lebih mengedepankan spiritualitas pribadi.

Pada abad ke-20, fundamentalisme Islam adalah gerakan mendefinisikan Islam sebagai sistem politik untuk menandingi ideologi yang berkembang saat itu. Namun, seiring semakin kuatnya hegemoni Barat, gerakan ini kemudian bermanuver untuk memperjuangkan syariat Islam dan melupakan Islam sebagai ideologi politik.

Fundamentalis menggunakan pendekatan yang sangat literal dalam mengkaji Islam. Menurut Ulil Abshar, pendekatan ini cenderung memenangkan ayat-ayat suci dalam keadaan apa pun. Apa yang dikatakan oleh ayat harus diikuti secara hafriah, apa adanya; *take it or leave it, nothing in between.*

Perjuangan yang tak kenal lelah dalam menegakkan syariat Islam menimbulkan resistensi terhadap kelompok yang berbeda pemahaman dan keyakinan. Kebencian dan penolakan terhadap Barat menjadi sikap final mereka. Hal ini yang menjadikan kelompok fundamental juga dekat dengan radikalisme.

Mark Juergensmeyer (1993), mengatakan bahwa radikalisme Islam muncul akibat gagalnya nasionalisme sekuler dalam mengakomodasi aspirasi kalangan agamawan. Kalangan Islam radikal, menurutnya, tidak menolak modernitas dalam konteks ilmu pengetahuan atau teknologi, tetapi mereka tidak bisa menerima ideologi sekularisme dan materialisme yang ada di dalamnya.

Sekularisme mendapat penolakan yang kuat kaum fundamentalis karena sistem itu tidak memberi banyak ruang bagi ajaran Islam untuk berkembang, terpinggirkannya kaum Muslim, serta kian parahnya krisis yang melanda dunia Islam. Sementara itu ideologi sekuler justru semakin kuat pengaruhnya di dunia Islam.

Meluasnya radikalisme di dunia Islam tentu saja membuat Indonesia patut khawatir. Fenomena ISIS harus kita waspadai karena pengaruhnya sudah masuk di bumi Indonesia. Tidak sedikit simpatisan berasal dari Indonesia yang mendukung gerakan ini. Belakangan juga tidak kalah

menarik perhatian umat Islam terkait pembubaran ormas HTI yang menolak ideologi Pancasila. Menurut hemat saya, sikap ekstrem dalam beragama justru akan menimbulkan banyak problem di tubuh umat Islam itu sendiri.

Titik Temu Liberalisme dan Fundamentalisme Islam

Islam liberal dan fundamental telah menjadi dua pihak yang berbenturan satu sama lain bak polaritas kontra produktif, khususnya antara kelompok ekstrem di kedua belah pihak. Masalah semakin rumit karena ada pihak yang berusaha memprovokasi dan menumpangi konflik ini. Sulit untuk menyebut konflik ini bebas dari misi politis-pragmatis guna menancapkan dominasi dan hegemoni negara-negara Barat atas dunia Islam.

Tidak ada umat Islam yang menghendaki adanya pertentangan antara kedua kelompok minoritas yang mengakibatkan kerugian umat Islam sendiri. Meskipun ini juga tidak bisa lepas dari konsep mayoritas-minoritas di satu sisi dan pada sisi lain antara konsep kiri-kanan-dan tengah. Konsep yang saya sebut terakhir identik dengan kelompok mayoritas.

Kelompok mayoritas perlu menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjaga keseimbangan dalam segala hal, baik akidah, ibadah, adat-istiadat, transaksi, kehidupan sosial dan keinginan manusia. Ini adalah pendekatan Illahi luhur yang melindungi manusia dari kecondongan salah satu dari dua kutub ekstrem ketika menetapkan berbagai jenis hubungan berdasarkan keseimbangan.

Pendekatan umum yang menjaga keseimbangan, harmoni di dalam hubungan dan lapisan masyarakat ini

bisa disebut dengan moderasi Islam. Jalan tengah ini menggunakan pendekatan yang memposisikan ayat-ayat suci dan juga perkembangan zaman secara sinergis beriringan. Sikap moderat juga menjadikan umat Islam *open minded* dengan semua pihak baik agama, budaya, peradaban, perkembangan global dll. Eksistensi umat Islam dalam posisi moderat akan membawa mereka tidak hanyut dalam kebebasan yang kebablasan seperti liberalisme, tidak pula kaku dan merasa paling benar seperti fundamentalisme, melainkan memadukan keduanya dalam segala aspek kehidupan dengan proporsional.

Islam tidak hanya sanggup memuaskan rasio, tapi juga jiwa dan rasa. Begitupun dengan dimensi yang lain Islam menganjurkan pemeluknya untuk meraih materi duniawi, tetapi dengan orientasi ilahiah. Senada dengan itu, Islam sama sekali tidak menghalangi manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, seperti makan, minum, hubungan badan, tetapi dalam melakoninya diharapkan ditata dengan nilai-nilai spiritual.

Dalam posisi moderat, kita bisa menyaksikan siapa pun, dari arah manapun sekaligus disaksikan oleh umat lain sebagai panutan. Sebagai konsekuensi logisnya, perlu tertanam sifat adil di dalam diri umat Islam. Semua hal yang memiliki kesamaan padanan kata dengan moderat, harus berlaku adil dan tidak memihak kepada siapa pun. *Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil* (QS. Al-Maidah [5]: 8).

I. Matematika dan Seni Bernalar yang Benar

Oleh Elok Fitriani Rafikasari

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang digunakan dalam hampir setiap sendi kehidupan, bahkan bisa dikatakan matematika adalah ilmu fundamental yang membantu kita dalam mempelajari dunia. Ilmu ini merupakan ilmu wajib yang dipelajari dalam semua jenjang pendidikan baik pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Sejarah saintifik matematika, sebagian dipelajari dalam bangku sekolah bahkan kuliah. Namun pada tataran itu, jarang sekali disebutkan nama-nama ilmuwan Muslim dalam sejarah perkembangan matematika dunia. Seolah matematika adalah ilmu warisan dari non-Muslim.

Jika kita cermati lebih mendalam, matematika sangat erat hubungannya dengan berbagai latar belakang keilmuan, bukan hanya kaitannya dengan matematikawan Muslim, melainkan korelasi positif dengan konsep ajaran Islam yang paling dasar: tauhid. Konsep tauhid dalam ajaran Islam mengajarkan keesaan Allah, esa berarti tunggal yang dapat dianalogikan dengan bilangan "satu". Dalam konsep teori bilangan, "satu" merupakan bilangan yang istimewa karena bilangan satu merupakan bilangan pertama yang masuk akal dan satu-satunya bilangan yang hanya mempunya

satu faktor yaitu bilangan "satu" itu sendiri. Hal ini sesuai dengan sifat Allah *laysa kamitslihi syai'un,* bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Inilah salah satu alasan pentingnya mempelajari matematika yang bisa diawali dengan pengetahuan mengenai matematikawan Muslim yang telah banyak berjasa dalam membangun peradaban matematika dunia.

Ironisnya, kebanyakan nama yang sering disebutkan dalam sejarah adalah jajaran nama ilmuwan Barat yang lebih familiar. Pythagoras misalnya, yang fenomenal dengan *Teorema Pythagoras*-nya, selain itu ada Isaac Newton, sang penemu teori kalkulus, Wilhelm Leibniz yang berkontribusi besar dalam bidang *Topologi*, *Euclid,* bahkan kerap mendapati gelar Bapak Geometri dengan *magnum opus*-nya, *Elements,* sebuah karya monumental dalam matematika. Kemudian Bernhard Riemann yang terkenal dengan *Integral Riemann*-nya, Euler dengan konsep fungsi dan kemampuannya dalam memecahkan masalah dalam teori *Graph* yakni *Koenigsberg Bridge* atau jembatan *Koenigsiberg*, serta banyak nama-nama tokoh Barat lainnya. Argumen ini seolah berbalik dengan realita, jika melihat potret sejarah perkembangan ilmu di dunia Islam, masa kejayaan Islam tidak dikotomis terhadap wilayah keilmuan. Ilmuwan Muslim memberikan kontribusi terhadap belantika keilmuan dunia, begitu juga sebaliknya.

Miris sekali memang ketika kita lebih akrab dengan nama-nama tokoh ilmuwan Barat padahal tidak sedikit ilmuwan Muslim yang ikut mewarnai berkembangnya peradaban matematika dunia. Pengetahuan mengenai matematikawan Muslim penting untuk dimiliki agar kita

mampu meneladani dan turut berbangga akan adanya mereka. Selain itu, kita dapat termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pengetahuan guna mengembangkan teori-teori yang sudah ditemukan para pendahulu. Tidak kalah dengan matematikawan Barat, matematikawan Muslim banyak menemukan konsep-konsep yang menjadi dasar penemuan konsep yang lebih lengkap dan spesifik. Dalam tulisan ini akan saya bahas beberapa matematikawan Muslim yang berkontribusi besar terhadap perkembangan matematika, antara lain: al-Khawarizmi, Umar al-Khayyam, Abu al-Wafa dan al-Biruni.

Kontribusi Matematikawan Muslim

Al-Khawarizmi yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi merupakan matematikawan Muslim yang banyak memberi sumbangan dalam bidang aljabar. Al-Khawarizmi dikenal di Barat dengan sebutan al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa sebutan yang lain. Penemuan besar al-Khawarizmi antara lain penggunaan variabel dan simbol yang digunakan untuk menyederhanakan masalah sehingga terbentuk persamaan matematis yang selanjutnya akan lebih mudah untuk dicari solusi atau penyelesaiannya. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam menemukan bilangan "nol" yang merupakan langkah awal dalam mengenalkan bilangan desimal. Al-Khawarizmi juga menemukan nilai konstanta phi (π) yang ditetapkan dengan nilai $2/7$ atau 3,14 yang membantu dalam perhitungan mengenai luas dan keliling lingkaran serta volume bola. Daftar logaritma dan penyelesaian

persamaan kuadrat merupakan konsep lain yang ditemukan al-Khawarizmi. Persamaan kuadrat yang secara umum mempunyai formula $ax^2 + bx + c = 0$ dipecahkan dengan menggunakan konsep variabel dan akar kuadrat dengan solusi yang diperoleh dari rumus yang terkenal dengan sebutan rumus ABC, $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a}}{2a}$. Karya fenomenal dari al-Khawarizmi adalah *al-Mukhtashar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah* yang membahas tentang proses penyelesaian aljabar dan persamaan.

Ilmuwan matematika selanjutnya adalah Umar al-Khayyam, ia merupakan ahli matematika di bidang aljabar lanjut yang banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep yang ditemukan oleh al-Khawarizmi. Aljabar lanjut yang dikemukakan oleh Umar al-Khayyam adalah mengenai penyelesaian persamaan kubik atau pengkat tiga. Hal ini berbeda dengan al-Khawarizmi yang lebih banyak *concern* dalam persamaan kuadratik.

Matematikawan berikutnya adalah Abu al-Wafa yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Yahya bin Ismail bin al-Abbas Abu al-Wafa al Buzjani. Abu al-Wafa terkenal dengan penemuan konsep trigonometri yaitu *tangent*, *cotangent*, *secant* dan *cosecant*. Penemuan besarnya yaitu dalam menemukan formula penjumlahan, setengah sudut dan sudut ganda dalam trigonometri:

$$\left.\begin{aligned} \sin(A+B) &= \sin A \bullet \cos B + \sin B \bullet \cos A \\ \cos(A+B) &= \cos A \bullet \cos B + \sin A \bullet \sin B \\ \tan(A+B) &= \tan A + \tan B \,/\, 1 - \tan A \bullet \tan B \end{aligned}\right\} \text{formula penjumlahan}$$

$$\left.\begin{aligned} 2\sin^2 \tfrac{1}{2}A &= 1-\cos A \\ 2\cos^2 \tfrac{1}{2}A &= 1+\cos A \end{aligned}\right\} \text{ formula setengah sudut}$$

$$\left.\begin{aligned} \sin 2A &= 2\sin A \bullet \cos A \\ \cos 2A &= \cos^2 A - \sin^2 A = 2\cos^2 A - 1 = 1 - 2\sin^2 A \end{aligned}\right\} \text{ formula sudut ganda}$$

Selain Al-Khawarizmi, Umar Al-Khayyam dan Abu Al-Wafa masih ada Al-Biruni yang mempunyai nama lengkap Abu Raihan Al-Biruni. Beliau merupakan salah satu sahabat dari Ibnu Sina atau lebih dikenal dengan Avicenna di dunia barat yang merupakan ahli dalam bidang kedokteran. Kontribusi Al-Biruni dalam matematika tidak hanya dalam satu bidang melainkan dalam beberapa bidang keilmuan matematika antara lain dalam teori bilangan khususnya bilangan irrasonal, aritmatika, analisis kombinatorial, geometri dan beberapa metode dalam pemecahan masalah penjumlahan aljabar.

Banyaknya ilmuwan Muslim khususnya di bidang matematika seharusnya dapat menjadikan cambuk bagi kita untuk tidak berhenti dalam berinovasi dan memberikan sumbangsih dalam bidang keilmuan masing-masing. Hal ini dimaksudkan dengan harapan suatu saat kejayaan peradaban sains dunia akan kembali didominasi oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim sehingga tidak lagi ilmuwan Barat saja yang namanya menggaung terutama dalam bidang sains.

Mathematic as Way of Thinking

Jika pada bagian awal tulisan ini penulis telah memberikan pemaparan tentang urgensi matematika dalam kehidupan, berikut juga pemaparan tentang kontribusi para

matematikawan Muslim dalam perkembangan peradaban matematika dunia, pada bagian kedua tulisan ini, penulis akan memberikan uraian tentang hakikat matematika. Sebuah anggapan yang kurang tepat jika matematika hanya dianggap sebagai kajian tentang angka dan identik dengan rumus. Lebih dari itu, matematika juga merupakan sebuah sistem yang terorganisir, alat dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan kehidupan, matematika juga merupakan bahasa dan yang tak kalah penting matematika juga merupakan sebuah pola penalaran.

Matematika menjadi dasar pengembangan berbagai bidang keilmuan yang lain, oleh karenanya matematika ditasbihkan sebagai *Queen of Science.* Jika kemudian matematika diajarkan di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, hal itu tak lain dikarenakan matematika diyakini dapat melatih agar para peserta didik memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memeroleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif seperti sekarang ini.

Segala kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik sebagai tujuan pembelajaran matematika tersebut terasa sangat kontekstual dengan era ini. Era dimana segalanya berlangsung dengan sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Perubahan sosial yang teramat cepat tersebut memungkinkan terjadinya disorganisasi sebagai bagian dari proses penyesuaian diri.

Urgensi Matematika di Era *Proxy War*

Kemajuan teknologi dan informasi membuat arus perubahan dunia semakin cepat. Satu dari sekian banyak perubahan yang terjadi adalah dalam ranah pergesekan dua kekuatan yang beradu kuat. Jika dulu masih lazim kita temui dua kekuatan besar beradu senjata pada medan laga peperangan, saat ini kita akan sangat sulit menemuinya. Perang di era ini telah bergeser dari perang konvensional menuju perang *proxy* (*proxy war*). Perang *proxy* (*proxy war*) diartikan sebagai sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung. Alasanya yakni untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berdampak pada kehancuran fatal (Iffatin Nur, 2017).

Menurut penuturan Agus Sutomo, Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, dalam sebuah sesi kuliah umum di UNPAD, dalam makalahnya Agus menjelaskan bahwa dalam *proxy war* tidak lagi terlihat siapa lawan siapa kawan karena dilakukan oleh *non state actor* (UNPAD, 2016). Rupa *proxy war* di Indonesia antara lain adalah gerakan radikal, peredaran narkoba, pemberitaan media yang provokatif, penyebaran paham menyimpang, dan lain sebagainya.

Di medan peperangan *proxy* seperti sekarang ini, memiliki pola pikir yang sistematis dan logis mutlak diperlukan agar tidak tergerus arus propaganda dan provokasi yang massif. Oleh karenanya matematika menemukan relevansinya dengan zaman ini. Matematika menjadi penting salah satunya dikarenakan matematika melatih seseorang untuk bernalar dengan benar. Matematika

memuat cara pembuktian yang sahih (valid), rumus-rumus atau aturan yang umum, atau sifat penalaran matematika yang sistematis (Sumardyono, 2004).

Pemahaman yang benar akan matematika akan menjadikan seseorang setidaknya tidak mudah percaya dengan arus propaganda dan terlebih berita *hoax* yang isinya rata-rata menebar kebencian kemana-mana. Pola pikir logis yang dikembangkan matematika akan menjalankan asumsi-asumsi dasar yang kita yakini sebagai acuan dan referensi dalam merespon dan menginterpretasi berbagai situasi, keadaan yang menjadi dasar bagi sikap, keputusan, dan tindakan kita menurut suatu pola atau logika tertentu (Budi Manfaat, 2010).

Wallahu a'lam bisshawab.

J. Integrasi Islam terhadap Sains dan Peradaban

Oleh M. Luqman Hakim Abbas

Ilmu pengetahuan modern yang sekarang dikaji dan dipelajari di Universitas seluruh dunia berasal dari wilayah Eropa Barat. Seluruh kerangka filsafat, ilmu pengetahuan, dan sains terapan yang ada di seluruh dunia berasal dari sana. Di sana ada gerakan revolusi intelektual *renaissance* dan humanisme yang mempunyai peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern yang tumbuh cepat dan pesat sampai saat ini. Gerakan ini merupakan gerakan perlawanan kaum intelektual Eropa Barat atas dominasi Gereja dalam menjelaskan gejala-gejala alam dan fenomena-fenomena sosial.

Hal demikian dikarenakan Bibel tidak dapat dijadikan landasan ilmiah dalam menjelaskan gejala-gejala alam dan fenomena-fenomena sosial tersebut. Sebagai contoh kasus Galileo Galilei yang divonis penjara seumur hidup oleh dewan tinggi Agama Gereja karena mengajukan teori yang bertentangan dengan Bibel, yaitu tentang teori Matahari sebagai pusat tata surya sehingga bumi beredar mengelilingi Matahari (heliosentris), bukan Matahari yang mengelilingi bumi (geosentris) seperti dijelaskan oleh Bibel. Tidak sedikit ilmuwan yang mengalami kekejaman dan tangan besi dari gereja karena teori-teorinya yang bertentangan

dengan Bibel sehingga menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara ilmuwan dengan agamawan gereja.

Hubungan yang tidak harmonis antara ilmuwan dengan temuan ilmiahnya dan agamawan dengan rujukan kitab Bibel-nya mengakibatkan konflik terbuka di antara keduanya. Hal ini meninggalkan luka batin yang sangat dalam sehingga menjadi momentum untuk melakukan perlawanan ilmuwan terhadap hegemoni agama Kristen. Akhirnya banyak ilmuwan yang membangkang, benci dan semangat anti Tuhan dikarenakan ketidakmampuan Bibel dalam menjawab gejala-gejala alam dan fenomena-fenomena sosial sehingga menyebabkan lahirnya ilmu pengetahuan yang jauh dari sentuhan Tuhan. Persoalan Tuhan, surga, neraka, dan takdir dianggap suatu yang tidak rasional dan jauh dari kaidah-kaidah ilmiah. Lebih parahnya, agama dianggap hasil pemikiran manusia dalam merespon gejala-gejala alam. Manusia yang lemah membutuhkan sesuatu yang bisa disembah untuk menenangkan hatinya. Oleh karena itu, agama hanya tumbuh pada masyarakat yang tertindas dan tak berbudaya.

Pola pikir anti Tuhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan telah menumbuhkan sikap materialisme sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang alam mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak terkontrol melalui pengamatan indra dan metode ilmiah. Sedangkan ilmu pengetahuan tentang manusia atau ilmu sosial mengalami perkembangan yang membingungkan. Ilmu pengetahuan sosial dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi, hipotesa-hipotesa dan pemikiran yang bersifat subjektif sehingga belum jelas

kebenarannya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, ternyata belum mampu untuk memahami hakikat dirinya. Sungguh, bagaimana manusia akan menjelaskan tentang kosmos dengan segala isinya jika untuk memahami dirinya sendiripun tidak bisa? Semakin kompleks dan rumitnya permasalahan yang ada dunia mempertegas bahwa manusia tidak mampu mengelola kehidupan dan lingkungan. Ilmu pengetahuan tanpa sentuhan agama adalah ilmu yang menghancurkan manusia itu sendiri. Usaha ilmuwan Barat dalam menjauhkan Tuhan dari ilmu pengetahuan manusia di bawah pada titik nadir peradaban. Sehingga diperlukan upaya dekonstruksi bagaimana cara menemukan ilmu pengetahuan dengan mengharmonikan agama spiritual dan intelektual dalam membangun suatu ilmu.

Di saat hampir bersamaan, muncul peradaban baru di Asia Barat yang mulai tumbuh dan berkembang sehingga mencapai puncak kejayaannya. Peradaban ini hampir sama dengan peradaban yang ada di Eropa Barat waktu itu. Jika di Eropa Bible sebagai sumber kajian ilmu pengetahuaannya maka di Asia al-Qur'an-lah yang menjadi landasan untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Kedua peradaban ini memiliki kitab suci yang digunakan sebagai landasan ilmu pengetahuan tetapi hasil akhir yang diperoleh sungguh sangat jauh berbeda, bahkan bertolak belakang. Eropa Barat terpuruk dalam kegelapan, sedangkan Asia Barat menjelma menjadi peradaban besar yang cemerlang, mengagumkan dan menghasilkan universitas-universitas terbaik dunia. Pada saat itu ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat, di antaranya ilmu hitung, fisika, kimia, astronomi, sastra, kedokteran, bahkan etika berkembang menjadi suatu

peradaban. Bisa digambarkan peradaban Asia Barat saat itu membawa keamanan dan kedamaian.

Kemegahan peradaban Asia Barat, akhirnya memengaruhi peradaban Eropa. Gagasan-gagasan intelektual sebagai hasil kebudayaan Asia Barat banyak dipelajari oleh para ilmuwan Eropa pada masa itu dapat membentuk *image* baru peradaban Eropa. Ketika mencermati segala bentuk konfrontasi yang banyak terjadi antara Kristen dan Islam pada abad pertengahan, jelas bahwa pengaruh Islam terhadap Umat Kristen Barat sangat besar melebihi yang selama ini disadari. Islam tidak hanya telah memberi begitu banyak produk material dan penelitian teknologi pada Eropa-Barat, Islam juga tidak hanya telah menstimulasi Eropa secara intelektual dalam bidang sains dan filsafat tetapi lebih dari itu Islam telah memprovokasi Eropa ke dalam pembentukan sebuah *image* baru tentang dirinya sendiri. Karena Eropa selama ini terlalu antipati melawan Islam, dan menganggap remeh pengaruh Islam serta terlalu melebih-lebihkan ketergantungannya pada warisan Yunani dan Romawi. Jadi saat ini, tugas penting bagi kita, mengubah dan mengoreksi kesalahan sudut pandang ini dan sekaligus memberi penghargaan yang penuh atas hutang kita terhadap Arab dan dunia Islam.

Pengaruh Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat para ilmuwan sadar akan keterpaduan yang tidak mungkin dipisahkan antara intelektual dan spiritual. Ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan sisi spiritual, tidak akan menemukan kebenaran sejati. Ilmu pengetahuan yang seperti ini tidak akan membawa manusia dalam tata kehidupan yang lebih baik. Perkembangan

keilmuan yang seharusnya memberi penjelasan tentang sesuatu, malah semakin mengaburkan konsepsi yang didapatkan. Hal ini menunjukkan harus adanya satu keterpaduan antara potensi intelektual dan potensi spiritual yang dimiliki oleh manusia. Jika kedua potensi ini tidak disatupadukan maka akan menimbulkan kehancuran peradaban, seperti peradaban Eropa Barat pada waktu itu yang mengaburkan moral dan etika, menganggap bahwa Tuhan tidak rasional dan jauh dari kaidah-kaidah ilmiah.

Suatu tugas yang berat bagi ilmuwan dalam upaya untuk dekonstruksi bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh dengan menempatkan Tuhan sebagai landasan utama dalam pemikiran. Tuhan yang diremehkan bahkan tidak diakui eksistensinya oleh ilmuan Eropa Barat, sekarang harus dihadirkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia ilmu pengetahuan. Pembaruan ilmu pengetahuan ini sejatinya sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam AS dan diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya hingga disempurnakan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai nabi akhir zaman. Implikasinya menegaskan bahwa Allah sebagai is real God, tiada Tuhan selain Allah dan menegaskan bahwa Allah sebagai satu-satunya sumber kebenaran ilmu.

Hal ini menjadikan tantangan bagi ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu Ilahi. Tidak ada sumber ilmu pengetahuan paling utama, paling dahulu, dan paling benar kecuali al-Qur'an. Al-Qur'an sumber berbagai ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari al-Qur'an dengan disertai melalui pengamatan indra yang certmat akan menghasilkan landasan yang kokoh menuju

peradaban manusia yang mulia dan tidak mudah runtuh.

K. Kemandirian Ekonomi Muslim: Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup dalam Perspektif Rukun Islam

Oleh Jati Pamungkas

Keadaan Negara Mayoritas Islam

Tak bisa dibantahkan lagi jika berbicara mengenai ekonomi secara global pada saat ini, kedudukan negara-negara yang penduduknya mayoritas memeluk Islam, hanyalah menjadi konsumen (Hunter, 2009: 8). Keadaan tersebut dialami tidak hanya hanya negara "kelas ekonomi menengah" atau berkembang namun juga oleh negara-negara yang kaya raya. Sejak pascakolonialisme berakhir, negara-negara berkembang khususnya yang mayoritas penduduknya Islam tetap saja belum berhasil mengubah "status sosial" menjadi negara yang mampu menghegemoni dalam bidang budaya, teknologi, ekonomi, serta politik internasional (Sayeed, 1995: 31).

Fakta di atas sangat jauh jika melihat dalam literatur sejarah yang mengungkapkan ketika Eropa mengalami masa kegelapan, Islam memiliki masa kejayaan baik di Baghdad dan Kordoba. Pada saat itu Islam menjadi cahaya di dunia baik dalam politik, sosial-budaya, dan ilmu pengetahuan. Keadaan Islam yang sangat dinamis

dan terbuka menjadikan Islam sangat produktif dalam melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam semua bidang. Secara kehidupan kolektif kemasyarakatan, kualitas hidup penduduk Islam hidup dengan makmur (Saliba, 2007: 2). Permasalahannya zaman di masa itu berbeda dengan masa sekarang.

Pada saat itu kehidupan bernegara diatur oleh pusat sehingga berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi rakyat. Peran pusat tentu saja atas dasar penggalian dari al-Qur'an, hadis, *ijtihad* ulama, dan kebijakan pemerintahan (Lambton, 2013: 83). Pada masa sekarang pemerataan ekonomi khususnya kemandirian ekonomi bernegara tidak hanya merupakan peran pemerintah namun perlu adanya kesadaran setiap individu seorang Muslim dalam memahami dengan sungguh-sungguh pengaruh Islam dalam membangun kualitas hidup yang lebih ideal dari segi ekonomi. Penawaran ajaran Islam tentu luas sekali dalam mewujudkan kemakmuran, akan tetapi rukun Islam mempunyai kekuatan dasar dalam membentuk prinsip seorang Muslim dalam kemandirian ekonomi.

Syahadat

Syahadat merupakan kalimat yang harus diucapkan dan dipahami dalam hati seorang dengan penuh keyakinan bahwa hanya Allah saja Tuhan di alam semesta dan meyakini bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Fakta *syahadat* atau keyakinan terhadap Islam pada keluarga Muslim memberikan suatu gambaran bahwa Islamnya seseorang dapat dilahirkan dari sebuah keluarga dan bukan ditemukan dengan pencarian oleh diri sendiri.

Lahirnya bayi dalam keluarga Muslim di dalam ajaran Islam memang disunahkan untuk melaksanakan *aqiqah* atau menyembelih dua ekor kambing bagi bayi laki-laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan. Selain itu wajib bagi orangtua untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk bayi tersebut. Jadi dengan kelahiran, Islam memacu orangtua untuk mengeluarkan material demi menjalakan ke-*sunnah*-an dalam Islam. Bagaimana dapat membeli dua ekor atau seekor kambing dan hal lain jika keluarga tersebut tidak memiliki ekonomi yang mapan ataupun dituntut menjadi seorang yang mempunyai etos kerja serta mempunyai keterampilan dalam menghasilkan materi?

Islam dengan *syahadat* sesungguhnya yang bukan dari proses kelahiran dalam keluarga Muslim mempunyai arti penting terhadap hidup seseorang. Seorang *muallaf* memang pada pertama kali masuk Islam diberi zakat walaupun secara latar belakang sosial berstatus sebagai orang kaya. Namun pada masa berikutnya, *muallaf* tersebut akan diwajibkan dan di-*sunnah*-kan untuk melaksanakan ibadah yang terkait dengan materi atau ekonomi. Ibadah wajib dapat berupa zakat baik fitrah maupun *mal* dan haji, sedangkan ibadah *sunnah* dapat berbentuk *aqiqah*, kurban, infak, wakaf, dan sebagainya. Bagaimana semua ibadah itu dapat dilaksanakan jika keadaan seorang *muallaf* lemah dalam hal ekonomi? Oleh sebab itu *syahadat* merupakan pintu masuk seseorang menerima perintah Islam dalam menjalankan ibadah baik sifatnya nanti terkait dengan ekonomi atau tidak.

Salat

Salat merupakan ibadah yang menjadi ciri khas utama dalam hidup seorang Muslim yang taat. Salat terbagi menjadi dua: wajib dan *sunnah*. Salat wajib dikerjakan lima kali dalam sehari. Jika dilihat dari perspektif material maka salat sangat terkait dengan dengan ekonomi. Misalnya dalam pemenuhan menutup aurat. Dibutuhkan pakaian yang dapat menutup aurat dengan cara membuat atau membeli. Dalam tasawuf menutup aurat saja tidak cukup hanya dengan menutup secara bebas namun dengan memakai pakaian yang bagus, pakaian yang di-*sunnah*-kan, wangi-wangian, dan hal-hal yang baik. Semua barang-barang tersebut harus dipakai untuk mengejar ke-*sunnah*-an. Belum lagi masalah tempat ibadah untuk pelaksanaan salat. Tempat ibadah dapat berupa *langgar* atau masjid haruslah suci, bersih, dan nyaman apalagi semakin bertambahnya umat maka diperlukan bangunan yang luas dan kokoh. Semuanya akan terwujud apabila ekonomi umat Islam kuat.

Zakat

Sebagian besar umat Islam lebih mengenal zakat fitrah daripada zakat *mal*. Padahal zakat *mal* mempunyai keutamaan yang luar biasa dalam menciptakan kemakmuran atau mengurangi kesenjangan sosial. Zakat *mal* dapat berupa zakat pertanian, peternakan, perdagangan, perhiasan, profesi, dan sebagainya yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Ibadah zakat dalam al-Qur'an selalu disebut beriringan dengan salat. Hal tersebut menandakan bahwa mengeluarkan zakat itu penting dan untuk menjadi golongan yang mengeluarkan zakat, sebagai orang Muslim

harus menaikkan statusnya secara ekonomi. Jadi zakat tidak sesederhana membayar zakat fitrah setahun sekali saja namun zakat bentuknya sangat banyak.

Puasa

Puasa yang dimaksud adalah puasa wajib di bulan Ramadhan. Seorang Muslim diwajibkan untuk berpuasa. Dalam ibadah puasa sahur memang di-*sunnah*-kan akan tetapi berbuka adalah hal yang wajib. Memang makan adalah kebutuhan sehari-hari namun karena sifatnya wajib maka berbuka harus dilaksanakan. Solusinya adalah membuat sendiri makanannya ataupun membeli. Dalam hal yang lain, jika seorang Muslim tidak mampu untuk berpuasa dan tidak mampu juga untuk mengganti di hari lain karena tua renta maupun tubuh yang lemah maka harus membayar *fidyah* (Qashim, 2010: 26). Bagaimana membayar *fidyah* jika Muslim yang bersangkutan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-sehari bagi dirinya sendiri?

Secara hakiki, puasa mengajari seorang Muslim berhemat dan hidup sederhana, namun pada kenyataannya perputaran uang sangat cepat di bulan Ramadhan. Kasus tersebut contohnya pada hari selain Ramadhan belum tentu seorang Muslim makan buah atau minum dengan yang manis-manis dalam jumlah yang banyak. Begitu pula pada bulan Ramadhan banyak Muslim yang bersedekah baik memberikan makanan untuk berbuka, santunan terhadap anak yatim piatu, acara amal, dan sebagainya. Belum lagi ada tuntutan kaum buruh dan pegawai untuk pembagian uang tunjangan hari raya, tiket mudik yang naik berlipat-lipat, persiapan hari raya dengan mempersiapkan uang

untuk anak-anak, jajanan lebaran, mengecat rumah, dan sebagainya. Semuanya berkumpul menjadi satu di bulan Ramadhan tepatnya di sepuluh hari terakhir menjelang hari raya. Semuanya harus didasari niat yang tulus dan menghindari hal-hal yang merugikan keuangan sendiri. Fenomena tersebut menunjukkan di bulan Ramadhan secara kultural menuntut seorang Muslim bekerja keras demi mencapai tujuan-tujuan kultural-religius.

Haji

Dari sudut pandang wilayah, Muslim di Indonesia membutuhkan perjuangan ekstra untuk melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima: haji karena perbedaan geografis sehingga membutuhkan persiapan yang sangat matang terutama dari segi ekonomi. Catatan penting dari haji adalah tidak semua Muslim mendapat panggilan Allah untuk berhaji. Pada saat ini di Indonesia biaya haji mencapai 34 juta rupiah ditambah waktu tunggu dari 11 hingga 29 tahun. Jika ketika umur 40 tahun terdaftar sebagai peserta haji kemungkinan terburuk berangkat pada umur 69 tahun di daerah yang waktu tunggunya lama. Masalah tersebut akan muncul seiring bertambahnya penduduk dan bertambahnya calon pendaftar haji yang tidak diimbangi dengan penambahan kuota haji untuk Indonesia. Akibatnya banyak Muslim Indonesia mengambil jalan pintas dengan haji plus yang lebih mahal dengan waktu tunggu paling lama selama 7 tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk haji plus sebesar 100 juta lebih (*haji.kemenag.go.id*). Selain haji plus banyak Muslim Indonesia yang juga mengambil jalan pintas untuk berhaji salah satunya adalah menjadi tenaga

kerja di Arab Saudi. Semua dilakukan Muslim Indonesia untuk menyempurnakan Islam dengan melaksanakan haji. Pada akhirnya dalam ibadah haji harus ada keterkaitan dengan niat tulus dan juga kemampuan ekonomi dalam mewujudkan haji sebagai rukun Islam yang kelima.

Pada akhirnya semua kembali lagi pada setiap individu Muslim dalam mewujudkan ketahanan dalam segi ekonomi. Mewujudkan ketahanan ekonomi bagi setiap individu tidak hanya tercipta begitu saja namun perlu juga dilandasi dengan pemahaman dari segi agama. Semangat mewujudkan kelima rukun Islam secara sempurna merupakan jalur yang tepat untuk menjadi pribadi Muslim yang lebih kuat dalam segala hal khususnya ekonomi. "Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah," demikian penggalan hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang merupakan penyemangat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Tentu saja selain itu masih banyak lagi bukti-bukti lain bahwa Islam menganjurkan seorang Muslim hidup dengan cara yang baik dan berkualitas. Rukun Islam di atas dapat dijadikan motivasi dalam mewujudkan kemakmuran yang pastinya berdasarkan Allah Swt.

L. Menyemai Kondisi Perekonomian Masyarakat Islam Kecil dan Menengah di Era Global

Oleh Siswahyudianto

Persaingan global (*global competition*) muncul pada saat suatu wilayah (dalam hal ini negara) bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar dan kesempatan (*market and opportunity share*). Persaingan bisnis berskala global (*global business*) mendorong industri-industri yang berada dalam suatu wilayah untuk mampu melakukan efesiensi biaya dan diferensiasi produk.

Sedangkan persaingan perusahaan secara global (*global company*) timbul karena kegiatan perusahaan perusahaan transnasional (*transnational coorporation*) milik negara-negara maju ingin melebarkan sayap bisnisnya ke negara-negara berkembang, baik dalam bentuk pembangunan pabrik baru, kerjasama patungan (*joint venture*) dengan perusahaan tuan rumah, maupun relokasi industri. Hal ini tentu saja menjadikan persaingan antara perusahaan domestik dan perusahaan global akan semakin ketat sehingga dikhawatirkan dapat merebut pangsa pasar domestik. Karena itulah, dalam menghadapi persaingan global ini, perlu disusun strategi bersaing yang berpijak pada kompetensi inti (*core competence*), baik dalam hal harga (*price*), kualitas (*quality*), teknologi (*technology*),

maupun fleksibilitas biaya produksi (*flexibility cost*).

Pemulihan ekonomi bertujuan untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang memadai serta tercapainya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumberdaya alam yang menjamin daya dukung lingkungan dan pelestarian alam. Sejauh ini sumberdaya alam dikelola dengan tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengganggu kelestarian alam yang akhirnya mengurangi daya dukung dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kalau diamati, kebijakan pembangunan ekonomi nasional kabinet terdahulu lebih memprioritaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui industrialisasi berskala besar dan tidak berorientasi pada pemanfaatan bahan baku yang dimiliki sendiri sehingga telah menciptakan struktur ekonomi yang rapuh terhadap gejolak nilai dollar. Padahal sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara sebab sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian akan tetapi mampu menjadi sumber penghidupan dan pembangunan masyarakat, di mana strategi industri yang dikembangkan lebih menonjolkan

aspek-aspek ekonomi tanpa mempersoalkan apakah industri tersebut menciptakan impor bahan baku, barang modal dan impor jasa lanjutan.

Permasalahan yang paling krusial adalah apakah dengan kondisi tersebut, Industri Kecil Menengah (IKM) sanggup untuk menghadapi tantangan di era global ini? Implikasinya adalah pasar domestik sebagai pasar dari

produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah akan menjadi incaran industri kecil dan menengah dari negara tetangga yang tergabung dalam negara ASEAN (AFTA) bahkan dari seluruh dunia (WTO). Oleh karena itu maka pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah harus mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Sehingga industri kecil dan menengah harus melakukan pembenahan diri dengan berorientasi pada pengkajian peluang dan tantangan yang berbasis teknologi agar mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (*engine of economic growth*) bagi perekonomian negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia.

Porter (1990: 71) menjelaskan bahwa keunggulan daya saing suatu negara ditentukan oleh empat faktor pokok, yaitu kondisi faktor produksi (*factor conditions*), kondisi permintaan (*demand conditions*), industri-industri pendukung dan industri terkait, serta strategi, struktur, dan persaingan antarwilayah. Di samping keempat faktor pokok ini, masih ada dua faktor penunjang yang juga memengaruhi keunggulan daya saing suatu wilayah, yaitu peluang (*chance*) dan peranan pemerintah (*role of government*).

Faktor-faktor produksi yang sangat diperlukan dalam menciptakan keungulan daya saing wilayah antara lain berupa ketersediaan lahan, sumberdaya alam, modal, tenaga kerja yang ahli, dan infrastruktur.

Faktor *Endowment*

Faktor ini terbagi atas beberapa sumberdaya: *pertama*, sumberdaya manusia, dengan berbagai indikator seperti

kuantitas, keahlian, gaji personal, perhitungan standar jam kerja, dan etika kerja. Sumberdaya manusia dapat dibagi dalam beberapa kategori, seperti *toolmakers*, sarjana, doktor, *programmer*, dan sebagainya. Sumberdaya fisik, dengan indikator-indikator kuantitas, kualitas, aksesibilitas perolehan, harga tanah, air, mineral, sumberdaya listrik, perikanan, serta iklim, lokasi, dan ukuran geografis.

Kedua, sumberdaya pengetahuan, yang diindikasikan oleh sejumlah ilmuwan, teknokrat, dan pengetahuan pasar terhadap produk dan jasa. Sumberdaya pengetahuan ini berada di perguruan tinggi, lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, badan statistik pemerintah, literatur bisnis dan pengetahuan, laporan riset pasar dan *database*, asosiasi perdagangan, dan berbagai sumber lainnya.

Ketiga, sumberdaya kapital. Indikatornya berupa jumlah dan besarnya investasi yang disediakan untuk mendukung produk-produk unggulan suatu wilayah. Kapital dan investasi ini tidak homogen tetapi bervariasi dalam bentuk pinjaman, surat berharga, ekuitas, dan modal.

Keempat, infrastruktur wilayah, dengan indikator seperti tipe, kualitas, dan biaya penggunaan infrastruktur yang memengaruhi persaingan antarwilayah, meliputi sistem jaringan transportasi, sistemjaringan telekomunikasi, dan sistem pembayaran atau transfer dana.

Hierarki Faktor-Faktor Produksi

Untuk memahami peranan faktor-faktor produksi di atas dalam menciptakan keunggulan daya saing suatu wilayah, maka faktorfaktor tersebut perlu dipilah menjadi *basic factors* dan *advanced factors*. Faktor yang pertama meliputi

sumberdaya alam, iklim, lokasi, tenaga kerja tak terdidik dan semi terdidik, serta hutang kapital. Sedangkan faktor kedua lebih merupakan faktor yang sengaja diciptakan meliputi jaringan infrastruktur, data komunikasi digital modern, personil berpendidikan tinggi, serta lembaga riset perguruan tinggi yang terpercaya.

Kreasi Faktor

Kreasi faktor (*factor creation*) merupakan hasil yang diciptakan melalui investasi, bukan diwariskan. Mekanisme kreasi faktor meliputi lembaga pendidikan umum dan swasta, program-program pendidikan dan pelatihan, serta lembaga penelitian pemerintah dan swasta. Dengan standar kelas dunia yang meningkat, berarti untuk mencapai keunggulan daya saing suatu wilayah *factor creation* tidak hanya membutuhkan satu kali investasi, melainkan terus menerus untuk meningkatkan mutu. Untuk menciptakan keunggulan daya saing wilayah, mekanisme kreasi faktor lebih penting dibandingkan faktor-faktor yang diwariskan (*basic factors*). Negara yang sukses dalam industrinya adalah negara yang mampu menciptakan dan mengembangkan *factor creation* yang dibutuhkan. Negara akan memiliki keunggulan daya saing jika mekanisme kelembagaan dengan kualitas sangat tinggi dapat menciptakan faktor yang terspesialisasi.

Namun perlu diingat, bahwa investasi pada penelitian dasar (*basic research*) tidak akanmengarah pada keunggulan daya saing kecuali bila ditransformasikan untuk pengembangan lebih lanjut oleh industri dalam bentuk investasi langsung yang signifikan. Tidak ada satupun negara yang dapat menciptakan dan mengembangkan

semua tipe dan jenis faktor. Tipe dan faktor mana saja yang akan diciptakan dan dikembangkan serta seberapa besar efektivitasnya sangat bergantung pada berbagai penentu (*determinants*). Antara lain kondisi permintaan lokal, keberadaan industri pendukung dan industri terkait, tujuan perusahaan, dan karakteristik persaingan domestik. Bahkan investasi langsung oleh pemerintah juga dipengaruhi oleh berbagai penentu lainnya. Keberadaan *advanced factors* dan faktor yang terspesialisasi dalam suatu negara seringkali tidak hanya merupakan faktor penyebab keunggulan nasional, melainkan juga merupakan akibat dari keunggulan nasional.

Seleksi Kelemahan-Kelemahan Faktor Produksi

Lahirnya keunggulan daya saing wilayah bisa juga berasal dari kelemahan dalam beberapa faktor produksi. Dalam persaingan aktual, tinggi atau rendahnya biaya dari suatu faktor produksi seringkali mengarah kepada ketidakefisienan. Sebaliknya, kelemahan dalam faktor-faktor produksi dasar seperti kekurangan tenaga kerja, langkanya sumberdaya alam, atau iklim yang keras, umumnya justru mendorong adanya inovasi. Kelemahan faktor-faktor produksi yang dapat merangsang inovasi harus diseleksi sehingga bisa efektif untuk memicu motivasi, bukannya malah mematahkan semangat. Tekanan yang terlalu kecil kurang efektif untuk memicu kemajuan, tapi malah mengarah kepada ketidakmampuan untuk bergerak. Tingkat tekanan yang sedang, yang menyeimbangkan antara keunggulan pada beberapa area lainnya, tampaknya merupakan kombinasi terbaik untuk inovasi dan pembaruan.

Pada model konseptual kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah yang tangguh, kooperatif, dan mandiri akan berhasil apabila didukung oleh keempat komponen teknologi yang mempunyai ruang untuk diintensifkan. Pada ruang yang berwarna lebih gelap menunjukkan elemen yang paling mendesak untuk segera diperbaiki dibandingkan ruang komponen lainnya, yaitu komponen *technoware* yang didukung oleh institusi terkait dalam penguatan teknologi dengan melakukan riset dan pengembangan teknologi bagi industri kecil menengah. Suatu rantai nilai tidak berfungsi secara optimal jika terjadi pemutusan pada sistemnya. Dalam konsep pengembangan industri kecil dan menengah, diperoleh bahwa industri kecil dan menengah, industri terkait serta pendukungnya tidak dapat menarik dan meneruskan rantai secara maksimal sehingga hal ini akan menjadi hambatan bagi keberlangsungan dan tumbuh-kembangnya anak-anak rantai yang lain. Sehingga ruang intensif yang diperlukan adalah dibentuknya kebijakan tentang investasi, teknologi, informasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia.

Sementara akses pasar dan permodalan diperlukan untuk menjawab kondisi faktor yang ada dengan harapan faktor-faktor pembentuk daya saing memiliki kondisi yang positif, stabil dan berpeluang untuk terus berkembang sesuai zaman. Deregulasi yang dilakukan perlu memperhatikan kondisi ketiga faktor lainnya sehingga perluasan ruang intensifnya menjadi bermanfaat. Ruang intensif akses pasar dan permodalan diupayakan untuk memperbaiki struktur pasar dan pengembangan teknologi yang dapat dilakukan bersama-sama sebagai strategi dalam meningkatkan kondisi faktor dan kondisi permintaan yang

terjadi. Sehingga diferensiasi produk bisa berkembang lebih luas lagi tergantung kondisi permintaan. Diferensiasi yang dilakukan baik pada produk maupun harga juga merupakan implementasi dari faktor strategi perusahaan dan industri terkait dan pendukung. Sehingga jika diamati perkembangan model konseptual tersebut bukan bergerak seperti roda namun berpendar, bersumber pada satu titik tujuan yang direfleksikan melalui jari-jari ruang intensif dengan daya dukung dari semua institusi terkait.

M. Revitalisasi Zakat menuju Islam Moderat

Oleh Ahmad Supriyadi

Zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkembang, baik, bertambah, dan terpuji. Secara *syar'i* zakat dapat diartikan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Yusuf Qardhawi, 1999). Kata zakat banyak disebut dalam al-Qur'an beriringan dengan kata salat. Hal ini menandakan bahwa salat dan zakat adalah dua pilar penting bagi umat Islam. Salat adalah simbol ibadah vertikal (*hablum minallah)*, sedangkan zakat adalah simbol ibadah horizontal dan vertikal (*hablum minallah wa hablum minannas).*

Menunaikan kedua rukun tersebut adalah bentuk manifestasi keutuhan keimanan seorang. Zakat dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial adalah dua hal yang saling berkaitan dan tak bisa dilepaskan. Sebab berzakat sama saja dengan kesalehan sosial. Adapun salat adalah wujud ibadah transendental (*mahdah)* mengatur hubungan individu seorang Muslim kepada Tuhan-Nya. Secara garis besar Islam menuntut pemeluknya menjadi manusia yang utuh, di satu sisi mengedepankan kepentingan individu, namun di sisi lain tidak mengabaikan kepentingan sosial.

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang telah mampu mengumpulkan harta maka di dalamnya ada hak

yang harus ditunaikan:

> *Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24). Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25).* (**Q.S. al-Ma'arij, 70:24-25**).

> *Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji".* (**Q.S. al-Baqarah, 2:267**).

Yusuf Wibisono dalam *Mengelola Zakat Indonesia* (2016), mengatakan bahwa zakat adalah pranata sosial-ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M. Zakat merupakan sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subjek pembayar zakat, objek harta zakat, *tarif* (*miqdar zakah),* batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat (*nishab),* masa kepemilikan harta (*haul),* sampai kepada ditribusi penerima zakat (*mustahik).*

Senada dengan hal di atas, Umratu Hasanah (2014) mengatakan bahwa sejarah Islam mencatat, sumber-sumber keuangan yang diperoleh dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan wakaf dan sumber-sumber sejenisnya menempatkan Islam menjadi menjadi negara *super power.* Zakat menjadi penopang ekonomi Islam yang sangat kokoh dan tidak terkalahkan. Stabilitas ekonomi pemerintahan Islam menjadi terjamin dengan adanya distribusi keuangan dari orang kaya kepada orang miskin. Dengan adanya zakat

yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya menjamin sebuah prinsip keadilan sosial, orang miskin tidak akan binasa karena tidak bisa makan. Orang kaya yang mengeluarkan hartanya untuk zakat menjadi tentram hidupnya, hartanya suci dan berkah, karena doa dari orang yang diberi zakat *(imustahik)*.

Nabi Muhammad Saw membentuk lembaga zakat sebagai sebuah wadah untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan. Begitu pentingnya perintah zakat ini, Rasulullah pernah melakukan isolasi kepada orang kaya yang enggan membayar zakat, Khalifah Abu Bakar menyatakan perang kepada orang yang secara sadar melakukan salat namun enggan menunaikan zakat. Khalifah Umar r.a., juga mengontrol ketat pengeloaan *baitul mal*. Di tangannya zakat terkelola dengan baik, *baitul mal* melimpah ruah, ketegasannya dalam menegakkan zakat mampu mengatasi krisis pangan (*paceklik*) yang terjadi pada pemerintahannya.

Sukses pengelolaan zakat pernah digapai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Saat itu, *ijtihad* zakat atas penghasilan ditetapkan oleh *khalifah* dan bersifat wajib. Kebijakan ini berimbas pada melimpahnya dana di *baitul mal* yang didistribusikan pemerintah untuk menyantuni fakir dan miskin. Pada masa kepemimpinanya yang hanya dua tahun, dana zakat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Dalam sejarah Islam terjadi transfer zakat ke luar negara hanya terjadi pada pemerintahannya. Pengelolaan zakat yang baik dan profesional di era itu memberi dampak pada berkurangnya

konsumerisme masyarakat dan perilaku korupsi di tingkatan pejabat serta meningkatkan produktivitas ibadah maupun *muamalah* masyarakat.

Zakat dari masa ke masa menjadikan stabilitas pemerintahan terjamin. Zakat menjadi solusi alternatif kemiskinan dan menghindarkan negara dari kekacauan yang disebabkan karena tidak adanya pemerataan pendapatan di masyarakat. Kekacauan yang disebabkan waktu itu mayoritas karena faktor politik yang belum mapan. Umat Islam sangat patuh melaksanakan zakat. Kontrol negara yang ketat terhadap pelaksanakaan zakat menjadi kunci sukses implementasi rukun Islam yang ketiga ini.

Bagaimana dengan kondisi saat ini? Di tengah kemelut kesejahteraan masyarakat, bangsa ini juga sedang diterpa tantangan yang nyata, yaitu radikalisme. Indonesia sedang berada di bawah ancaman distegrasi bangsa. Pemerintah bersama seluruh jajarannya berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi permasalahan ini. Radikalisme muncul karena beberapa sebab dan tidak mutlak karena dogma agama, salah satunya adalah faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial dapat mengubah sifat seseorang yang baik menjadi orang yang kejam. Karena dalam keadaan terdesak atau himpitan ekonomi, apa pun bisa mereka lakukan, termasuk melakukan teror. Ketidakadilan dalam masyarakat yang memusatkan kekayaan hanya pada segelintir orang dapat menumbuhkan kebencian yang mendalam bagi golongan tidak mampu.

Masih lekat dalam ingatan kita, salah satu propaganda yang digunakan ISIS adalah dengan menggelontorkan isu tentang kemakmuran dan kesejahteraan di bawah naungan

Daulah Islamiyah. Tak pelak, isu tersebut mampu membius ratusan ribuan simpatisannya dari berbagai negara untuk ikut bergabung di bawah pemerintahan mereka. Meski sebagian orang tahu bahwa itu semata-mata hanya propaganda dan memuat kebohongan belaka. Namun tidak sedikit masyarakat kita yang jadi korban dan berduyun-duyun mengikuti gerakan politis berbungkus agama itu.

Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa tidak kurang dari 500 orang menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, sedangkan Polri mengatakan kurang lebih 384 bergabung dengan ISIS. Di antara sebagian yang ikut bergabung dengan ISIS adalah dari umat Islam dengan ekonomi kurang mampu. Mereka ingin memperoleh kehidupan yang lebih layak sebagaimana yang ISIS janjikan.

Dari sini, tak berlebihan bila saya sebut bahwa ekonomi juga menjadi salah satu motif timbulnya radikalisme. Maka upaya pencegahan radikalisme ini, salah satunya dengan pemerataan pendapatan di antara umat Islam. Zakat sebagai salah satu sumber ekonomi Islam dapat menjadi upaya solutif untuk mencegah timbulnya radikalisme. Dengan adanya perpindahan harta dari orang kaya kepada orang miskin akan mampu meredam timbulnya gejolak sosial dan keputusasaan dari kaum *dhuafa*. Dengan tercukupinya kebutuhan kaum *dhuafa*, menghindarkan dari propaganda yang mengajak mereka ikut pada kelompok-kelompok berpaham radikal.

Peran lembaga-lembaga zakat sangat vital. Zakat harus direvitalisasi dan dikuatkan perannya untuk menanggulangi kelompok-kelompok radikal. Tidak sebaliknya, zakat

digunakan oleh kelompok-kelompok terentu sebagai amunisi untuk menyokong penyebaran paham-paham radikalisme. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dan bergandengan tangan untuk menyelesaikan problem ini. Program-program yang dimunculkan kedua lembaga ini harus menyentuh pembinaan tentang radikalisme.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas yang mengusung jargon Islam moderat memiliki Lembaga yang menangani masalah zakat yaitu Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Dalam masalah ini, NU mengusung dakwah ekonomi bagi pengikutnya untuk menyejahterakan umat. Peran LAZISNU harus dimaksimalkan, mengingat tipologi pengikut ormas NU kebanyakan dari masarakat pedesaan yang rata-rata masih berada pada tingkat ekonomi yang belum mapan. Sayangnya, peran lembaga ini masih belum begitu dirasakan. Dengan jumlah pengikut mencapai 40 juta, potensi zakat yang digali (seharusnya) juga besar. Zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan dan diberdayakan untuk membina *mustahik-mustahik* yang disantuni supaya keyakinan mereka tidak bergeser dan tidak mudah terpancing dengan iming-iming kemapanan ekonomi yang dihembuskan oleh kelompok radikal sebagai strategi untuk menarik pengikut.

LAZISNU masih jalan di tempat. Undang-undang zakat yang memberikan peluang bagi kelompok masyarakat (ormas) untuk mengelola zakat belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk melakukan optimalisasi zakat dari kalangan Nahdliyin. Revitalisasi zakat melalui lembagi ini mutlak diperlukan karena tantangan umat kita saat ini adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan efek domino

yang banyak salah satunya radikalisme. NU saat ini menjadi bandul NKRI karena konsep dakwah Islam moderat. Secara tidak langsung memberdayakan warga Nahdliyin melalui dana zakat sama juga mempertahankan nilai-nilai Islam moderat di negara yang kita cintai ini. Semoga.

Epilog

Melampaui Moderasi Islam

Oleh Akhol Firdaus

Kampus sedang menjadi sorotan. Institusi yang seharusnya menjadi *kawah candradimuka* bagi pengembangan ilmu pengetahuan tersebut, kewibawaanya terancam akibat arus radikalisme dan ekstremisme. Perguruan Tinggi bahkan disebut-sebut sebagai sarang pembenihan dan kaderisasi aktor-aktor radikalisme. Salah satu fakta yang paling mengejutkan atas fenomena ini adalah, deklarasi *khilafah Islamiyah* yang dilakukan di Institut Pertanian Bogor beberapa waktu lalu. Deklarasi tersebut disebar melalui Youtube yang diperkirakan terjadi pada 25-27 Maret 2016.

Peristiwa deklarasi tersebut hanyalah fenomena gunung es dari menguatnya radikalisme di kampus. Kampus sesungguhnya sudah lama sekali menjadi sasaran sekaligus target menyebaran gagasan radikalisme Islam. Bila merujuk catatan Martin van Bruinessen (2013: 195-221), sejak dekade 1990-an, benih-benih gerakan radikalisme sudah menggejala di kampus. Setidaknya, hal ini ditandai oleh menjamurnya *halaqah-halaqah* dan *usroh-usroh* di berbagai kampus terkemuka di Indonesia.

Pada masa itu, lahir kegairahan yang luar biasa di kalangan anak muda dan mahasiswa untuk mengaji Islam secara "autentik" dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini diwarnai oleh pola pengaderan yang menuntut militansi tinggi. Istilah autentik yang digunakan di sini, pasti tidak merujuk pada ajaran Islam yang benar-benar murni sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, tetapi lebih merupakan "imajinasi" atas kemurniaan seperti lazim ditemukan dalam gerakan fundamentalisme agama. Islam juga ditampilkan sebagai solusi atas situasi ketimpangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masa Orde Baru. Sebagian narasi fundamentalisme Islam pada periode ini, sekaligus bernada perlawanan terhadap sistem sosial yang tidak adil.

Inilah juga yang menjadi alasan mengapa gerakan ini mendapat sambutan yang besar di lingkungan mahasiswa dan kampus. Dalam gerakan *halaqah* dan *usroh-usroh*, Islam memang hadir dalam corak fundamentalisme. Dalam hal ini Graham E. Fuller (2003: 48) tidak membedakan antara fundamentalisme Islam dan Islamisme sebagai elemen paling konservatif dalam Islam. Wahabisme dan Salafi masuk dalam kategori ini. Umumnya gerakan ini sangat berorientasi pada penegakan hukum "Allah" sebagai ekspresi konservatismenya.

Kader-kader *halaqah* dan *usroh-usroh* inilah, kata Abdurrahman Wahid [ed.], (2009), yang pada periode berikutnya menjadi salah satu *supplier* utama gerakan radikalisme di Indonesia. Sebagian besar mereka pada akhirnya menjadi penyokong gerakan Islam transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Wahabisme, dan

gerakan Salafi. Ketiganya tumbuh subur di Indonesia pascareformasi, dan semua memahami bahwa ketiga gerakan tersebut diikat oleh imajinasi yang sama dalam menyokong berdirinya *khilafah* Islam.

Kader-kader gerakan *usroh* di kampus juga terserap secara massif dalam gerakan politik formal melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (M. Imdadun Rahmat, 2008). Partai ini bahkan disebut-sebut sebagai kekuatan yang bermula dari kampus untuk membangun kekuatan di Senayan. Tentu saja agenda-agenda politik gerakan Islam transnasional tidak selalu sama dengan PKS, akan tetapi semua memahami bahwa dalam saluran politik formal di Indonesia, PKS telah menjadi *partner* strategis di dalam menyokong gerakan Islamisme di Indonesia. Meski dalam orientasi dan agenda politik (mungkin) berbeda, akan tetapi lebih banyak kesamaan ideologis yang bisa mempertemukan anasir-anasir gerakan Islamisme ini.

Gerakan *usroh* yang semula ruang lingkupnya sangat terbatas di kampus, telah berevolusi dan menjelma menjadi ragam kekuatan sosial dan politik yang pada akhirnya sangat diperhitungkan di Indonesia. Arus demokratisasi di Indonesia disebut-sebut telah memberikan ruang gerak yang sangat longgar bagi gerakan ini sehingga bisa bermanuver bebas dari masjid menjadi gerakan sosial, dan bahkan menginfiltrasi organisasi-organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah (Abdurrahman Wahid [ed.], (2009: 243-308). Inilah yang menjadi alasan mengapa lahir faksi-faksi konservatif baik di dalam tubuh NU maupun Muhammadiyah. Kita misalnya mengenal ada faksi NU Garis Lurus untuk menggambarkan kesuksesan

gerakan Islamisme dalam mengilfiltrasi NU. Fenomena ini sebetulnya sudah lama menjadi sorotan, salah satunya bisa dilacak dalam karya Martin van Bruinessen, *Contemporery Developments in Indonesian Islam: Explaining the 'Conservative Turn',* (2013).

Di Muhammadiyah sendiri, karena berbagai alasan kesamaan cita-cita "kemurnian Islam", semakin banyak kadernya yang konservatif dan melupakan sikap moderasi organisasi tersebut. Muhammadiyah hampir dikuasai oleh kader-kader mereka yang beriorientasi fundamentalisme. Pendek kata, arus ini telah berhasil menjadikan Muhammadiyah rasa Wahabi (Ahmad Najib Burhani, 2013: 105).

Selain situasi demokratisasi di Indonesia, dukungan jaringan transnasional, terutama dalam hal pendanaan, juga menjadikan gerakan Islamisme semakin menguat dan menegara. Bagaimana ini mungkin? Sejak reformasi, negara terus mengalami berbagai pelemahan. Ditambah dengan situasi dan konstelasi politik pemilu langsung di Indonesia, pelan namun pasti telah melahirkan suatu tatanan negara yang *lembek* dan bersifat akomodatif (*total negotiated-order*). Melalui berbagai mekanisme pewacanaan populisme Islam, gerakan Islamisme menjanjikan lumbung suara dan pemenangan yang hampir selalu dipercaya oleh partai dan politisi. Dalam situasi seperti ini, seluruh manuver bahkan ragam tindakan intoleransi dan kekerasan berbasis agama selalu didiamkan oleh negara.

Dari Kampus untuk Indonesia yang Intoleran

Vedi R. Hadiz dalam catatannya bertajuk, "Towards A Sociological Understanding of Islamic Radicalism in Indonesia" (dalam *Journal of Contemporery Asia,* Vol. 38, 2008: 638-647) menyebut bahwa kini, gerakan yang pembenihannya bermula dari kampus itu, telah beranjak menjadi arus radikalisme dan ekstremisme yang "mengancam" Indonesia. Tentu saja, sekali lagi, sama dengan terminologi fundamentalisme, istilah radikalisme dan ekstremisme juga memiliki spektrum yang sangat luas. Sudah pasti radikalisme dan ekstremisme bukanlah gerakan yang homogen dengan agenda politik yang tunggal. Bahkan sejak bermula dari kampus, gerakan ini telah mengalami pembelahan dari dalam. Ada banyak faksi dalam gerakan radikalisme, dan setiap faksi memiliki agenda politik yang berbeda-beda.

Meskipun demikian, secara umum watak setiap faksi dalam gerakan radikalisme cenderung sama. Gerakan ini selalu bermula dari nalar keagamaan yang konservatif. Biasanya hal ini ditempuh dengan menjaga pemahaman keagamaan yang literalis dan tekstualis. Agama diputus ikatannya dengan dinamika perkembangan sejarah manusia. Dalam konteks demikian, konservatisme selalu memupuk imajinasi tentang kebenaran yang tunggal, autentik, dan tidak dipengaruhi perkembangan zaman. Melalui imajinasi seperti inilah Islam dipahami dengan kaca mata kuda. Hitam-putih. Kompleksitas sejarah kebudayaan manusia disimplifikasi hanya sekadar urusan halal-haram, iman-kafir.

Konstruksi nalar agama demikian selalu berujung pada sikap anti-dialog. Kalangan Islamis selalu berlindung di balik narasi hukum Tuhan, kehendak Allah, ketetapan Allah. Tafsir yang kaya raya dalam khazanah Islam dinegasikan oleh narasi-narasi tersebut, dan yang terpenting apa yang disebut sebagai hukum dan kehendak Tuhan sebenarnya hanyalah sejenis ambisi politis menjustifikasi apa yang dipercayai sebagai kebenaran tunggal dan autentik. Sejengkal saja, nalar keagamaan seperti ini akan mendorong para penyokongnya untuk bertindak intoleran, baik terhadap mazhab-mazhab di dalam Islam, maupun dalam relasinya dengan agama-agama lain.

Dalam pengalaman Indonesia, arus radikalisme dan ekstremisme memang ditandai oleh merebaknya tindakan-tindakan intoleran dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Cara beragama para penyokong gerakan radikalisme selalu ditandai oleh sikap kebencian terhadap perbedaan, dan itu artinya kebencian terhadap siapa pun yang dianggap berbeda. Tidak cukup sampai di sini, dalam praktik keberagamaan di Indonesia setidaknya dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, kebencian selalu diadvokasi menjadi ragam tindakan kekerasan.

Dapat dikatakan, situasi keberagamaan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir terus diwarnai oleh kericuhan-kericuhan berbasis kebencian dan kekerasan atas nama agama. Fenomena tersebut direkam dengan sangat baik oleh lembaga-lembaga pemantau di Indonesia seperti Setara Institute, The Wahid Institute, dan *Center for Religious and Cross-Cultural Studies* (CRCS) UGM, dan lembaga-lembaga pemantau lainnya. Lembaga-Lembaga

tersebut memiliki kesimpulan yang hampir sama antara satu dan lainnya tengah situasi intoleransi dan tindakan kekerasan berbasis agama di Indonesia.

Pertama, semua lembaga pemantau bersepakat bahwa tiap tahunnya angka intoleransi dan tindakan kekerasan berbasis agama/keyakinan semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini juga berarti bahwa jaminan yang diberikan oleh negara atas hak kebebasan beragama/ berkeyakinan warga negara semakin buruk. Setara Institute misalnya mencatat, pada tahun 2016, terjadi 208 peristiwa pelanggaran dengan 270 bentuk kekerasan berbasis agama. Dari angka 270 tindakan tersebut, 140 tindakan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh aktor-aktor negara, baik dalam bentuk tindakan aktif (123) tindakan maupun dalam bentuk pembiaran (17 tindakan). Sisanya, merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aktor-aktor sipil intoleran. Sebagaimana laporan Setara Institute sejak 2008, pola pelanggaran seperti ini terus berulang dari tahun ke tahun (Halili & Sudarto, 2016: 123-125).

Hal yang sama juga dilaporkan oleh The Wahid Institute sebagaimana dilansir di *website* resminya. Pada 2016 lembaga ini melakukan survei nasional tentang situasi radikalisme di Indonesia. Survei ini bertajuk "Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial di Kalangan Muslim Indonesia", melibatkan 1.520 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei ini cukup mengejutkan. Dari jumlah responden, tercatat 59,9% responden mengaku membenci kelompok lain yang berbeda agama/keyakinan. Kelompok yang dibenci oleh responden umumnya adalah kelompok Tionghoa, Komunis, dan non-Muslim. Dari

total 59,9 % responden tersebut, 92,2 % tidak setuju bila kelompok-kelompok non-Muslim menjadi pejabat pemerintahan. Bahkan, 82,4 % di antara mereka tidak rela bila harus bertetangga dengan kelompok-kelompok non-Muslim.

Terkait dengan kecenderungan ke arah radikalisme, dari total 1.520 responden, 72% memang menyatakan penolakan terhadap aksi-aksi radikalisme. Secara statistik, memang hanya 7.7 % responden yang mengaku bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan. Sisanya, 0.4 % justru mengaku pernah terlibat dalam ragam aksi radikalisme. Angka statistik tersebut tampak belum mengkhawatirkan, akan tetapi bila 7.7 % persen dirasionalisasi dengan jumlah umat Islam di Indonesia, maka ditemukan 11 juta umat Islam di Indonesia yang siap menyokong gerakan radikalisme dalam berbagai bentuknya.

Data-data sebagaimana disuguhkan di atas, menggambarkan betapa daruratnya situasi Indonesia yang sedang diterjang arus radikalisme. Kalau melihat laporan bertajuk *"Indonesia no longer a haven of religious tolerance"* sebagaimana dimuat dalam *www.amnesty.org.,* intoleransi dan semakin meluasnya penyokong ide radikalisme telah menciptakan situasi keagamaan dan kebangsaan yang kacau dan diwarnai oleh ragam kekerasan. Umumnya kekerasan terkait dengan penolakan dan penyerangan rumah ibadah, terutama gereja, dan aksi-aksi kekerasan yang menyertai tindakan penyesatan terhadap mazhab agama, sekte, atau kelompok agama-agama lokal. Gagasan Islamisme yang 30 tahun sebelumnya dipupuk dan terus dirawat di kampus, hari ini telah berdampak sangat

besar bagi situasi keberagamaan dan kebangsaan Indonesia. Bahkan, di mata dunia internasional, Indonesia bukan lagi surga bagi kehidupan toleransi.

Kedua, dalam semua kasus intoleransi dan kekerasan berbasis agama, negara tampak tidak hadir untuk menyelesaikan problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hampir semua kasus kekerasan berbasis agama misalnya, negara bahkan selalu melembagakan impunitas. Di samping tidak ada pelaku-pelaku kekerasan yang diproses secara hukum, negara juga biasanya bernegosiasi dengan para aktor kekerasan, dan memilih solusi yang terus merugikan korban. Di antara ratusan kasus pelanggaran dan kekerasan berbasis agama, ada sejumlah kasus yang rata-rata sudah berusia sepuluh tahun, dan belum mendapat sentuhan apa pun untuk diselesaikan oleh negara. Negara hampir selalu mengambil langkah-langkah penyelesaian konflik yang memilih tunduk pada desakan kelompok-kelompok atau aktor intoleransi sehingga selalu berdampak pada pelanggaran yang berantai terhadap korban.

Kasus-kasus tersebut misalnya, Jemaat Ahmadiyah Nusa Tenggara Barat yang dipaksa mengungsi sejak 2006 hingga hari ini. Sejak perkampungan dan masjid mereka diserang oleh kelompok-kelompok intoleran, mereka ditampung di Wisma Transito dengan tanpa jaminan sosial dan ekonomi. Hingga saat ini mereka tetap bertahan di Transito. Ada 33 Kepala Keluarga (KK), 118 Jiwa, dan 60 anak-anak. Selama 11 tahun terakhir, sudah ada 22 anak yang lahir di pengungsian tersebut, dan 10 orang yang meninggal dunia (Cahyo Pamungkas [ed.], 2017).

Selain di NTB, di Jawa Timur pengungsi jamaah Syiah juga mengalami nasib yang serupa. Setelah kampung mereka di Omben, Sampang, diserang oleh kelompok radikal pada 2011, Pemerintah Jawa Timur menampung mereka di Wisma Puspa Agro, Sidoarjo. Hingga saat ini tidak ada skema apa pun yang ditawarkan pemerintah untuk memulihkan hak-hak mereka. Di lokasi pengungsian bertahan 66 Kepala Keluarga dan 387 jiwa, termasuk anak-anak (Akhol Firdaus [ed.], 2013).

Sebagian besar korban radikalisasi dipaksa menjadi pengungsi di negeri sendiri. Sebagaiamana terkandung dalam Amnesty International, *Prosecuting Beliefs Indonesia's Blasphemy Laws,* November, (2014), hal ini juga dialami oleh 6000 lebih pengikut Gafatar setelah perkampungan mereka diserang dan dibakar oleh kelompok radikalis pada Januari 2016. Baik Jemaat Ahmadiyah, Syiah, dan Gafatar tidak mendapat pemulihan apa pun, dan yang terpenting tidak ada proses hukum terhadap pelaku-pelaku kekerasan berbasis agama. Negara bukan sekadar tidak hadir, tetapi juga berhasil dipaksa tunduk terhadap kehendak kelompok-kelompok radikalis yang melakukan berbagai jenis aksi kekerasan. Sebagian tokoh-tokoh mazhab dalam Islam tersebut malah dikriminalisasi dan harus menjalani hukuman bertahun-tahun karena dijerat oleh UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.

Pada ratusan kasus rumah ibadah, pola yang sama juga terjadi. *Kompas.com* (07/09/2017) melansir berita bahwa setiap terjadi penolakan pendirian rumah ibadah—biasanya diwarnai dengan penyerangan dan aksi-aksi kekerasan lainnya, negara juga selalu memilih jalan berdamai dengan

kelompok-kelompok radikalis. Di antara sekian banyak kasus rumah ibadah, kasus GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadefia Bekasi tercatat sebagai kasus yang paling berbelit, *mbulet*, dan menggambarkan bagaimana negara selalu tidak hadir dalam menjamin dan melindungi hak-hak warganya. Hingga saat ini, kedua gereja tersebut tidak bisa difungsikan dan pemerintah lebih memilih "diam" menyaksikan jemaat kedua gereja terus melakukan ibadah di depan istana negara.

Semua kasus intoleransi dan kekerasan berbasis agama tersebut menggambarkan bagaimana negara sesungguhnya bukan sekadar tidak hadir untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang hak-haknya sedang terancam. Sebaliknya, negara juga terus mengembangkan kebijakan akomodatif terhadap tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Hal ini terutama mengemuka pada periode 2012-2013, di akhir-akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada taraf tertentu, hal ini menggambarkan bagaimana negara sebenarnya telah berhasil "dibajak" oleh kelompok-kelompok radikalis untuk melembagakan kebijakan intoleran.

Salah satu bukti "pembajakan" itu adalah, penerapan UU No. 1/PNPS/1965 yang semakin restriktif dan menjerat lebih banyak korban. Hal ini juga berlaku pada kebijakan rumah ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006 (popular dengan nama Perber Rumah Ibadah), terus dijadikan sebagai pembenar pelarangan pendirian—bahkan penyerangan—terhadap rumah ibadah. Pada saat bersamaan di semua wilayah di Indonesia, terjadi peningkatan jumlah Peraturan

Daerah (Perda) Berbasis syariah yang sifatnya sangat diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas agama. Pada perkembangan yang paling mutakhir, Dr. Michael Buehler (2016), peneliti Cambridge University, memastikan tidak kurang dari 443 Perda Syariah yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih dari itu, dari hasil *interview* penulis dengan M. Imdadun Rahmat (Komisoner Komnas HAM periode (2013-2017), pada 9 Desember 2015 silam, satu hal yang dapat disimpukan adalah fenomena semacam ini menggambarkan betapa terjadi kerancuan dan ketidakselarasan perundang-undangan di Indonesia. Seluruh produk hukum sebagaimana dipaparkan di atas sesungguhnya bertolak belakang dengan konstitusi nasional yang memberikan jaminan mutlak perlindungan hak kebebasan beragama/berkeyakinan setiap warga negara. Kerancuan seperti ini terus dibiarkan karena selaras dengan kebijakan akomodatif pemerintah terhadap tekanan kelompok-kelompok radikal. Sejak tahun 2011, ada gejala yang sangat unik dan menyimpang dalam praktik bernegara: banyak pejabat publik dan kepala daerah secara terus terang mengekspresikan sikap "makarnya" terhadap konstitusi nasional. Hal ini misalnya ditemukan di wilayah-wilayah tertanda "merah" intoleransi dan radikalisme seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Semakin banyak pejabat publik dan kepala daerah tidak segan menolak tunduk kepada konstitusi, hanya dalam rangka menjaga konstituennya dan lebih memilih tunduk kepada tekanan kelompok-kelompok radikal.

Indonesia mutakhir adalah Indonesia yang kacau dan sangat berisik karena membiarkan diri dikepung

oleh kekuatan-kekuatan radikalisme. Hampir tidak ada lagi dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang kebal dari pengaruh arus ini. Situasi kacau dan super berisik itu secara demonstratif ditemukan pada aksi bela Islam 212 (dan rangkaian aksi bela Islam sesudahnya) yang menuntut pemerintah untuk menjerat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan tuduhan penodaan agama. Puluhan hingga ratusan ribu (media menyebut jutaan) anasir-anasir kelompok radikalis mengepung Jakarta secara periodik. Ada banyak tuntutan politik, tetapi intinya sesungguhnya mengukur ruang negosiasi yang disediakan oleh pemerintah. Mencuat pula isu makar dan penggulingan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ahok akhirnya divonis bersalah dan dipenjara oleh pengadilan. Kelompok-kelompok radikalis yang terlibat dalam aksi bela Islam mengekspresikan kemenangannya—meski kemudian pemerintah juga melakukan manuver-manuver balik, dan semakin tergambar dengan jelas bagaimana negara tengah dalam situasi kuwalahan dalam menghadapi arus radikalisme di Indonesia.

***

Pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana menghubungkan kaderisasi radikalis yang sudah dimulai di kampus sejak periode 1990-an dengan situasi Indonesia mutakhir? Martin van Bruinessen memang menyebut benih-benih gerakan radikalisme di kampus pada 1990-an ini sebagai faksi-faksi yang tidak terorganisir dengan baik. Mereka menjamur hanya karena mendapat sambutan yang baik dari kalangan Islam perkotaan yang "haus" agama dan spiritualitas. Tetapi bayangkan, bila arus ini

terus diberi ruang dan secara leluasa melakukan kaderisasi selama 30 tahun lamanya. Fakta sejarah membuktikan, proses kaderisasi yang berlangsung sepanjang itu, telah memungkinkan gerakan ini menjelma menjadi kekuatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Pertumbuhan sel-sel gerakan radikalis sejak dari kampus, telah melahirkan kelas menengah intelektual yang menjadi penyokongan utama diseminasi dan *mainstreaming* ide-ide Islamisme. Mereka mengilfiltrasi organisasi-organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah, mengambil alih masjid-masjid dan lembaga dakwah secara perlahan. Melalui pintu ini mereka bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan menyebarkan wawasan Islamisme. Diseminasi ide Islamisme makin menemukan bentuknya dengan saluran-saluran sosial media. Kelompok kelas menengah intelektual Islamis dapat dikatakan menguasai akses terhadap teknologi informatika, dan situasi ini telah melahirkan dakwah kebencian yang membludak di dunia maya.

Dalam hal ini, *Tirto.id* menyuguhkan berita menarik bertajuk "Kronologi Saracen". Dari berita tersebut akhirnya kita baru tahu bahwa, syiar kebencian dan gerakan politik kelompok Islamisme merupakan gerakan yang sangat sistematis dan terstruktur. Mereka melakukan upaya-upaya yang sangat sistematis dalam *mainstreaming* ide-ide Islamisme melalui media *online*. Sebagiannya dikerahkan untuk kepentingan politik praktis, dan menyokong kepentingan partai-partai yang mendukung platform mereka. Terbongkarnya jaringan Saracen, sekali lagi, hanyalah menggambarkan fenomena permukaan

gunung es terkait kuatnya jaringan siber media yang aktif dalam mengadvokasi kebencian dan menyokong ide-ide Islamisme.

Kementerian Komunikasi dan Informatika—seperti yang dilansir oleh *www.cnnindonesia.com*—memaparkan bahwa berdasarkan upaya pemantuan yang dilakukan, setidaknya teridentifikasi 800 ribu situs yang aktif menyebarkan berita-berita *hoax* yang dipenuhi oleh pesan-peran kebencian. Informasi-informasi kebencian itu salah satunya dalam rangka menyokong agenda-agenda politik kalangan Islamisme.

Mereka melakukan upaya-upaya sistematis di dunia maya, sama sistematisnya dengan apa yang mereka lakukan di dunia nyata. Dalam rentang 30 tahun terakhir, terbukti jaringan ini berhasil mendistribusikan kader-kader terbaik mereka ke dalam pos-pos penting lintas kementerian dan lembaga-lembaga eksekutif. Sebagian kelompok kelas menengah Islamis ini juga aktif dalam dunia politik melalui saluran-saluran yang dianggap mampu menyokong *platform* Islamisme, tidak selalu melalui PKS. Sebagian lagi aktif dalam gerakan *civil society* yang sangat memengaruhi lahirnya ragam Perda Syariah di hampir semua wilayah Indonesia. Intinya, kehadiran mereka dalam semua lapis kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, telah "mengepung" negara.

Dapat dikatakan, saat ini, hampir seluruh lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara, telah dikepung oleh gerakan Islamisme. Bahkan tidak ada satupun institusi sosial, ekonomi, dan politik yang absen oleh arus radikalisme. Negara seperti telah dikepung dari luar, juga "dibajak"

dari dalam oleh gerakan yang mendambakan berdirinya ke-*khalifah*-an Islam tersebut. Inilah yang menjelaskan mengapa negara semakin kewalahan menghadapi arus gerakan ini. Dalam sebuah sesi diskusi kebangsaan, Eva K. Sundari, politisi PDI-P dan pendiri Kaukus Pancasila DPR-RI, pernah menyatakan bahwa, sulit mendefinisikan kehadiran negara dalam kasus-kasus intoleransi dan kekerasan berbasis agama karena sel-sel gerakan intoleransi dan radikalisme sesungguhnya sudah melakukan infiltrasi terlalu jauh di dalam tubuh negara.

Gerakan ini sukses menginfiltrasi organisasi-organisasi modern Islam, masuk dalam sistem negara, dan merajalela di dunia maya. Dengan modal seperti ini, cukup bagi mereka untuk melalukan *mainstreaming* ide-ide Islamisme. Bila negara saja dibuat *kelabakan* dalam membendung arus ini, bayangkan apa yang bisa mereka lakukan di kampus, tempat pembibitan dan pengkaderan dilakukan? Di berbagai Perguruan Tinggi, gerakan ini makin terang-terangan mengekspresikan sikapnya yang anti-sistem, menolak Pancasila dan dasar kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kaitan ini, sekali lagi, fenomena deklarasi *khilafah Islamiyah* di kampus negeri ternama di Jawa Barat beberapa waktu yang lalu hanyalah contoh paling permukaan yang menggambarkan betapa gerakan radikalisme telah menguasai sebagaian besar sistem dan birokrasi kampus.

Hanya butuh satu tahap lagi, watak dasar seperti ini menjadi dasar bagi para penyokongnya untuk membenarkan semua tindakan kekerasan—termasuk teror, dalam rangka mencapai agenda-agenda politiknya. Gerakan yang keras

dan disokong oleh militansi yang tinggi sebagaimana digambarkan di atas, juga telah banyak mengubah wajah Perguruan Tinggi di Indonesia. Kampus tidak lagi menjadi lembaga ilmiah yang berwibawa. Kebebasan akademik telah diinjak-injak oleh nalar agama yang menghendaki penyeragaman (Suhadi, 2017).

Moderasi Islam dan Kepanikan Negara

Gerakan radikalisme telah berubah menjadi arus yang mendobrak sistem dan menetapkan semua paham dan ideologi di luar dirinya sebagai *thaghut*. Negara pada akhirnya juga diserang karena dianggap menerapkan ideologi dan hukum "kafir". Dalam proses evolusi yang panjang, gerakan ini bukan hanya menjadikan negara sebagai sasaran, tetapi juga menjadi target diwujudkannya cita-cita politik berdirinya negara Islam. Kemampun menciptakan sel gerakan melalui berbagai saluran, telah melahirkan kader-kader baru yang siap melakukan cara-cara kekerasan apa pun untuk menyerang negara.

Kasus bom bunuh diri di Kampung Melayu dan penyerangan terhadap aparat Polisi di beberapa tempat di Indonesia, menjadi indikasi yang serius bahwa sel-sel gerakan radikalisme telah menjadikan aparatur negara sebagai targetnya. Meski demikian, gerakan politik kalangan radikalis juga tidak kalah mengerikan. Jaringan-jaringan politik yang sudah bekerja terus dalam menciptakan sel-sel baru, juga terbukti telah menjadi kekuatan yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk "menawar" dan "meneror" negara. Tentu saja, tidak pernah ada kepastian apakah sel-sel gerakan terorisme yang menyerang aparatus negara—

sebagaimana terjadi di Kampung Melayu dan beberapa daerah lain—memilih hubungan langsung atau tidak dengan gerakan politik yang unjuk kekuatan di Senayan (?), yang pasti, keduanya diikat oleh suatu imajinasi dan mimpi ideologis yang hampir sama.

Gerakan Bela Islam 212 (dan rangkaian aksi sesudahnya) yang begitu percaya diri dalam "menawar" negara, merupakan pembuktian bahwa kekuatan politik mereka layak dipertimbangkan. Aksi-aksi tersebut, menurut saya, bukan sekadar upaya unjuk kekuatan politik kalangan Islamis, tetapi sekaligus upaya mendemonstrasikan kemampuan mereka dalam "menawar" dan "meneror" negara. Pendek kata, aksi Bela Islam memberikan sinyal penting bahwa kekuatan Islamisme sesungguhnya telah berhasil mengepung dan "membajak" negara. Dalam kadar tertentu "tawar-menawar" memang terjadi, negara dipaksa tunduk pada tekanan. Putusan pengadilan terhadap Ahok—sebagaimana digambarkan sebelumnya—merupakan bukti nyata tentang bagaimana negara sedang didikte melayani ambisi politik kalangan Islamisme.

Seluruh fenomena tersebut telah menciptakan situasi kepanikan negara dalam menghadapi atau membendung arus Islamisme dan radikalisme di Indonesia. Upaya-upaya deradikalisasi yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya, terbukti tidak cukup ampuh dalam menghentikan aksi-aksi kekerasan yang eskalasinya semakin meningkat. Pada saat bersamaan, pemerintah juga semakin kehilangan kewibawaan di hadapan kelompok-kelompok Islamisme yang bergerak dalam berbagai saluran politik. Dalam situasi seperti inilah, pemerintah dipaksa untuk

menerapkan kebijakan-kebijakan strategis deradikalisasi. Alih-alih kebijakan dimaksudkan sebagai upaya menangkal radikalisme, hal ini lebih menggambarkan kepanikan itu sendiri.

Kepanikan tersebut tampak dalam kebijakan pemerintah ketika mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 tentang Organisasi Kemasyarakat, pada 10 Juli 2017. Perrpu ini kemudian popular dengan sebutan Perppu ormas radikal. Kebijakan pemerintah tersebut jelas lahir dalam situasi keruh ketika negara menghadapi tekanan yang serius dari gerakan aksi bela Islam. Perppu juga menggambarkan bagaimana kepanikan yang terjadi di tubuh pemerintah dalam menghadapi arus radikalisme di Indonesia. Terlepas dari polemik tentang potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjiwai Perrpu tersebut dan polemik lain sehingg Perrpu ini akhirnya sah menjadi Undang-Undang pada 24 Oktober 2017, hal yang tak bisa dipungkiri adalah arus radikalisme sesungguhnya telah menghantui negara. Inilah alasan mengapa negara membenarkan klausul-klausul di dalam Perrpu sangat berpotensi merepresi kebebasan masyarakat di masa yang akan datang.

Pemerintah melalui berbagai saluran juga menggelorakan gerakan Bhinneka Tunggal Ika di hampir semua wilayah di Indonesia. Tentara berperan aktif dalam perayaan-perayaan kebhinnekaan sebagai upaya mengembalikan identitas nasional yang dirongsong oleh gerakan radikalisme, terutama yang telah berhasil menginfiltrasi negara dan ormas-ormas modern.

Mengandaikan gerakan Bhinneka Tunggal Ika yang menjamur belakangan ini sebagai ekspresi masyarakat sipil, menjadi agak sulit pembenarannya karena negara ikut mengambil bagian terlalu dalam, bahkan dalam kadar tertentu gerakan Bhinneka Tunggal Ika tersebut seperti bersifat *top-down* oleh instruksi pemerintah. Sisi baiknya adalah, lahir kegairahan dan kesadaran baru dalam masyarakat dalam menguhkan identitas kebangsaan, komitmen kepada Pancasila dan motto bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Sisi buruknya adalah, gerakan ini tidak pernah bisa diandaikan sebagai arus baru yang membendung radikalisme karena sifat gerakan yang instruksional cenderung jatuh menjadi sekadar perayaan, seremonial.

Tanpa bermaksud mengabaikan inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh masyarakat, tulisan ini masih memandang parade Bhinneka Tunggal Ika masih merupakan gerakan seremonial dan menggambarkan bagaimana negara menggunakan kekuatan sipil sebagai benteng atas ketidakberdayaannya dalam menghadapi arus radikalisme. Negara telah mengembangkan kebijakan akomodatif terhadap gerakan intoleransi dan radikalisme pada awalnya, negara pula yang *kedodoran* menghadapi arusnya, dan mau tidak mau harus menggunakan kekuatan masyarakat untuk mengarusutamakan gerakan deradikalisasi. Pendek kata, skema gerakan yang cenderung *top-down* demikian, setidaknya hingga saat artikel ini ditulis, masih belum beranjak dari sifat seremonialnya.

Kepanikan pemerintah juga tampak pada upaya-upaya dalam membersihkan anasir-anasir fundamentalisme di Perguruan Tinggi. Akibat berbagai kritik, pemerintah

mulai mengembangkan konsen terhadap pembentengan di Perguruan Tinggi karena menyadari bahwa institusi tersebut telah lama menjadi sarang pengkaderan dan pembenihan gerakan radikalisme. Upaya deradikalisasi di Perguruan Tinggi bahkan dirancang dengan cara "mengintervensi" pemilihan rektor sebuah Perguruan Tinggi. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, merupakan representasi pemerintah yang mewacanakan hal ini, dan menjelaskan bahwa pemilihan rektor harusnya dikonsultasikan dulu kepada presiden. Skema ini dianggap sebagai strategi yang efektif dalam menangkal arus radikalisme di kampus. Lebih jauh, Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa skema tersebut sama dengan pemilihan pejabat eselon I dan Sekda Provinsi. Nama-nama calon dikonsultasikan kepada tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden (*tempo.co*/1/6/2017).

Demikianlah, pemerintah tampak telah mengerahkan semua kemampuannya untuk melakukan skema deradikalisasi. Pada sisi permukaan, semua upaya tersebut merupakan langkah efektif yang harus diambil dalam rangka menyelamatkan negara dari ancaman arus radikalisme. Meski begitu, langkah-langkah potong kompas tersebut akan memiliki dampak panjang bagi demokratisasi di Indonesia. UU Ormas misalnya, oleh sebagian akademisi dan pegiat HAM, dianggap memiliki potensi besar dalam memberangus kebebasan sipil, terutama kebebasan berserikat, berpendapat, dan beragama/berkeyakinan. Langkah intervensi terhadap rektor di Perguruan Tinggi juga dinilai akan berdampak panjang bagi pemupukan demokratisasi di kampus. Intinya, semua pilihan strategi deradikalisasi yang dikembangkan oleh negara, semua memiliki efek dampak panjang yang belum bisa dirasakan saat ini.

Program Moderasi Islam—yang ditawarkan dan digagas oleh Kementerian Agama—juga lahir dalam situasi seperti yang digambarkan di atas. Gagasan ini disampaikan pada awal tahun 2017, masih merupakan bagian dari upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dalam membendung arus radikalisme, terutama di Perguruan Tinggi. Kementerian Agama sendiri memandang bahwa menguatnya radikalisme telah sangat mengancam tata kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia yang sebelumnya dikenal toleran karena dinaungi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kementerian Agama berpandangan bahwa salah satu upaya membendung arus radikalisme tersebut adalah dengan mengarusutamaan ide-ide moderasi Islam yang bisa dikapitalisasi melalui Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN).

Dalam kaitan pengarusutamaan inilah, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menghimbau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mampu memainkan peran yang strategis dan efektif. Menteri Agama berpandangan bahwa PTKIN seharusnya mampu menjadi garda depan dalam mensosialisasi gagasan moderasi Islam, dan pada saat bersamaan berperan penting dalam program-program deradikalisasi. Bagaimana hal itu bisa diwujudkan? Menteri Agama mendorong agar semua Perguruan Tinggi Islam memiliki Pusat Moderasi Islam. Gagasan ini bisa juga diwujudkan dalam bentuk pusat studi atau laboratorium pemikiran yang intinya berfungsi sebagai pembasisan dan strategi diseminasi ide-ide moderasi Islam.

Himbauan ini disampaikan oleh Menteri Agama dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk

"Peran PTKIN dalam Memperkuat Kebhinnekaan dan Menangkal Isu Intoleransi", bersama dengan pimpinan PTKIN se Indonesia, di Jakarta, 24 Januari 2017. Dalam kesempatan tersebut Menteri Agama dengan penuh semangat menyatakan, "PTKIN punya tanggung jawab utama berdiri di garis terdepan. Pusat Moderasi Islam yang saya bayangkan adalah lembaga yang menjadikan moderasi sebagai isu utama dalam semua kiprah Perguruan Tinggi." Hal sama juga ditegaskan oleh Sekjen Kemenag, Prof. Dr. Nur Syam, di acara yang sama. Intinya, melalui Pusat Moderasi Islam—atau apa pun namanya dalam proses perwujudannya berdasarkan inisiatif masing-masing Perguruan Tinggi, PTKIN diproyeksikan sebagai salah satu kekuatan utama dalam menangkal arus radikalisme.

Argumentasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama memang benar. PTKIN memang harus menjadi kekuatan paling depan dalam gerakan deradikalisasi. Setidaknya hal ini disokong oleh dua alasan sekaligus. *Pertama*, PTKIN oleh banyak kalangan dianggap sebagai benteng terakhir yang membendung gerakan intoleran dan radikalisme. Ada keyakinan bahwa arus radikalisme selalu menghadapi kesulitan tersendiri dalam mengilfiltrasi Perguruan Tinggi Islam. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, para mahasiswa dan akademisi di lingkungan PTKIN umumnya telah memiliki modal khazanah pemikiran Islam yang cukup sehingga kampanye Islamisme seringkali tidak laku dijual. Mahasiswa-mahasiswa UIN dan IAIN yang dikenal dengan pikiran-pikiran "nakal"-nya tidak mudah "dibujuk" untuk mengubah orientasi keagamaan mereka menjadi fundamentalis atau radikalis. Kenyataannya memang demikian, meski perkembangan

mutakhir sesungguhnya menyatakan bahwa PTKIN juga tidak benar-benar kebal oleh arus radikalisme.

Kedua, menguatnya radikalisme di Indonesia salah satunya juga disebabkan oleh kalangan mayoritas Islam moderat yang memilih bersikap pasif. Fenomena ini sering disebut dengan istilah *the silent majority*. Islam intoleran dan radikalis berkembang besar bukan semata-mata karena kecanggihannya dalam mengendalikan kesadaran masyarakat, tetapi juga didukung oleh kalangan Islam moderat yang memilih diam. Atas dasar inilah, para akademisi dan intelektual Islam modern yang umumnya berada di berbagai Perguruan Tinggi Islam harusnya mulai turun gunung, menumbuhkan inisiatif untuk menjadi bagian dari kekuatan intelektual yang menghentikan radikalisme melalui pengarusutamaan ide-ide moderasi Islam.

Seluruh PTKIN menyambut baik gagasan tersebut. Beberapa kampus langsung menerjemahkan gagasan Pusat Moderasi Islam dalam pelbagai kegiatan dan pendirian lembaga resmi Pusat Moderasi. IAIN Tulungagung misalnya, sejak mendapatkan himbauan Menteri Agama, langsung mewujudkan berdirinya lembaga tersebut. Banyak kegiatan yang dihelat di berbagai Perguruan Tinggi Islam yang intinya adalah upaya mengarusutamakan ide-ide moderasi. Bagaimanapun, PTKIN idealnya memang memiliki peran penting dalam upaya-upaya deradikalisasi. Intinya, kampus harus menjadi lokus deradikalisasi.

Gagasan menjadikan kampus sebagai lokus deradikalisasi terus didorong oleh pemerintah. Puncaknya adalah aksi dan deklarasi melawan radikalisme yang dilakukan oleh 3000 rektor, wakil rektor, dan direktur

Perguruan Tinggi se-Indonesia. Deklarasi ini digelar di Nusa Dua, Bali, pada 26 September 2017. Tidak tanggung Presiden langsung yang menghadiri acara tersebut dan bertemua dengan pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia dalam rangka meyakinkan gerakan kampus melawan radikalisme. Tidak hanya para pimpinan Perguruan Tinggi, selanjutnya 4.5 juta mahasiswa Indonesia juga menjadi bagian dari aksi kebangsaan yang menyerukan perlawanan terhadap radikalisme pada 28 Oktober 2017 yang dilakukan serentak di Indonesia.

Demikianlah, gerakan radikalisasi yang diinstruksikan oleh pemerintah itu, telah menjadi arus baru yang menggelorakan semangat para akademisi dan mahasiswa untuk menjadi bagiannya. Dalam konteks PTKIN, gerakan tersebut juga telah melahirkan gegap gempita luar biasa di dalam kampus, terutama karena lahirnya Pusat Moderasi Islam. Sayangnya, sekali lagi, ini masih menjadi gerakan yang gemuruh di level seremonial dan miskin skema pengembangan jangka panjang. Inilah salah satu risiko yang harus diambil bila gerakan masyarakat sipil diintervensi oleh kepentingan negara. Pusat Moderasi Islam sendiri telah hampir setahun dideklarasikan, dan hingga saat ini—sejauh yang bisa diamati, masih sangat miskin skema kerja jangka panjang, dan harus jatuh dalam kegiatan seremoni ke seremoni yang lain.

Dalam konteks Pusat Moderasi Islam, setelah hampir setahun didirikan, dan tidak tampak ada tanda-tanda lembaga tersebut mampu mewujudkan cita-cita pengarusutamaan ide-ide moderasi, tentu saja hal ini bukan tanpa penjelasan. Pertama, di dalam tata kelembagaan kampus institusi ini

tidak didukung oleh skema pendanaan yang bersumber dari APBN. Alhasil, meski ekspektasi yang menyertai kelahiran lembaga ini begitu tinggi, akan tetapi pemerintah tidak menciptakan *supporting system* apa pun yang memungkinkannya bisa mewujudkan program-program yang berkesinamnbungan. Faktanya, Pusat Moderasi Islam di PTKIN telah menjadi lembaga yang dilahirkan untuk berjuang sendiri. Dan, absennya *supporting system* itu telah menjadi faktor utama yang menyebabkan Pusat Moderasi Islam seperti tidak beranjak ke mana-mana. Hal ini persis seperti kritik terhadap program deradikalisasi Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) yang dianggap mandul karena lemahnya pendanaan.

Melampaui problem anggaran, skema gerakan deradikalisasi secara umum—termasuk pengarusutamaan ide-ide moderasi Islam—memang lebih merepresentasikan kepanikan pemerintah daripada inisiatif masyarakat sipil yang dipupuk menjadi kesadaran ideologis dan menjadi arus baru dalam masyarakat. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan semua gerakan tersebut seperti tidak pernah bisa beranjak dari sekadar gerakan seremonial. Atas dasar inilah, artikel ini perlu mengusulkan sejumlah upaya-upaya penyelamatan yang perlu dilakukan untuk mengawal pengarusutamaan ide-ide moderasi Islam, melampaui skema pemerintah cenderung formalis-administartif. Sebagian Usulan ini dirumuskan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) bertema "Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Wahid Foundation pada 29 September 2017 di Jakarta. FGD ini merupakan salah satu dari sedikit inisiatif yang dilakukan oleh

organisasi sipil dalam merancang program deradikalisasi yang bersifat *sustainabel*.

Pertama, gerakan deradikalisasi—bisa berbentuk pengarusutamaan ide-ide moderasi Islam, harusnya dirangcang untuk membangun "panggung" sendiri, dan tidak merupakan reaksi atas 'genderang' yang ditabuh oleh orang lain. Ide ini disampaikan oleh Anas Saidi, staf Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Harus diakui bahwa reaksi atas gerakan intoleransi dan radikalisme yang berkembang selama ini masih merupakan reaksi atas pergerakan-pergerakan kelompok-kelompok Islamis dan Jihadis. Energi gerakan deradikalisasi akan habis hanya untuk mereaksi, tanpa menemukan langgamnya sendiri. Menciptakan "panggung" sendiri sama artinya dengan menggali dan merefleksi lebih jauh, nilai-nilai dan ideologi kebangsaan yang menjadi modal utama dalam pengarusutamaan ide-ide yang bersenyawa dengan semangat kebangsaan Indonesia.

Kedua, atas dasar pikiran di atas, gerakan deradikalisasi dan mengarusutamaan ide-ide moderasi harus berani menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam denyut nadi kehidupan masyarakat. Para penyokong ide-ide moderasi Islam harus mampu mentransformasikan Pancasila sebagai ilmu yang digali dasar-dasar epistemologi, ontologi, dan aksiologinya sehingga gerakan pembasisan Pancasila dan ide-ide moderasi memiliki napas yang panjang serta gayung bersambut dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat.

Ketiga, pengarusutamaan ide-ide moderasi harus ditempuh dengan merebut kembali ruang sekecil-kecilnya,

baik yang ada di masyarakat maupun di kampus. Hal ini meniscayakan gerakan deradikalisasi dan mengarusutamaan ide-ide moderasi harus menjadi gerakan sipil yang digelorakan dengan menumbuhkan kesadaran baru dalam bernegara dan berbangsa. Ruang sosial masih menjadi ruang kontestasi ideologi yang paling ampuh dalam menguji suatu gerakan sosial. Pendek kata, gerakan deradikalisasi dan pengarusutamaan ide-ide moderasi harus ditempuh di medan *civil society* dan dengan demikian mengandaikan pentingnya fungsi agen-agen perubahan, transformasi kesadaran, dan pembasisan dalam periode yang panjang. []

Para Penulis

1. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I., lahir di Blitar, pada tanggal 01 Juni 1972. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Tulungagung. Jenjang pendidikan S1 ditempuh di IAIN Sunan Ampel, Tulungagung. Sedangkan pada program master beliau tempuh di Universitas Islam Malang, masih di kota yang sama, beliau mengambil program doktoral di Universitas Negeri Malang. Pernah pula menempuh pendidikan nonformal di PP At-thohiriyah, Tulungagung. Di tengah kesibukannya sebagai seorang akademisi dan pejabat di lingkuangan kampus, beliau masih menyempatkan aktif di berbagai organisasi, salah satunya sebagai Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII Tulungagung. Saat ini tinggal di Tegal Rejo, RT01/RW05, Rejotangan. Untuk keperluan komunikasi beliau bisa dihubungi pada akun email aziz_suci72@yahoo.co.id.

2. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.I., dilahirkan di Jember Jawa Timur, 1 Agustus 1981. Jenjang strata satu (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam lulus tahun 2003 dengan bantuan beasiswa dari PT. Gudang Garam tbk, melanjutkan program Magister (S2) program studi Manajemen Pendidikan Islam di kampus yang sama dan lulus pada tahun 2006. Wisudawan terbaik S1 (2003) dan

S2 (2006) di UIN Malang, serta Juara 1 dalam lomba debat antarmahasiswa di kampus. Pada tahun 2007 penulis mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama RI untuk melanjutkan studi program doktor di UNINUS Bandung konsentrasi Manajemen Pendidikan dan lulus sebagai lulusan termuda pada program doktor (S3) tahun 2011. Penulis adalah sekretaris Ikatan Sarjana Nadhlatul Ulama cabang kab Tulungagung periode 2012-2016.

3. Abd Khair Wattimena, M.H.I., lahir di Laimu pada tanggal 04 Agustus 1978. Pernah nyantri di Pondok Pesantren Darul Ulum Kabupaten Jombang. Jenjang S1-nya diselesaikan di Universitas Darul Ulum Jombang, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Widyagama Malang. Sempat bekerja di Yayasan ICDHRE, sebuah NGO yang konsen pada perjuangan HAM bekerjasama dengan CORDAID Nederland di tahun 2003 sampai 2009. Sekarang penulis berprofesi sebagai dosen tetap di IAIN Tulungagung Jawa Timur.

4. Arifah Millati Agustina, **M.H.I.**, lahir di Nganjuk pada 15 Agustus 1987. Menghabiskan masa studi pada tingkat menengah di Pondok Pesantren Tambak Beras-Jombang pada program Muallimin-Muallimat, pada kurun tahun 2000 hingga 2006. Melanjutkan studi sarjana di UIN Malang dan lulus pada tahun 2010 dengan label mahasiswa berprestasi Fakultas Syariah UIN Malang. Keinginan untuk memperdalam wawasan dalam bidang Hukum Islam mengantarkannya studi lanjut di UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta, lulus dengan predikat *cumlaude* pada tahun 2012.

5. Ahmad Supriyadi, **M.H.I.**, lahir di Tulungagung, pada 20 November 1984. Pendidikan S-1-nya ditempuh di STAIN (sekarang IAIN) Tulungagung di Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Jenjang S2 diperoleh di Kampus STAI Diponegoro Tulungagung. Saat ini aktif sebagai Dosen di IAIN Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Aktif sebagai pegiat zakat, menjabat sebagai Direktur BAZNAS Kab. Tulungagung 2008-2016. Saat ini juga aktif sebagai Anggota MUI Kab. Tulungagung bidang Ekonomi, Sekretatis Dewan Masjid Indonesia (DMI), Wakil sekretatis Maarif NU Cabang Tulungagung, Sekretatis JQH NU Tulungagung dan anggota LPTQ Kab. Tulungagung.

6. Ahmad Yuzki Maksum, **M.Pd.**, dilahirkan di Tulungagung, 7 September 1990. Setelah tamat dari MII Pinggirsari (2003), ia melanjutkan pendidikan ke MTsN Tulungagung (2003-2006), lalu SMAN Boyolangu (2006-2009) sembari nyantri di Ponpes MIA, Moyoketen Boyolangu. Di tahun 2009, ia melanjutkan pendidikanya ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), jurusan Sastra Arab, Universitas Indonesia, dan selesai pada 2013. Saat kuliah di UI, ia aktif dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Depok serta tercatat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sastra Arab UI (2011). Tahun 2014-2016, ia menimba ilmu di Pascasarjana IAIN Tulungagung dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang ia aktif sebagai ketua GP Ansor Kecamatan Ngantru serta menjadi staf pengajar untuk mata kuliah Bahasa Arab di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

7. Annas Ribab Sibilana, M.Pd.I., lahir di Jember 18 Oktober 1992. Menempuh jenjang sarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Pendidikan Agama Islam, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan studi S-2 di almamater yang sama dengan mengambil program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Selama di bangku perkuliahan aktif di berbagai organisasi baik intra maupun ekstra kampus, di antaranya, HMJ PAI, DEMA FITK dan PMII. Saat ini mengabdikan ilmunya di Kampus Dakwah dan Peradaban IAIN Tulungagung.

8. Ade Idham Prayogi, M.Pd.I., menyelesaikan jenjang Sarjana dan Pascasarjana di IAIN Tulungagung. Sekarang menjadi dosen tetap di IAIN Tulungagung.

9. Abduloh Safik, M.Fil.I., lahir di Surabaya, pada 12 Juli 1981. Menempuh jenjang pendidikan S-1 UIN Malang. Kemudian melanjutkan S-2 di UIN Sunan Ampel Dauroh Taklimiyah al Islamiyah Tarim Yaman. Ia pernah menjabat sebagai Sekjen PMII Komisariat UIN Malang 2004, Ketua GP Ansor PAC Rungkut Surabaya 2010 dan Lakpesdam NU Cabang Kota Surabaya 2015. Sekarang ia tercatat sebagai Dosen Filsafat Islam di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Tulungagung.

10. Budi Harianto, M.Fil.I., lahir di kota angin Nganjuk dan sampai sekarang berdomisili di kota tersebut. Semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah diselesaikan di kota kelahiran. Jenjang pendidikan S1 sampai S2 diselesaikan di IAIN (Sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya dan saat ini tengah proses penyelesaian Studi S3 di almamater yang sama. Semasa mahasiswa aktif terlibat dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta pernah menjadi

Ketua Umum PMII Adab Komisariat Sunan Ampel Cabang Surabaya. Sekarang telah mengabdikan diri sebagai dosen tetap di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung.

11. Citra Ayu Kumala Sari, M.Psi., lahir di Tulungagung 18 April 1987. Menamatkan sekolah menengah di Pondok Pesantren Walisongo Ponorogo selama 6 tahun. Lulus S1 di jurusan Psikologi UIN Maliki Malang tahun 2010. Lulus Magister Psikologi Pendidikan di Universitas 17 Agustus Surabaya tahun 2013. Saat ini menjadi dosen di IAIN Tulungagung mengampu mata kuliah psikologi pendidikan dan bimbingan konseling. Dan aktif menjadi penggerak kegiatan Fatayat NU di tanah kelahiran.

12. Didin Wahyudin, M.Pd., lahir di Ciamis 14 Juni 1991. Ia adalah Dosen Luar Biasa (DLB) yang mengampu Mata Kuliah Fikih di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) di IAIN Tulungagung.

13. Elok Fitriani Rafikasari, M.Si., lahir di Kediri pada tanggal 21 September 1989. Menyelesaikan pendidikan dasar, menengah dan atas di Kota kelahiran. Melanjutkan petualangan belajar di Universitas Negeri Malang, Jurusan Matematika dengan konsentrasi statistika (*multivariate analysis*). Sedangkan jenjang Master ditempuh di ITS dengan Konsentrasi statistika komputasi hanya dalam 3 semester. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

14. Elva Yohana, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S-1 di Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris UIN Malang, lulus pada tahun 2011. Melanjutkan S-2, dengan konsentrasi Pendidikan Bahasa Inggris di Univ. Negeri Malang, lulus

2014. Pada tahun 2015 menjadi Dosen Bahasa Inggris di IAIN Tulungagung sampai sekarang.

15. Jati Pamungkas Jati Pamungkas, M.Hum., dilahirkan di Tulungagung pada 4 Mei 1989. Lulus S-1 pada tahun 2013 dengan gelar Sarjana Humaniora di Program Studi Sastra Arab, Universitas Indonesia (UI). Sedangkan program S-2-nya, diselesaikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan konsentrasi Studi Kawasan Timur-Tengah, lulus pada tahun 2015. Saat ini, ia mengabdi di IAIN Tulungagung.

16. Khabibur Rohman, M.Pd.I., adalah dosen pengampu mata kuliah "Matematika Dasar". Punya ketertarikan yang mendalam dengan segala macam tema pendidikan. Percaya bahwa revolusi tak dimulai dari warung kopi, apalagi ruang konferensi, tapi dimulai dari ruang-ruang kelas, tempat bertemunya orang-orang yang kasmaran dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Pernah berproses di LPM Dimensi dan PMII.

17. Luluk Indarti, M.Pd.I., tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Jenjang pendidikan S1 dan S2-nya diselesaikan di STAIN (sekarang IAIN) Tulungagung, dan saat ini penulis menempuh jenjang doktoral di kampus yang sama. Pada tahun 2016 penulis mulai mengabdi di almamaternya sebagai dosen tetap non PNS dan ditempatkan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). Penulis juga aktif dalam kegiatan di luar kampus, tercatat sebagai pengurus Fatayat NU Cabang Tulungagung periode 2014-2019, Lakpesdam NU Tulungagung 2014-2019 dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Cabang Tulungagung.

18. Muhammad Aziz Hakim, M.H., saat ini menjabat Ketua Pusat Moderasi Islam IAIN Tulungagung dan sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam IAIN Tulungagung. Penulis cukup aktif di berbagai organisasi. Pernah menjadi Ketua Organisasi Pelajar Program Keagamaan (OPPK) MAKN MAN 1 Surakarta tahun 1997-1998, Pemimpin Redaksi LPM Justisia Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2001-2002, Presiden Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang tahun 2002-2003, Pengurus PB PMII tahun 2005-2007, dan kini menjabat sebagai Wakil Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor Masa Khidmah 2015-2020. Selain aktif di organisasi, juga sering menulis di berbagai media massa baik nasional maupun regional, seperti *Kompas, Republika, Jawa Pos, Seputar Indonesia, Suara Merdeka*, dan media lokal lainnya. Di samping itu, pernah menjadi editor di Penerbit Renaisan Jakarta dan Konstitusi Press (KonPress) Mahkamah Konstitusi RI.

19. M. Luqman Hakim Abbas, M.Pd., lahir di Jombang pada tanggal 17 Februari 1988, anak pertama dan terakhir dari pasangan Ach. Bashori dan Maslamah. pendidikan Strata satu telah ditempuh di Universitas Negeri Surabaya untuk program studi Fisika. Pendidikan magister di Universitas Negeri Malang dengan program studi Pendidikan Fisika. Menikah pada tahun 2012 dengan Zuliani dan dikaruniai dua anak yang bernama M. Haidar Al Hakim dan Hilya Rahmah Al-hakim. Saat ini bertempat tinggal Di Desa Kalikejambon, Kec. Tembelang, Kab. Jombang. Setiap hari pulang pergi Jombang Tulungagung untuk mengamalkan ilmu di IAIN Tulungagung.

20. Mukhamad Sukur, M.Pd.I., lahir di Tulungagung pada 1 Mei 1983. Jenjang pendidikan S-1 & S-2-nya di selesaikan di STAIN (sekarang IAIN) Tulungagung. Pernah aktif di berbagai organ intra maupun ekstra, salah satunya Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tulungagung sebagai Sekretaris I pada tahun 2006-2007 dan Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2017.

21. Muksin, M.H.I., lahir di Bangkalan Jawa Timur, penulis menyelesaikan pendidikan sekolah Dasar di tempat kelahirannya SDN Gunelap 01 sedangakan untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Sunan Ampel dan Menengah Atas di MAN Bangil Pasuruan, setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sarjana dan Pascasarjananya di salah satu kampus di kota sejuk malang yaitu Universitas Islam Malang.

22. Mochamad Chobir Sirad, M.Pd.I., lahir di bumi ruwai jurai Bandar Lampung, April 1980 dari pasangan suami istri H. Saidi dan Rusmiati. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Bandar Lampung. Pernah Nyantri di Tulungagung tahun 1993 dan di Ponorogo tahun 1996. Menamatkan Sarjana muda di Fakultas Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab STAIN Tulungagung tahun 2003. Lulus S2 IAIN Tulungagung Jurusan Pendidikan Bahasa Arab tahun 2014. Saat ini menjadi Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung. Aktif di GP. Ansor Tulungagung dan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tulungagung.

23. M. Rois Abin, M.Pd.I., lahir di Blitar, 10 Juni 1988. Mengenyam Pendidikan Menengah Atas di Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) Kota Blitar. S1 ditempuh di STAIN Tulungagung di Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam. Sedangkan jenjang S2-nya juga diperoleh di kampus yang sama. Selama di bangku perkuliahan aktif di organisasi intra dan ekstra kampus, di antaranya: Ketua Senat Mahasiswa Jurusan Tarbiyah dan Menteri Kabinet BEM STAIN Tulungagung. Selain itu ia juga aktif di PMII sejak Pengurus Rayon sampai Cabang. Saat ini aktif sebagai dosen di IAIN Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

24. Mir Fahmi M.R, M.Pd.I., lahir pada tanggal 25 Mei 1991 di Blitar. Menempuh studi S-1 dan S-2 jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN Tulungagung. Saat ini, di samping menjadi dosen yang aktif mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, ia juga menjadi admin jurusan PAI bagian akademik.

25. Muhammad Fatoni, M.Pd.I., menyelesaikan jenjang Sarjana dan Pascasarjana di IAIN Tulungagung. Sekarang menjadi dosen tetap di IAIN Tulungagung.

26. Refki Rusyadi, M.Pd.I., lahir Tanjungjabung Kuala Tungkal.Aktif di PMII kota Malang sejak 2006-2012. Riwayat pendidikan S-1 ditempuh di UIN Malang dengan konsentrasi Jurusan Sastra Arab. Kemudian melanjutkan studi S-2 di kota Surabaya mengambil Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang berdomisili di Blitar bersama istri dan seorang putra.

27. Saiful Mustofa, M.Ag., lahir di Tulungagung 22 Maret 1991. Pernah "main-main" di STAIN (sekarang IAIN) Tulungagung dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan "main-main" (lagi) di Pascasarjana kampus

yang sama dengan mengambil jurusan Filsafat Agama dan lulus pada tahun 2017. Selama "main-main" itu, ia sempat menjadi partisipan di PMII dan Pusat Kajian Filsafat dan Teologi (PKFT) Tulungagung. Pernah *nimbrung* menulis antologi puisi berjudul, *Kembalilah Siswa-Siswa Semesta* (2013) terbitan Quantum Litera Center (QLC) Trenggalek, antologi esai *Verba-Littera: Menyelam dalam Belukar Aksara* (2014) bersama teman-teman Pusat Kajian Filsafat dan Teologi (PKFT), bunga rampai *Geliat Literasi: Semangat Membaca dan Menulis dari IAIN Tulungagung* (2015) dan buku terbarunya: *Menemukan Jati Diri: Sebongkah Refleksi Pendidikan Terkini* (Intrans Publishing: 2017). Beberapa tulisannya pernah dimuat di *Surya, Detik, Harian Jateng*, *Radar Blitar* (*Jawa Pos Group*) dan *Kompas*. Sekarang selain menulis, ia menjadi editor di *Akademia Pustaka* dan Jurnal *Epistemé* (Terakreditasi B berdasarkan SK. Dirjen Ristek Dikti Nomor 36a/E/KPT/2016). Sehari-hari ia bisa ditemui di Kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Tulungagung. Ia bisa dihubungi di surel: sayfulmuztofa@gmail.com atau 085649133515 (WA).

28. Syamsul Umam, M.H.I., adalah dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Fasih) IAIN Tulungagung.

29. Siswahyudianto, M.E., adalah dosen tetap di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung.

30. Muhamad Arifin, M.H.I., lahir di Demak pada tanggal 27 Januari 1982. Pada tahun 2003 masuk di jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan lulus pada tahun 2009. Pendidikan

magisternya ditempuh pada tahun 2010, dengan mengambil konsentrasi Dirasah Islamiyah di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus pada tahun 2013 dengan predikat *cumlaude*.Pada tahun akademik 2016/2017 mulai mengabdi di IAIN Tulungagung dengan penempatan di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kini sedang mulai belajar mengakrabkan diri dengan dunia tulis-menulis setelah ditugaskan untuk mengajar mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.

31. Akhol Firdaus, M.Pd., adalah Direktur Institute for Javanese Islam Research (IJIR) IAIN Tulungagung. Saat ini sedang menyelesaikan studi doktoral Studi Islam Interdisipliner (SII) di IAIN Tulungagung.

PIMPINAN CABANG

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

TULUNGAGUNG – INDONESIA

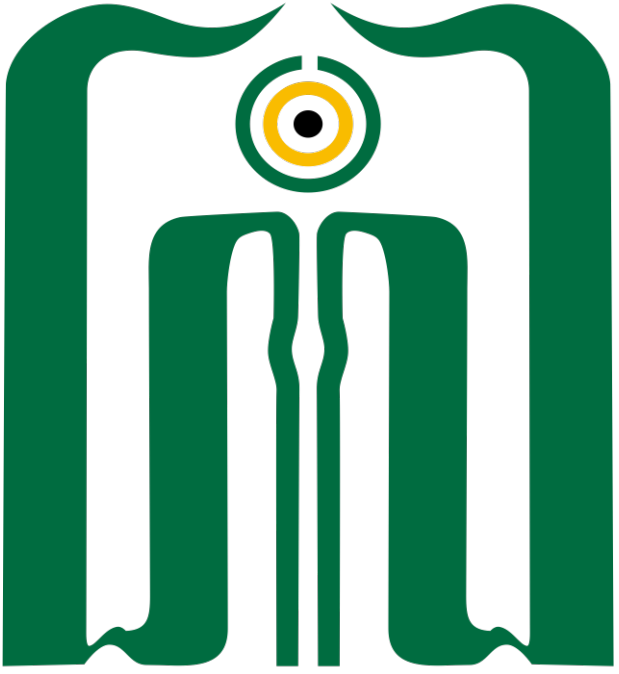

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

MODERASI ISLAM

Deradikalisasi, Deideologisasi & Kontribusi untuk NKRI

Moderasi Islam tentu bukan pengotak-ngotakkan Islam, bukan pula sekadar nama suatu kelompok semata melainkan Islam adalah moderat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan al-Qur'an (al-Baqarah: 143), yang menyebut umat Islam sebagai ummatan *washatan* (umat pertengahan). Islam moderat berpegang teguh pada nilai *tawasuth*, *tawazun* dan *tasamuh*, berada di antara dua kutub ekstrem: Kanan dan Kiri.

Di tengah kondisi disintegrasi bangsa yang mengkhawatirkan akibat tarikan kepentingan seperti sekarang, kehadiran buku bunga rampai yang ditulis oleh dosen-dosen muda IAIN Tulungagung dari berbagai disiplin ilmu ini, adalah salah satu ikhtiar menegaskan (kembali) posisi dan esensi Islam Indonesia dalam arti sesungguhnya.

Semua tulisan di dalam buku ini tak hanya sekadar ulasan hasil comotan dari berbagai sumber, melainkan juga perpaduan dari hasil renungan yang penuh *insight*. Meski ditilik dari perspektif yang beragam namun titik temu (*meeting point*) dari semuanya tidak lain adalah menegaskan kembali moderasi Islam dalam konteks kebangsaan. Dengan demikian, tak berlebihan bila kehadiran buku ini semacam berkah tak terduga (*blessing in disguise*) di tengah dongkalnya nalar beragama.

IAIN Tulungagung Press
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung
Email : iain.tulungagung.press@gmail.com
Tlp/Fax : (0355) 321513/321656